

Pesan dari Kelompok Kerja Multi Pemangku Kepentingan Timor-Leste

Kelompok Kerja Multi-pemangku kepentingan (MSWG) dengan senang hati menginformasikan bahwa mereka telah menyetujui dan menerbitkan Laporan Rekonsiliasi EITI Timor-Leste ke-11 yang mencakup informasi untuk Tahun Anggaran 2018. Ini akan menjadi laporan pertama yang mematuhi persyaratan dari Standar EITI 2019 meskipun ada tantangan yang dihadapi sepanjang pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Laporan ini dibuat oleh Independent Administrator (IA), Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA, yang dipilih sesuai dengan Standar EITI 2016 pada Januari 2019.

Menyusul keputusan Dewan untuk mengubah mekanisme pelaporan pada tahun 2020 karena situasi COVID-19, MSWG memutuskan untuk mempertahankan metode pelaporan konvensional yang melibatkan rekonsiliasi informasi. MSWG telah mengatasi tantangan dalam menerapkan persyaratan EITI yang menunjukkan praktik terbaiknya melalui pengungkapan informasi terpilah oleh entitas pelapor, jenis pendapatan, dan pelaporan tingkat proyek. Selain itu, MSWG dengan upayanya berupaya untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan persyaratan Standar baru seperti Beneficial Ownership (BO), masalah gender dan pembayaran lingkungan.

Periode pelaporan ini, informasi rinci tentang kegiatan pertambangan, daftar pemilik manfaat, cakupan pengarusutamaan, pengembalian pajak dan masalah penyelesaian pajak juga dilaporkan. Pengungkapan yang terakhir, telah membuktikan bahwa MSWG berupaya untuk mematuhi transparansi di luar tujuan EITI. Berdasarkan ambang materialitas yang disepakati (\$ 100.000 ke atas), ada dua puluh empat operator, tujuh belas sub-kontraktor dan empat entitas pemerintah dalam cakupan tersebut. Semua operator dan entitas pemerintah serta sebelas subkontraktor telah melaporkan informasi pendapatan mereka untuk tahun fiskal 2018 kepada IA. Selain itu, dengan transisi baru-baru ini yang terjadi pada pertengahan tahun 2020, semua informasi yang dilaporkan untuk entitas ConocoPhilips diserahkan oleh Santos Ltd.

Akhirnya, dengan laporan ini, MSWG telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi masalah mayoritas yang teridentifikasi dari periode pelaporan terakhir dan berharap dapat memenuhi harapan dari tujuan Standar 2019 dalam Validasi mendatang pada tahun 2021.

Hormat kami, Anggota MSWG,

Industri

Pemerintah

Masyarakat sipil

BUMN

Daftar Singkatan

ANPM	Autoridade Nacional do Petróleos e Minerais	IPMC	Kode Penambangan Minyak Sementara	SERN	Sekretaris Negara untuk Sumber Daya Alam
APT	Pajak Laba Tambahan	IUA	International Unitisation Agreement	SOE	Badan Usaha Milik Negara
ASM	Penambangan Skala Kecil Artisanal	JC	Komisi Gabungan	SPT	Pajak Minyak Bumi Tambahan
BCTL	Banco Central de Timor-Leste (Timor-Leste Central Bank)	JPDA	Area Pengembangan Minyak Bersama	TL	Timor-Leste
BOE	Laras Setara Minyak	LNG	Gas Alam Cair	TLEA	Wilayah Eksklusif Timor-Leste
BOPD	Barel Minyak per hari	LPG	Gas Minyak Cair	TOR	Kerangka acuan
BPT	Pajak Laba Cabang	MoF	Menteri Keuangan	TSDA	Otoritas Khusus Laut Timor
CFET	Dana Konsolidasi untuk Timor Lorosae	MOU	Nota kesepahaman	TST	Perjanjian Laut Timor
CMAT S	Pengaturan Maritim Tertentu Di Laut Timor	MPMR	Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral	UN	Persatuan negara-negara
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil	MSWG	Multi-Stakeholder Working Group	UNTAE T	Administrasi Transisi PBB di Timor Timur
DNRP	Direção Nacional de Receitas Petroliferas	NDPM R	Pendapatan Nasional Direktorat Minyak dan Mineral	USD	Dolar Amerika Serikat
EITI	Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif	O&G	Minyak gas	VAT	Pajak Pertambahan Nilai
ESI	Taksiran Penghasilan Berkelanjutan	PF	Dana Minyak	WHT	Pajak Pemotongan
ETRS	Taksiran Penghasilan Berkelanjutan	PMC	Kode Penambangan Minyak	WIT	Pajak Penghasilan Upah
FTP	Minyak Tranche Pertama	PSA	Perjanjian Bagi Hasil	ZOCA	Area Kerjasama Zona
GDP	Produk domestik bruto	PSC	Kontrak Bagi Hasil	TCF	Triliun Kaki Kubik
IA	Administrator Independen	RDTL	Republik Demokratik Timor-Leste		

Indeks

1.	Ringkasan bisnis plan	7
2.	Inisiatif transparansi industri ekstraktif di Timor-Leste	15
	2.1 EITI and Timor-Leste	16
3.	Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada 2018 - Minyak & Gas	17
	3.1 Tinjauan Pendapatan Pemerintah	18
	3.2 Produk Domestik Bruto (PDB) – Timor-Leste	19
	3.2.1 Ekspor dan impor – Timor-Leste	20
	3.3 Produksi	20
	3.3.1 Bidang	22
	3.3.2 Produksi di BOE	23
	3.3.3 Produksi di USD	24
	3.4 Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	25
	3.4.1 Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak	26
	3.5 Pekerjaan yang dihasilkan dari Sektor Minyak & Gas	28
4.	Kerangka Regulasi - Industri ekstraktif pada 2018	30
	4.1 Kerangka Hukum Area Eksklusif Timor-Leste (TLEA)	32
	4.2 Kerangka Hukum Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA)	34
	4.3 Perjanjian khusus dengan Australia tentang Eksplorasi Minyak & Gas	35
	4.4 ANPM	40
	4.5 Dana Perminyakan	41
	4.6 Ringkasan proses pembayaran	48
	4.7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	49
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EITI Timor-Leste - 2018 Report 4

Indeks

	4.8 Lisensi / Pengungkapan kontrak	51	
5.	Rezim Pajak	52	
	5.1 JPDA - Bayu-Undan & Greater Sunrise Lain	53	
	5.2 JPDA - Bidang lain	55	
	5.3 TLEA - Area Eksklusif Timor-Leste	56	
6.	Tinjauan Industri Ekstraktif Timor-Leste pada 2018 – Pertambangan	57	
	6.1 Kerangka hukum	58	
	6.2 Proses lisensi	60	
	6.3 Legislasi Lingkungan	61	
	6.4 Aktivitas Pertambangan Timor-Leste	62	
	6.5 Cakupan pertambangan artisanal dan skala kecil (ASM)	64	
7.	Metodologi dan pendekatan	65	
	7.1 Lingkup Pekerjaan dan Administrator Independen	66	
	7.2 Batas materialitas untuk pengungkapan perusahaan	67	
	7.3 Pengumpulan data	70	
	7.4 Jaminan data	71	
	7.5 Pertimbangan lain	72	
8.	Rekonsiliasi pajak dan pembayaran lainnya	73	
	8.1 Rekonsiliasi angka-angka yang dilaporkan oleh Kontraktor	74	
	8.2 Rekonsiliasi angka yang dilaporkan oleh Subkontraktor	84	
	8.3 Biaya Pipa	91	
	8.4 Ringkasan hasil rekonsiliasi	92	
	8.5 Pembayaran di sektor pertambangan	93	
		EITI Timor-Leste - 2018 Report	5

Indeks

9	Kepemilikan yang Bermanfaat	95
10	Pengarusutamaan	99
11	Pengeluaran Sosial & Ekonomi	101
12	Rekomendasi	107
LAMPIRAN		
A.	Perusahaan di Sektor Migas	112
B.	Sektor Mineral 2006-2018	113
C.	Pembayaran Mineral di 2017	114
D.	Pembayaran Mineral di 2018	116
E.	Penambangan: Daftar Lisensi 2006 - 2018	119
F.	Kontrak Bagi Hasil Minyak & Gas	125
G.	Kegiatan di bidang utama	127
H.	Sumber daya minyak dan gas bawah laut Timor-Leste	128
1.	Blok Onshore Timor GAP	129
J.	Blok baru setelah SK UU 15/2019	130
K.	Kompilasi Minyak Baru - Perubahan Nilai Impor dan Ekspor	131

Ringkasan bisnis plan

Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative / EITI), diluncurkan pada tahun 2003, mempromosikan dan mendukung tata kelola yang lebih baik dan transparansi di negara-negara kaya sumber daya melalui publikasi dan audit penuh pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas, dan pertambangan. Sebagai komitmen sukarela dari para pemangku kepentingan dengan tujuan bersama, struktur EITI global terdiri dari negara-negara kaya sumber daya, perusahaan ekstraktif internasional dan nasional, masyarakat sipil, investor, dan negara pendukung. Setiap negara peserta harus menerbitkan laporan rekonsiliasi yang mencakup pendapatan untuk tahun fiskal terbaru yang disiapkan oleh auditor independen sesuai dengan Standar EITI.

Ini adalah laporan EITI kesebelas Timor-Leste, yang mencakup periode dari 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Sesuai dengan Standar EITI, proses pelaporan telah diawasi oleh Multistakeholder Working Group (MSWG), dan telah disusun oleh sebuah Independent Administrator, EY sesuai nomor kontrak layanan tertanggal 2 April 2019.

Pembayaran dan pendapatan, yang diungkapkan dalam laporan ini, termasuk pembayaran pajak dan bukan pajak, dan pembayaran lain yang direncanakan oleh undang-undang Timor-Leste.

Melalui partisipasi dalam EITI, Timor-Leste berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana sumber daya alam negara diatur, mempromosikan debat publik dan pemahaman tentang sektor ekstraktif dan meningkatkan daya tarik Timor-Leste sebagai tujuan investasi asing.

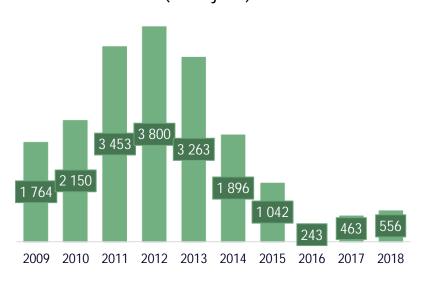
Timor-Leste





1. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif

Pendapatan Migas 2009-2018 (USD juta)



Sumber: Laporan EITI dari sembilan tahun terakhir

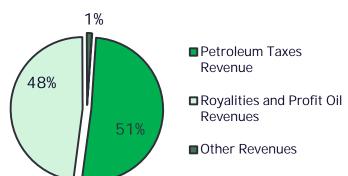
Pada tahun 2018, pendapatan minyak Timor-Leste mencapai 556 juta dolar, nilainya lebih dari dua kali lipat dari tahun 2016, dengan tahun 2016 memiliki nilai terendah dalam 8 tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, hasil yang tinggi tersebut berasal dari harga minyak yang lebih tinggi, yang didorong oleh permintaan global yang kuat dan produsen yang setuju untuk memangkas produksi. Padahal, pada tahun 2018 produksinya sebesar 38 juta barel sedangkan tahun 2017 sebesar 41 juta barel. Penurunan ini juga dijelaskan oleh fakta bahwa kegiatan operasional utama yang berdampak pada produksi mengalami penghentian pemeliharaan besar-besaran pada Mei 2018.

Sumber:

http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekDataGasListHTML & Laporan Tahunan Dana Minyak 2018

Grafik pertama menunjukkan data historis pendapatan dari sembilan tahun terakhir (dari laporan EITI sebelumnya), yang menunjukkan penurunan tajam pendapatan sejak 2012.

Struktur arus kas 2018



Pada gambar kedua ditampilkan struktur arus kas yang diterima dari kegiatan Perminyakan tahun 2018.

1. Produksi

Pada tahun 2018, seluruh minyak dan gas Timor-Leste diproduksi di lapangan gas Bayu-Undan yang terletak di lepas pantai Joint Petroleum Development Area (JPDA).

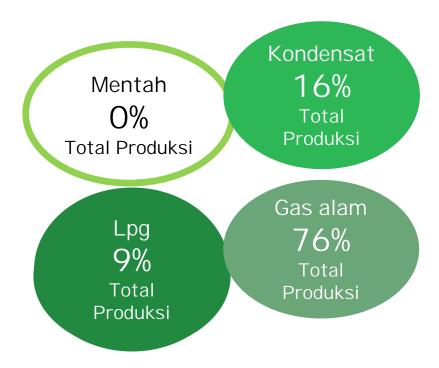
Bayu-Undan memproduksi tiga produk minyak bumi yaitu Kondensat, Liquefied Petroleum Gas dan Natural Gas serta mewakili total produksi sejak lapangan Kitan ditutup pada Desember 2015. Selain itu, di lapangan Bayu-Undan, Gas Bumi berkontribusi lebih dari 76% (61% pada 2017) terhadap total produksi (jumlah uang) negara.

Produksi dalam USD ('000) menurut komoditas:

Komoditas	2018	2017	Δ	%
Mentah	0	0	0	0%
Kondensat	233,730	319,062	- 85,332	- 27%
Gas alam	1,139,586	730,616	408,970	56%
Lpg	118,328	144,897	26,569	- 18%
Total	1,491,644	1,194,575	297,069	11%

Sumber: Template disediakan oleh ANPM dengan data 2018

Persentase produksi berdasarkan komoditas (dalam jumlah uang):



1. Proses Rekonsiliasi

EY dilibatkan untuk melakukan studi pemeriksaan dalam rangka menetapkan ruang lingkup rekonsiliasi EITI yang digunakan untuk laporan EITI Timor-Leste ke-10 dan ke-11 dan untuk menghasilkan draf laporan pengumpulan data. Penugasan ini merupakan langkah awal untuk memulai proses rekonsiliasi.

Prosedur berikut adalah sebagai berikut:

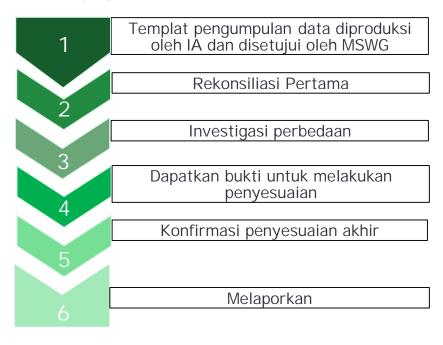
- Tentukan pilihan berdasarkan ambang batas yang disetujui MSWG (pembayaran dan aliran pendapatan di atas USD100.000):
- Memperoleh dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah 2018 informasi tentang pajak, non-pajak dan pembayaran lainnva:
- Perwakilan Kementerian Perminyakan dan Mineral (MPM) mengeluarkan instruksi yang meminta entitas ekstraktif dan badan pemerintah untuk melaporkan sesuai dengan persyaratan EITI. Template pelaporan dibuat tersedia secara elektronik melalui email dan entitas diminta untuk melaporkan langsung ke administrator, EY



Setelah pengumpulan data, EY memulai rekonsiliasi. Entitas yang tidak responsif dilaporkan ke sekretariat TL EITI dan upaya baru untuk menghubungi telah dilakukan untuk mendapatkan informasi. Jika terjadi perbedaan, kontak langsung antara IA dan entitas pelapor dibuat dan dukungan yang memadai diminta (jika berlaku) untuk mendukung penyesuaian.

Jika penjelasan yang diterima tidak konklusif, pertanyaan alamat baru diajukan kepada otoritas pemerintah terkait untuk mendapatkan informasi rinci tentang pembayaran tersebut.

Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan dan otoritas pemerintah, ketidaksesuaian tetap tidak dapat dijelaskan, maka perbedaan tersebut dianggap, dalam laporan EITI, sebagai perbedaan vang tidak dapat direkonsiliasi.



1. Cakupan (Pendapatan dan Entitas)

Entitas Pemerintah yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor adalah sebagai berikut:

Badan Pemerintah Direção Nacional de Receitas Petrolíferas (DNRP) Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) Banco Central de Timor-Leste (BCTL) TIMOR GAP E.P. (SOE)

Berdasarkan informasi yang diterima oleh entitas ini dan ambang batas yang disetujui oleh MSWG, entitas dalam cakupan dipilih.

Aliran pendapatan untuk kontraktor dalam lingkup adalah sebagai

STREAM PENERIMAAN MINYAK & GAS		
PENGHASILAN PAJAK	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Wages of Residents and Non Employees	FTP	
Withholding Tax	Profit Oil & Gas Payments	
VAT	Development Fee	
Installment Income Tax	Contract Service Fee	
Bayu Undan APT Installment	Other Payments (Pipeline)	
Annual Income Tax		
¹ Nama yang berlaku pada tahun 2020:		

Nama Perusahaan Lama	Nama Perusahaan Saat Ini
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	Santos NA (19-12) Pty Ltd
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	Santos NA Timor Sea Pty Ltd
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	Santos NA Emet Pty Ltdop
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	Santos NA Bayu Undan Pty Ltd
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	Santos NA (19-13) Pty Ltd
ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd	Santos NA Timor Leste Pty Ltd

ENTITAS MINYAK & GAS DALAM RUANG LINGKUP

Perusahaan Ekstraktif dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

,	3
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd ¹	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd ¹	Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd ¹	Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd ¹	Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd ¹	Woodside Petroleum Ltd
ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd ¹	Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP
Eni JPDA 03-13 Limited	TIMOR GAP PSC JPDA 11-106
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	Timor Gap EP
Eni JPDA 11-106 B.V.	Timor Gap Seismic Service Lda
Eni Timor - Leste S.p.A.	Timor Gap Offshore Block Unipessoal
Inpex Sahul Ltd	TIMOR RESOURCES PTY LTD
Inpex Timor Sea Ltd	

Lainnya (Biaya pipa) AusAid

Sumber: https://www.santos.com/news/santos-completes-conocophillips-northernaustralia-acquisition/

¹ Pada Mei 2020, Santos Ltd mengakuisisi berbagai perusahaan ConocoPhillips Australia yang memegang aset di Australia Barat dan Utara serta Timor-Leste. Akibat akuisisi ini, nama resmi saat ini berbeda dengan yang berlaku di tahun 2018.

1. Cakupan (Pendapatan dan Entitas)

Seperti laporan tahun sebelumnya, MSWG telah memutuskan untuk memasukkan proses rekonsiliasi dan akibatnya pada tahun 2018 melaporkan pembayaran yang dilakukan oleh Subkontraktor ke aliran pendapatan signifikan yang ditentukan (ambang batas yang sama untuk memilih entitas ekstraktif dalam cakupan - pembayaran dilakukan ke aliran pendapatan signifikan di atas USD100, 000):

ENTITAS MINYAK & GAS DALAM RUANG LINGKUP SUB-KONTRAKTOR				
AMEC Engineering Pty Ltd	Kakivik Asset Management LLC			
CALTECH UNIP	KT Maritime services			
Cameron Services Int. Pty Ltd	Noble International Finance Company			
CAPE AUSTRALIA ONSHORE	MMA Offshore Vessel Operations P/L			
Babcock Offshore Services	Rigforce Pty Ltd			
Clough Amec Pty Ltd	SGS Australia P/L			
Compass Group Australia Pty Ltd	Seafox Asia Pacific Pty Ltd			
Calidus Process Solutions Pty Ltd	Sodexo Timor Unipessoal Ltd			
Haliburton Australia Pty Ltd				

Aliran pendapatan untuk subkontraktor dalam cakupan adalah sebagai berikut:

LINGKUP PENERIMAAN MIGAS PENGHASILAN PAJAK		
Income Tax		
Wages Withholding tax		
Withholding Tax Payments		
Additional taxes		

Berdasarkan seleksi yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa 2018 laporan mencakup 99,87% dari piutang kontraktor dan subkontraktor.

Jumlah total dalam cakupan adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang	Total	Jumlah dalam US'000	
dihasilkan pada 2018	Total	Cakupan	%Cakupan
Total Tax Revenue	249,649	249,645	99.998%
Total Non Tax Revenue reported by ANPM	290,309	290,309	100.00%
Total Pipeline Revenue reported by BCTL	5,944	5,944	100.00%
Total Revenue Contractors	545,903	545,898	99.999%
Total Revenue Sub- contractors	9,682	8,973	92.662%

1. Ringkasan laporan rekonsiliasi: Kontraktor

Lihat di bawah ringkasan rekonsiliasi pembayaran yang dilaporkan:

18 Entitas ekstraktif + 5 BUMN (dalam lingkup) Total
Pendapatan
dalam
Cakupan
USD 545
juta

1 LSM

AUSAID

Saat ini dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia 99,999% dari Pendapatan total



Pendapatan minyak bumi dalam cakupannya

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2018	Cakupan (USD'000)
Total Pendapatan Pajak	249,645
Total pendapatan bukan pajak yang dilaporkan oleh ANPM	290,309
Total pendapatan yang dilaporkan oleh BCTL - Biaya pipa	5,944
Total Pendapatan Kontraktor	545,898



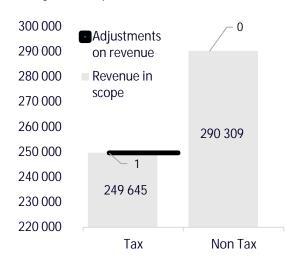
Penyesuaian / Perbedaan

Penyesuaian pemerintah dalam USD'000



Hasil rekonsiliasi akhir

Berdasarkan hasil akhir, kami menyimpulkan bahwa pendapatan yang tidak direkonsiliasi mewakili sekitar 0,02% dari total pendapatan dari kegiatan ekstraktif termasuk penyesuaian.



EITI Timor-Leste - 2018 Report 13

1. Ringkasan laporan rekonsiliasi: Subkontraktor

Lihat di bawah ringkasan rekonsiliasi pembayaran yang dilaporkan:

Total Pendapatan dalam

dalam Cakupan USD 8,9

iuta

Subkontraktor tanpa pelaporan 6

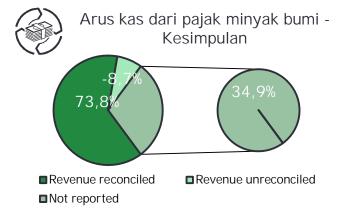
17

Entitas

dalam

cakupan

0,56% dari Pendapatan total





Petroleum revenues in scopePendapatan minyak bumi dalam cakupannya

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2018 Cakupan (USD'000)

Total Pajak Pendapatan

8,973

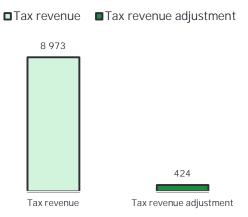


Penyesuaian / Perbedaan

Hasil rekonsiliasi akhir

Berdasarkan hasil akhir, kami menyimpulkan bahwa I perbedaan yang tidak I direkonsiliasi terutama I disebabkan oleh entitas I yang belum menyerahkan I templat yang dilaporkan (3 | juta). Jumlah ini mewakili sekitar 32% dari jumlah I total yang diterima dari Subkontraktor (35% dari iumlah total dalam I cakupan) dan 0,56% dari I total pendapatan.

Penyesuaian pemerintah dalam USD'000



Penyesuaian pajak terutama dibenarkan oleh laporan pembayaran yang salah tahun 2018 oleh entitas dan subkontraktor Pemerintah.

EITI Timor-Leste - 2018 Report | 14



Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif di Timor-Leste

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah kerangka kerja yang mendorong transparansi negara dalam pengungkapan pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam.

Timor-Leste berpegang pada EITI untuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari pendapatan dan pembayaran kepada Pemerintah dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan, baik dari pembayaran pajak dan bukan pajak yang berasal dari produksi dan penjualan sumber daya yang diambil. Rekonsiliasi keuangan, oleh pihak eksternal, dilakukan untuk memverifikasi angka-angka dan hasil rekonsiliasi dipublikasikan dalam laporan EITI tahunan. Warga negara dan organisasi masyarakat sipil juga diharapkan berperan dalam memantau proses EITI.

Kantor Sekretariat TL-EITI dibentuk pada Juli 2008, di bawah Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral dan Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG). MSWG mencakup perwakilan dari pemerintah, asosiasi perusahaan industri ekstraktif, dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Timor-Leste





2.1. EITI dan Timor-Leste

Timor Leste bergabung dengan EITI pada tahun 2008 dan saat ini mengalami kemajuan yang memuaskan, dengan tingkat kemajuan yang dimulai tanpa kemajuan, tidak memadai, bermakna, memuaskan, dan seterusnya. Pada tahun 2010, Timor-Leste menjadi negara patuh EITI pertama di Asia Tenggara.

Namun, negara tersebut belum menyetujui dan menerbitkan UU EITI. Rancangan undang-undang telah disiapkan tetapi, karena reformasi yang sedang berlangsung, konsultasi yang lebih luas belum diselesaikan.

Kerangka EITI membutuhkan administrator independen (IA) untuk merekonsiliasi data keuangan antara pembayaran perusahaan dan pendapatan aktual yang telah diterima Pemerintah. EY ditunjuk untuk menetapkan ruang lingkup dan menyiapkan rekonsiliasi Laporan EITI ke-9, ke-10, dan ke-11 yang mencakup masing-masing tahun 2016, 2017 dan 2018.

Laporan EITI ke-10 diterbitkan pada November 2019.

Mengenai tanggung jawab atas pengelolaan EITI, kantor Sekretariat TL-EITI didirikan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mendukung Multi Stakeholder Working Group (MSWG) dengan mengelola kontak dengan entitas dalam ruang lingkup dan membuat laporan akhir tersedia. Selain itu, Sekretariat bertanggung jawab untuk mempromosikan EITI di sektor publik dan swasta, mengatur pertemuan dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya EITI bagi Timor Leste. Selain itu, Sekretariat telah membuat Laporan Kemajuan Tahunan sejak tahun 2011 untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi kemajuan pemenuhan persyaratan Standar EITI dan mengikuti rekomendasi IA (Administrator Independen).

Sumber: http://www.eiti.tl/secretariat/reports/progress-reports

Laporan EITI tahunan sebelumnya mencakup periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2017:

Tahun	Publikasi Tanggal	Minyak Pendapatan (USD Juta)	Independen Auditor
2008	Oktober 2009	2,510	Deloitte
2009	Februari 2011	1,764	Delonte
2010	November 2012	2,150	
2011	Desember 2012	3,453	Moore
2012	Februari 2015	3,800	Stephens LLP
2013	2015 Desember	3,263	
2014	Juni 2017	1,896	
2015	Desember 2017	1,042	FY
2016	Juni 2019	243	_1
2017	November 2019	463	

Sumber: Petroleum Fund Annual Report 2017



Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada 2018 -Minyak & Gas

Pendapatan minyak dan gas terus memainkan sumber pendapatan penting bagi Timor-Leste. Petroleum Wealth Fund dan hasil investasinya telah digunakan sebagai bahan bakar anggaran nasional untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Meskipun Timor-Leste sedang mengalami peningkatan ekonomi yang nyata, Timor-Leste tetap menjadi negara yang sangat bergantung pada minyak. Selama tujuh tahun terakhir, Timor-Leste telah mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, sebagian besar didasarkan pada pengeluaran publik dan aktivitas sektor swasta yang didorong oleh pendapatan minyak & gas.

Timor-Leste





3.1. Tinjauan Pendapatan Pemerintah

Total pendapatan pemerintah telah menurun, karena produksi dari ladang yang ada hampir berakhir.

Oleh karena itu, tren penurunan pendapatan minyak bumi secara bertahap diperkirakan akan terus berlanjut.

Terkait penerimaan dalam negeri (penerimaan non Migas), terjadi penurunan dari tahun 2016 ke 2017, terutama didorong oleh penerimaan pajak yang lebih rendah, yang rentan terhadap fluktuasi PDB dan merupakan sebagian besar dari penerimaan dalam negeri.

Tren tersebut diproyeksikan akan stabil pada tahun 2018, (APBN 2018). Penerimaan nonmigas domestik akan menjadi sekitar 190 iuta seperti pada tahun 2017. Meskipun demikian, penerimaan dalam negeri sekarang diharapkan tumbuh positif pada tahun 2019 dan 2020 (APBN 2020), didorong oleh aktivitas sektor swasta yang lebih besar, stabilitas politik dan kelanjutan dari proyek modal pemerintah. Tren positif diperkirakan akan berlanjut hingga 2024, sesuai ekspektasi pertumbuhan ekonomi makro.

Pendapatan Domestik

Pendapatan domestik di Timor-Leste sebagian besar terdiri dari pendapatan pajak (USD 130 juta) dan biaya dan retribusi (USD 50 juta). Untuk pendapatan Minyak & Gas silakan lihat bagian 3.4.

- State Budget 2018 in Timor Leste
- State Budget 2019 in Timor Leste
- State Budget 2020 in Timor Leste

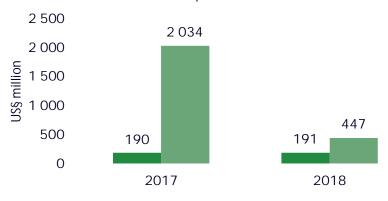
Perekonomian Timor-Leste masih sangat bergantung pada minyak dan gas

Pendapatan minyak bumi biasanya membiayai sebagian besar anggaran negara. Minyak dan gas menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan negara Timor-Leste pada tahun 2016 dan 2017

Namun, pendapatan minyak bumi diperkirakan akan menurun karena produksi dari ladang yang ada hampir berakhir, seperti yang disebutkan sebelumnya (Anggaran Negara 2019).

Lebih lanjut, Pendapatan Dana Minyak sebagian besar didominasi oleh Pendapatan Investasi Dana Minyak, yang berjumlah 1.612 juta (pada 2017). Pada tahun 2018, Pendapatan Dana Minyak didominasi oleh Pendapatan Minyak Total, yang berjumlah 447 juta (menjadi Pendapatan Investasi Dana Minyak negatif sekitar 460 juta).

Evolusi Pendapatan Pemerintah



■ Non Pendapatan Minyak & Gas
■ Pendapatan Minyak & Gas2

3.2. Produk domestik bruto (GDP) – Timor-Leste

Industri Ekstraktif: GDP

Perubahan Kompilasi Oli

Kekayaan minyak mendanai sebagian besar rekonstruksi Timor-Leste setelah perjuangannya untuk kemerdekaan dari Indonesia, dengan penerimaan minyak bumi bertanggung jawab atas persentase signifikan dari pendapatan pemerintah hingga 2017.

Pada tahun 2018 terjadi perubahan kompilasi oli. Sebelum tahun ini, JPDA dianggap sebagai entitas residen dalam National Accounts Reports, namun dianggap sebagai entitas non-residen dalam dataset lain, karena "Bea Cukai tidak mencatat Ekspor Minyak dalam Data Perdagangan, Kemenkeu tidak memasukkan minyak ke dalam statistik keuangan pemerintahnya, dan Bank Sentral memasukkan royalti dari minyak ke dalam Saldo Pembayaran."

Untuk menghindari inkonsistensi, National Accounts tahun 2018 sudah mempertimbangkan bahwa WBPMT adalah entitas non-residen yang menyiratkan bahwa PDB Minyak tidak akan dilaporkan dan PDB Non-Minyak menjadi PDB, termasuk Royalti. GNI (Pendapatan Nasional Bruto) tidak berubah.

Sumber: National Accounts 2018

Selain itu, karena Perjanjian Batas Maritim baru yang ditandatangani pada Agustus 2019 (lihat bagian 3), JPDA dianggap sebagai entitas penduduk dan oleh karena itu mulai September 2019 sektor minyak akan dimasukkan dalam kompilasi data.

GDP

Produk Domestik Bruto turun 2,6% pada tahun 2018, pada harga saat ini, yaitu sebesar USD 1.568,6 juta pada tahun 2018 dan USD 1.609,7 juta pada tahun 2017.



Penurunan PDB pada tahun 2018 disebabkan oleh turunnya belanja Mitra Binaan sebesar 7,4% dan Penurunan Investasi Swasta sebesar 4,6%. Meskipun demikian, Belanja Negara meningkat 7,1%, Ekspor meningkat 8,4% dan Impor meningkat 2,3%.

GNI

Pendapatan Nasional Bruto turun 1,5%, pada harga saat ini, dari USD 2.282,4 juta pada tahun 2017 menjadi USD 2.248,6 juta.

Pada tahun 2018, PNB terdiri dari Pendapatan Properti sebesar USD 718,5 juta, termasuk Royalti dan Pajak UDS 501,1 juta dari kegiatan Minyak dan Gas.

Harap dicatat bahwa pada tahun 2018 GNI adalah penjumlahan dari PDB, royalti dan pendapatan utama non-minyak.

Sumber: National Accounts 2018

3.2. Produk domestik bruto (GDP) – Timoreste

Timor-Leste adalah ekonomi ekspor terbesar ke-193 di dunia (2018).

Sumber: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tls/

Perubahan Kompilasi Oli

Pada tahun 2018, Timor-Leste mengekspor USD 43 juta dan mengimpor lebih dari USD 945 juta, mengakibatkan neraca perdagangan negatif.

Sekali lagi, perlu diketahui bahwa ekspor dan impor juga dipengaruhi oleh perubahan Kompilasi Minyak. Konsekuensinya, sebagaimana ekspor hingga tahun 2017 didominasi oleh sektor minyak (lebih dari 95%), implikasinya adalah nilai ekspor menurun drastis sepanjang tahun.

Namun, sektor minyak selalu mewakili persentase impor yang lebih rendah (19% pada 2017), yang berarti bahwa impor tidak terlalu terpengaruh dibandingkan ekspor.

Oleh karena itu, menurut TL National Accounts 2018, neraca perdagangan selalu negatif dari 2000-2018, menurut Kompilasi Minvak vang baru.

Periksa lampiran K untuk memverifikasi nilai impor dan ekspor dalam Laporan Akun Nasional Timor-Leste 2017 dan Laporan Akun Nasional Timor-Leste 2018.

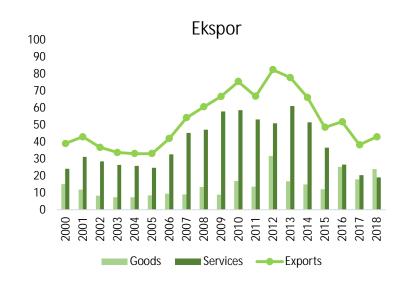
Ekspor

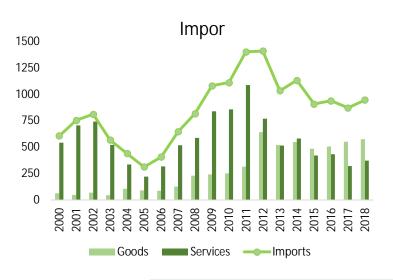
Pada tahun 2018 ekspor meningkat 8,4% dari USD 38,2 juta menjadi USD 43 juta, yang meliputi peningkatan ekspor barang sebesar 41,3% dan penurunan ekspor jasa sebesar 8,8%.

Impor

Pada tahun 2018, impor meningkat 2,3% dari USD 871,2 juta menjadi USD 945,3 juta, termasuk peningkatan impor jasa sebesar 10,6% dan penurunan impor barang sebesar 3,2%.

Sumber: TL National Accounts 2018





3.3. Produksi

Fields

Pada 2018 dan 2017, seluruh gas Timor-Leste diproduksi di lapangan gas Bayu-Undan yang terletak di lepas pantai Joint Petroleum Development Area (JPDA). Pendapatan pemerintah diterima dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk barang, dengan 10 persen bagian masuk ke Australia di bawah Perjanjian Laut Timor.

Pada tahun 2018, terdapat sepuluh PSC aktif (4 di TLEA dan 6 di JPDA).

Sumber: ANPM Annual Report 2018

Bayu-Undan

Ladang gas Bayu-Undan terletak di Laut Timor, sekitar 250km selatan Timor-Leste dan sekitar 500km lepas pantai Darwin, Australia yang berada dalam wilayah kontrak PSC03-12 dan PSC03-13 dari JPDA. Bayu-Undan adalah lapangan gas Timor-Leste dengan pendapatan akumulasi terbesar, dan satu-satunya yang berproduksi setelah 2017. Lapangan ini terletak di struktur 160km2 yang sama, di perairan 80m. Penemuan awal terjadi pada awal 1995, ketika sumur Bayu-1 memotong kolom kondensat gas 155m, pada kedalaman 897m. Pada Juli 1995, Undan ditemukan 10 km barat laut Bayu, di mana kolom hidrokarbon bruto 139m menguji 1,6 juta kaki kubik gas per hari dan 3.900bbl kondensat per hari. Total ladang cadangan yang dapat dipulihkan berkisar antara 350 dan 400 juta barel cairan hidrokarbon dan 3,4 tcf gas.

Pada tahun 2015, pemboran pengembangan tahap ketiga menambah satu sumur produksi bawah laut untuk menjaga produksi cairan dan gas.

Sumber: http://www.offshore-technology.com/projects/bayu-undan/

Fasilitas lapangan termasuk Central Production and Processing Complex (DPP dan CUQ), FSO, WP1, pipa bawah laut di lapangan dan pipa ekspor gas ke Darwin. Pada 2017, lapangan tersebut memiliki 10 sumur produksi, dan 3 sumur injeksi gas.

Produksi cairan rata-rata harian (kondensat dan LPG) dan Produksi Gas di:

Pada tahun 2017 sebesar 25,44 kbpd dan gas yang diekspor ke Darwin LNG tetap stabil pada rata-rata 510 MMscf / hari.

Tahun 2018 menjadi 17 kbpd hingga November lalu meningkat menjadi 30 kbpd. Gas yang diekspor ke Darwin LNG tetap stabil pada rata-rata 700 MMscf / hari.

Sumber: http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekDataGasListHTML & http://web01.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/vwAll/Resource-2018%20Annual%20Report/\$File/Annual-Report-2018.pdf?openelement

Pada tahun 2018, penurunan kondensat dan elpiji disebabkan oleh gangguan produksi yang meliputi penutupan besar-besaran lapangan Bayu Undan untuk pemeliharaan terencana dan intervensi sumur pada bulan Mei hingga awal Juni dan penutupan pabrik untuk pemindahan rig pengeboran Infill Well.

Bayu-Undan dioperasikan oleh ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd di bawah kontrak PSC 03-12 dan PSC 03-13 di JPDA berdasarkan Perjanjian Laut Timor.

(Referensi sekarang adalah tentang pengaturan JPDA / Timor Sea Treaty yang digantikan). Lihat Lampiran F untuk detail lebih lanjut tentang struktur JV. Sumber: ANPM Annual Report 2018

Kitan

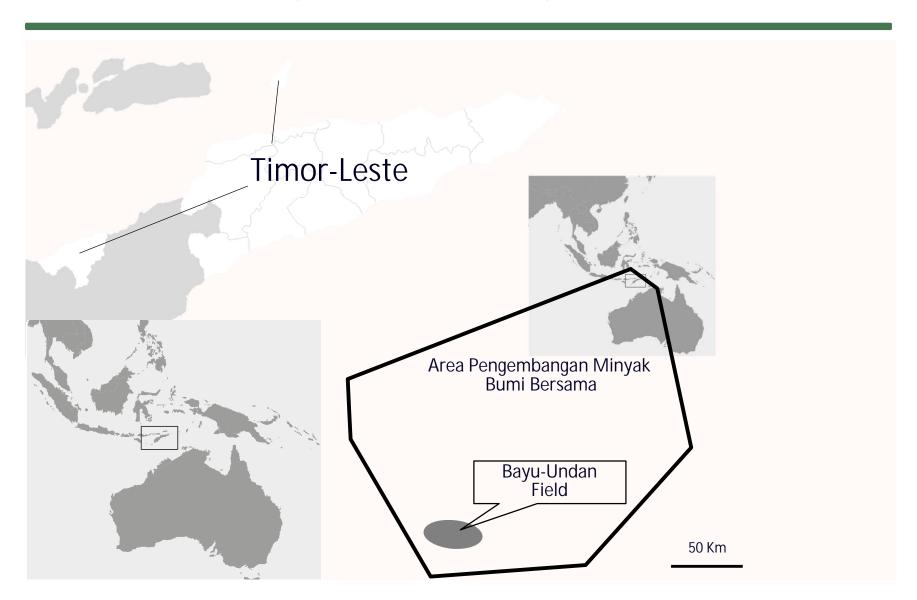
Lapangan Kitan ditutup pada tanggal 16 Desember 2015 dan terletak di izin 06-105 JPDA, 170 km lepas pantai Timor-Leste dan 500km dari pantai Australia.

Sumber: ANPM Annual Report 2018

Glas Dowr FPSO meninggalkan lapangan pada Februari 2016. Tidak ada produksi sejak 2016

Sumber: ANPM Annual Report 2018

3.3. Produksi (Area di 2018)

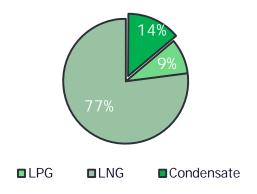


3.3. Produksi

Produksi BOE

Bayu-Undan memproduksi tiga produk minyak bumi yaitu Kondensat, Liquefied Petroleum Gas dan Natural Gas dengan menipisnya produksi cairan sejak puncaknya pada tahun 2012.

Produksi minyak dan gas mengalami penurunan dari 41 juta barel setara minyak pada 2017 menjadi 38 juta barel setara minyak pada 2018 (lihat grafik Data Produksi).



Komoditas (BOE Ribu)	Produksi	Penjualan
Mentah	-	-
Gas Kondensat	3,577	3,577
Gas Alam	31,670	31,670
LPG	2,511	2,511
Total	37,758	37,758

Sumber: http://web01.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekDataGasListHTML & Template of the IA received by ANPM

Produksi minyak di Timor-Leste mengalami penurunan sejak tahun 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penipisan alami lapangan BU. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, proyek Kitan telah ditutup pada Desember 2015.

Informasi terkait produksi total tersedia di situs ANPM (Database Lafaek) yang berisi informasi terkait produksi lapangan Bayu-Undan dan Kitan, kontrak, dll. Informasi ini umumnya dapat diakses oleh publik.

Total Produksi BOE Setara

80 000 000 70 000 000	
60 000 000	
50 000 000	
40 000 000	
30 000 000	
20 000 000	
10 000 000	
0	
rS	

Komoditas (BOE Ribu)	2018	2017	Δ	%
Mentah	-	-	-	-
Gas Kondensat	3,577	5,605	- 2,028	- 36%
Gas Alam	31,670	31,204	466	1.5%
LPG	2,511	3,691	- 1,180	- 32%
Total	37,758	40,500	- 2,742	

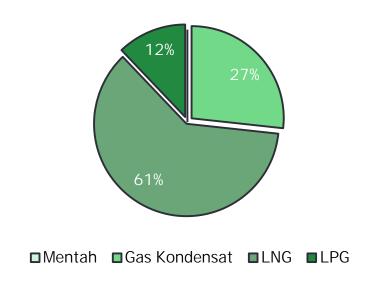
Sumber: http://web01.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekFieldList & template Provided by ANPM

3.3. Produksi

Producksi USD

Gas alam juga merupakan komoditas yang paling signifikan jika dibandingkan dalam jumlah moneter (Jutaan USD):

Produksi 2018



Produksi dan penjualan dalam USD ('000) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Komoditas (BOE Ribu)	Produksi	Penjualan
Mentah	-	-
Gas Kondensat	233,730	233,730
Gas Alam	1,139,586	1,139,586
LPG	118,328	118,328
Total	1,491,644	1,491,644

Produksi dalam USD ('000) pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Komoditas (BOE Ribu)	2018	2017	Δ	%
Mentah	-	-	-	-
Gas Kondensat	233,730	319,062	- 85,332	- 27%
Gas Alam	1,139,586	730,616	408,970	56%
LPG	118,328	144,897	26,569	- 18%
Total	1,491,644	1,194,575	297,069	11%

3.4. Pendapatan Migas dari Sektor Ekstraktif

Akibat kenaikan harga minyak (meski dengan penurunan produksi) pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Migas pada tahun 2018, termasuk yang diterima dari subkontraktor, sebesar USD556 juta. Nilai tersebut merupakan peningkatan sebesar USD93 juta atau 20% dibandingkan tahun 2017.

Variasi ini mempengaruhi pembayaran yang diterima oleh DNRP (bersih dari penyelesaian pajak). Struktur pendapatan sektor ekstraktif serupa dengan tahun 2017, dengan peningkatan DNRP (44%) dan ANPM (5%) dan penurunan BCTL (-7%).

Pendapatan Minyak dan Gas 2009-2018 (USD million)



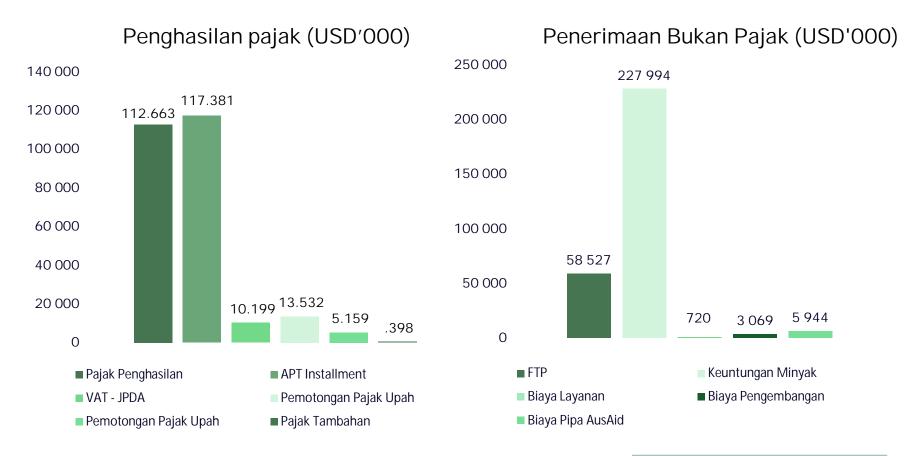
				jumlah dalam USD juta			
Pendapa tan	2018	%	2017	%	Variasi	%	
DNRP	260	47%	181	39%	79	44%	
ANPM	290	52%	276	60%	15	5%	
BCTL	6	1%	6	1%	0.47	-7%	
Total	556	100%	463	100%	93	20%	

Pendapatan sektor				
ekstraktif (USD iuta)	2018	2017	Δ	% Δ
(USD juta)				
Direção Nacional de Receitas Petrolíferas (DNRP)	250	173	77	44%
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	290	276	15	5%
Banco Central de Timor- Leste (BCTL)	6	6	0	-7%
Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif Minyak & Gas	546	455	91	20%
Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan terkait Minyak & Gas (Sub Kontraktor)	10	8	2	26%
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Migas	556	463	93	20%
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Pertambangan	2	1	1	61%
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Ekstraktif	558	464	94	20%
Bagian dari pendapatan yang dialokasikan ke Australia	-30	-29	2	6%
Bagian dari pendapatan yang dialokasikan ke Timor- Leste	528	435	92	21%

3.4. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif

Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak

Bagan di bawah ini menggambarkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan Pajak tahun 2018 yang paling signifikan adalah APT, diikuti oleh pajak penghasilan. Penerimaan bukan pajak sebagai Laba migas telah menjadi sumber utama penyumbang aliran penerimaan Dana Perminyakan. FTP (First Tranche Petroleum) dan biaya yang dikumpulkan dari layanan kontrak dan biaya pengembangan adalah sumber pendapatan lain untuk dana perminyakan sebagaimana diuraikan pada gambar di bawah ini.



3.4. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif

Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak

Sejak 2012, pendapatan yang diterima Timor-Leste kemudian menurun. Penerimaan tahun 2018 dilaporkan sebagai salah satu pendapatan minyak dan gas terendah yang disajikan dalam laporan EITI Timor Leste.

Lihat di bawah struktur pendapatan sektor ekstraktif minyak bumi::

Pendapatan Sektor Ekstraktif Minyak Bumi (% menurut Arus Pendapatan)



Sektor Pertambangan

Pada tahun 2018, pendapatan merupakan yang tertinggi sejak tahun 2006, terhitung sebesar 1.668.804,28 USD. Untuk rekonsiliasi sektor pertambangan, kami telah menghubungi ANPM untuk pembayaran rinci berdasarkan biaya dan entitas (lihat Lampiran D). Kami memverifikasi bahwa hanya sedikit perusahaan yang melaporkan pembayaran di atas 100.000 USD, namun aktivitas perusahaan ini mengacu pada pembangunan jalan daripada penambangan. Menurut Ijazah Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November, kegiatan tersebut diatur sebagai pertambangan, itulah sebabnya ANPM melaporkannya di sektor pertambangan. Selanjutnya dengan alasan tersebut, entitas tersebut tidak akan diedarkan dan akan masuk dalam ruang lingkup penambangan. Lihat bab 8.5 untuk rincian lebih lanjut tentang sektor pertambangan.



Sumber: http://www.anpm.tl/mineral/fees-collected-from-mineral-operator/

3.5. Pekerjaan yang dihasilkan dari Sektor Minyak & Gas

Tidak ada data yang dihasilkan oleh pemerintah mengenai lapangan kerja di industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari total lapangan kerja.

Namun, sebagai prosedur pendataan, kami telah meminta kepada perusahaan ekstraktif dan subkontraktor di lingkupnya untuk menanggapi jumlah karyawan yang mereka miliki pada tahun 2018 terkait dengan kegiatan Timor dan tanggapannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan Ekstraktif dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor & SOE

Company Name		Nasional		Ekspatriat
company Nume	Pria	Perempuan	Pria	Perempuan
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	-	-	142 Tida	ak ada perincian berdasarkan jenis kelamin
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	-	-	-	-
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	-	-	-	-
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	-	-	-	-
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	-	-	-	-
ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd	30Tidak ada	a perincian berdasarkan jenis kelamin	2 Tida	ak ada perincian berdasarkan jenis kelamin
Eni JPDA 03-13 Limited	-	-	-	-
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	1	2	-	-
Eni JPDA 11-106 B.V.	-	-	-	-
Eni Timor - Leste S.p.A.	-	-	-	-
Inpex Sahul Ltd	-	-	-	-
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	-	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	-	-	-	-
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP*	-	-	-	-
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106*	-	-	-	-
Timor Gap EP*	-	-	-	-
Timor Gap Seismic Service Lda*	-	-	-	-
Timor Gap Offshore Block Unipessoal*	-	-	-	-
TIMOR RESOURCES PTY LTD	205	39	3	1
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	-	-	-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	1	-	-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	-	-	-	
Woodside Petroleum Ltd		-	-	
TOTAL	237	41	147	1

Tidak ada tanggapan dari entitas yang mengatur informasi pekerjaan.

3.5. Pekerjaan yang dihasilkan dari Sektor Minyak & Gas

Subkontraktor

Nama Perusahaan			Nasional		Ekspatriat
	Pr	ia	Perempuan	Pria	Perempuan
AMECEngineeringPtyLtd		-			-
Babcock Offshore Services		16	3	44	0
Calidus Process Solutions PTy Ltd*		-			_
Caltech Unipessoal Lda		112	46	2	1
CameronServicesInt.PtyLtd		-		-	_
Cape Australia Onshore*		-		-	-
Clough Amec Pty Ltd		-		68	20
Compass Group Australia Pty Ltd		-		-	_
Haliburton Aust Pty Ltd*		-		-	_
Kakivik Asset Management LLC		-		-	-
KT Maritime services		-		-	_
MMA Offshore Vessel Operations P/L		-		-	_
Noble International Finance Company		-		-	_
Rigforce Pty Ltd		20		-	-
Seafox Asia Pacific Pty Ltd		-		10	_
SGS Australia P/L*		-		-	-
Sodexo Timor Unipessoal Ltd*		-			-
	TOTAL	148	49	124	21

Harap dicatat bahwa informasi ini adalah hasil dari prosedur pengumpulan sepihak karena kurangnya informasi Pemerintah untuk menguatkan jumlah yang dilaporkan.

Kami merekomendasikan agar pemerintah mulai menangkap informasi ini dan mempublikasikannya di situs web pemerintah / statistik atau halaman resmi dan membuat analisis tentang sektor ekstraktif dibandingkan dengan sektor Non ekstraktif.

^{*}Tidak ada tanggapan dari entitas ini terkait informasi ketenagakerjaan... Catatan: Entitas berwarna hijau muda tidak memberikan jawaban apa pun.



Kerangka Regulasi Industri ekstraktif tahun 2018

Timor-Leste secara resmi memulihkan kedaulatannya pada tanggal 20 Mei 2002. Setelah referendum yang diadakan pada tahun 1999, pemerintahan Timor-Leste telah didelegasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET). Selama masa transisi, UNTAET mewakili pemerintah Timor-Leste dalam negosiasi ulang pembagian sumber daya minyak di Joint Petroleum Development Area (JPDA).

Hingga tahun 2019, Timor-Leste dan Australia tidak memiliki batas laut final di Laut Timor. Sebelumnya, kedua pemerintah menerapkan seperangkat pengaturan sementara yang kompleks untuk pembagian minyak bumi yang diambil dari dua zona pembangunan bersama yang tumpang tindih di Laut Timor: (1) Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) di bawah Perjanjian Laut Timor (TST) dan (2) Kerangka Hukum Wilayah Eksklusif Timor-Leste (TLEA) di bawah Undang-Undang Kegiatan Perminyakan (UU No. 13/2005). Kedua wilayah tersebut diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang ditandatangani antara perusahaan ekstraktif dan Pemerintah.

Pada tahun 2003, Timor-Leste dan Australia membentuk Perjanjian Laut Timor (TST) yang memberikan kerangka kerja untuk semua eksplorasi dan pengembangan minyak bumi di JPDA. TST (pasal 4) dengan ketentuan bahwa pendapatan perpajakan hulu dari produksi minyak di JPDA dibagi antara Timor-Leste dan Australia dengan dasar 90/10.

Pada tahun 2019, Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus dibuat untuk melaksanakan Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste, yang mendefinisikan para penumpang platform kontinental antara Australia dan Timor Leste. Saat ini, (1) Great Sunrise diatur oleh Resolusi ini dan diatur oleh ANPM. JPDA (2) sekarang diatur oleh tiga entitas: ANPM, DIIS dan NOPSEMA.

Namun demikian, perubahan Agustus 2019 tidak berlaku untuk laporan ini, hanya berlaku mulai 2019 dan seterusnya.

Timor-Leste



4. Hukum / Regulasi Baru pada 2019

Undang-Undang / Keputusan Baru sejak publikasi Laporan EITI 2016

- 1. Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste
- 2. UU no. 4/2019 tanggal 27 Agustus tentang Tenaga Kerja dan rezim khusus migrasi yang berlaku untuk proyek Bayu-Undan
- 3. UU No.5 / 2019 tanggal 27 Agustus Perubahan Pertama UU No. 8/2008, 30 Juni 2008, Menyetujui Undang-Undang Pajak dan Pabean, Perubahan Pertama UU No. 3/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pajak Kontraktor Bayu-Undan dan Perubahan Pertama UU No. 4/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang Pengembangan Minyak Laut Timor (Stabilitas Pajak)
- 4. Resolusi Pemerintah No.22 / 2019 tanggal 27 Agustus tentang persetujuan perjanjian dalam bentuk yang disederhanakan untuk pertukaran informasi perpajakan sehubungan dengan Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste
- Resolusi Pemerintah No.23 / 2019 tanggal 27 Agustus tentang persetujuan Nota Kesepahaman antara Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais dari Timor-Leste, Departemen Industri, Inovasi dan Sains Persemakmuran Australia, dan Keselamatan dan Lingkungan Perminyakan Lepas Pantai Nasional Australia. Otoritas Manajemen atas kerjasama antara otoritas pengatur terkait dengan Lapangan Gas Bayu-Undan dan Pipa dalam rangka implementasi Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
- 6. Keputusan hukum no. 24/2019 tanggal 27 Agustus tentang transisi kepemilikan minyak bumi dan regulasi kegiatan perminyakan di lapangan Bayu-Undan
- 7. Keputusan-Undang-Undang No.25 / 2019 tanggal 27 Agustus tentang Transisi Judul Minyak dan Peraturan Kegiatan Minyak dari Area Pengembangan Minyak Bersama
- 8. Keputusan-Undang-Undang No. 26/2017 tanggal 27 Agustus tentang Peralihan Judul Minyak dan Peraturan Kegiatan Minyak di Lapangan
- 9. SK UU No.27 / 2019 tanggal 27 Agustus Perubahan 2 SK UU No 20/2008 tanggal 19 Juni tentang pembentukan ANPM
- 10. UU No.1 / 2019 tanggal 18 Januari Perubahan Pertama UU No. 13/2005, tanggal 2 September, tentang Kegiatan Perminyakan

Silakan periksa bagian 4.4 untuk ringkasan perubahan baru dalam hukum utama. Sekali lagi, kami mencatat bahwa undang-undang dari 27 Agustus tidak berlaku untuk laporan ini. Bab lain dalam 4 menunjukkan hukum yang berlaku untuk laporan ini.

Sumber: http://www.anpm.tl/tlea/ & http://www.anpm.tl/jpda2/

4.1. Timor-Leste Kerangka Hukum Area Eksklusif (TLEA)

TLEA mengacu pada Wilayah Timor-Leste sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perminyakan (UU No. 13/2005) Republik Demokratik Timor-Leste. Undang-undang ini berlaku untuk operasi perminyakan di laut teritorial, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya di mana, menurut Hukum Internasional, Timor-Leste memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi sumber daya. Kerangka hukum yang relevan untuk operasi perminyakan yang termasuk dalam mandat Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) dan kontrak perminyakan yang ada adalah sebagai berikut:

Legislasi

Hukum Kegiatan Perminyakan (Law No.13/2005)

- National Petroleum Authority (ANP) (Decree Law No.20/2008) - First Amendment by Decree-Law No.1/2016 of 9th February
- Public Tendering in Respect of Petroleum Contracts Award (Decree Law No.7/2005)
- Decree-Law on Offshore Petroleum Operations in Timor-Leste (Decree Law No. 32/2016)

Kontrak Bagi Hasil (PSC):

- TLEA PSC S-06-04 (Contract Area E)
- TLEA PSC TL-SO-15-01
- (informasi lebih lanjut tentang PSC ada di Lampiran F)

Source: http://www.anpm.tl/tlea/

Petroleum Activities Law (Law N°13/2005)

Sesuai dengan hukum internasional, Timor-Leste memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alamnya, termasuk sumber daya Minyak. Timor-Leste berhak atas semua sumber daya Minyak yang ada di bawah tanah wilayahnya, baik di darat maupun di lepas pantai. Tujuan dari Undang-undang tentang Kegiatan Perminyakan (Undang-undang) adalah untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi Timor-Leste dan rakyatnya dengan membentuk rezim pengaturan yang akan memungkinkan perusahaan perminyakan untuk mengembangkan sumber daya minyak tersebut.

Undang-undang memberdayakan Kementerian untuk memberi wewenang kepada perusahaan minyak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya Minyak. Rejim perminyakan lainnya telah dipertimbangkan untuk membentuk suatu regim yang berdaya saing internasional dan membantu menarik investasi dalam pengembangan kegiatan perminyakan. Sumberdaya Minyak Bumi yang dimiliki Timor-Leste merupakan komponen strategis ekonominya, memiliki nilai potensial yang tinggi dan diharapkan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara.

Selain bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan minyak Timor-Leste, Undang-undang tersebut juga mengharapkan bantuan dalam mencapai tujuan pembangunan negara yang luas. Pendapatan minyak dan pengembangan sumber daya ini, akan memungkinkan Timor-Leste untuk secara lebih efektif menangani kebutuhan dan prioritas pembangunan, lebih memperkuat sumber daya manusianya, mengkonsolidasikan kemajuan yang telah dibuat sejauh ini, mempercepat dan menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan stabilitas dan transparansi dalam mengatur pengembangan sumber daya Minyak.

Amandemen pertama (Keputusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019) untuk memastikan bahwa Partisipasi Negara dapat lebih dari batas maksimum yang ditentukan dalam Pasal 22 undang-undang (hingga 20%), memberikan tambahan partisipasi perolehan bunga (setelah 20%) sedang dinegosiasikan secara komersial dari perusahaan Negara dan mitra bisnisnya.

4.1. Timor-Leste Kerangka Hukum Area Eksklusif (TLEA)

Pasal 13 Undang-Undang Kegiatan Perminyakan: Undangan untuk Melamar

- 1. (a) Kementerian akan mengundang, dengan pemberitahuan puik, aplikasi untuk Otorisasi.
- (b). Terlepas dari paragraf 13.1 (a) di atas, Kementerian dapat memilih untuk memberikan Otorisasi melalui negosiasi langsung tanpa mengeluarkan undangan tersebut:
- (i) dalam kasus Otorisasi Akses; atau
- (ii) dalam kasus semua jenis Otorisasi di mana hal itu merupakan kepentingan publik untuk melakukannya;
- (c) Jika Kementerian memberikan Otorisasi tanpa mengundang aplikasi sebagaimana diatur dalam paragraf 13.1 (b) di atas, Kementerian harus memberikan alasan yang kuat untuk melakukannya.

Pelelangan Umum sehubungan dengan Penghargaan Kontrak Minyak (Keputusan Hukum No.7/2005)

Hukum No. 13/2005tanggal 2 September (Undang-undang tentang Kegiatan Perminyakan) menetapkan bahwa pemberian otorisasi, termasuk pemberian kontrak minyak bumi, didahului dengan tender publik. Undang-undang ini telah menetapkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi Timor-Leste dan penduduknya, dengan menetapkan rezim pengaturan bagi perusahaan minyak. Keputusan UU 7/2005 menetapkan persyaratan tentang bagaimana Kementerian akan melanjutkan untuk mengesahkan kegiatan perminyakan, menyatakan partisipasi Negara dalam kegiatan perminyakan dan juga bagaimana mereka dikembangkan. Transparansi dan Informasi publik sama-sama diperhatikan, di mana informasi yang menyesatkan akan dikenakan sanksi karena juga diumumkan.

Perusahaan dan / atau grup perusahaan, akan dipilih berdasarkan penawaran yang diajukan, dan pemberitahuan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral, Kebijakan Mineral dan Energi mengenai tender publik yang relevan. Menteri yang dimaksud akan bertanggung jawab atas seluruh proses penawaran dan juga menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi calon.

Hukum No. 07/2005 Undang-undang tentang tata cara umum penyelenggaraan tender publik

Pasal 7 (Isi) Pelelangan umum harus mengikuti hal-hal yang dijelaskan dalam pasal 7

Pasal 8 (Assessment Committee): Pelelangan umum harus mengikuti hal-hal yang dijelaskan dalam pasal 7

Pasal 9 (Penilaian Penawaran): Penilaian tersebut harus tidak memihak, menjamin kepentingan terbaik Negara

Pasal 10, 11, 12 and 13: Setelah selesai, hasil harus dilaporkan, disetujui dan diberitahukan. Situasi klaim harus mengikuti prosedur

- Formulir yang diperlukan dan dokumen pelengkap
- Area kontrak
- Program kerja eksplorasi yang telah ditentukan
- Persyaratan partisipasi Negara
- Dokumentasi untuk masuk ke pelelangan umum
- Kriteria dalam menilai penawar
- Kriteria untuk memutuskan tawaran
- Perkiraan jangka waktu penyelesaian seluruh proses
- Penetapan biaya yang berlaku
- Bukti komitmen untuk mendirikan grup perusahaan
- Penyerahan dokumen yang diperlukan
- Bukti kemampuan teknis, kemampuan finansial, salinan undang-undang dan pendirian perusahaan; Pembentukan perwakilan hukum

4.2. Kerangka Hukum Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA)

Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia ditandatangani pada tahun 2002. Perjanjian tersebut menetapkan Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) di Laut Timor, memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak di JPDA untuk manfaat bagi rakyat Timor-Leste dan Australia.

Legislasi yang diterapkan untuk operasi JPDA adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

- Timor Sea Treaty (TST)
- Interim Petroleum Mining Code
- Petroleum Mining Code
- Interim Regulations issued under Article 37 of the Interim Petroleum Mining Code
- Interim Directions issued under Article 37 of the Interim Petroleum Mining Code
- Interim Administrative Guidelines for the Joint Petroleum **Development Area**
- Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
- Greater Sunrise Memorandum of Understanding
- Greater Sunrise International Unitization Agreement (IUA)

Kontrak Bagi Hasil (PSC):

Kontrak minyak bumi meliputi:

- JPDA PSC 03-12
- JPDA PSC 03-13
- JPDA PSC 03-19
- JPDA PSC 03-20
- JPDA PSC 06-105
- JPDA PSC 11-106

(informasi lebih lanjut tentang PSC ada di Lampiran F)

Sumber: http://www.anpm.tl/jpda2/ & ANPM Annual Report 2018

4.3. Perjanjian khusus dengan Australia tentang Eksplorasi Minyak & Gas

Pada tahun 2006, Timor-Leste dan Australia telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Internasional mengenai pengaturan maritim di Laut Timor:

- Perjanjian Laut Timor yang disebutkan sebelumnya
- Perjanjian tentang Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS) (perjanjian ini tidak lagi berlaku mulai 2016)
- Perjanjian Unitisasi Internasional untuk Greater Sunrise (IUA)

Selain itu, Nota Kesepahaman (MOU) Greater Sunrise menetapkan pengaturan tambahan di bidang ini.

Perjanjian Laut Timor (TST)

Secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia di Dili, pada tanggal 20 Mei 2002, hari ketika Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya dari kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk bergabung dalam eksplorasi minyak bumi di Timor Laut oleh kedua negara.

Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran catatan diplomatik. Perjanjian itu akan berjalan selama 30 tahun sejak diberlakukan atau ketika batas dasar laut dapat ditetapkan, mana saja yang lebih dulu.

Perjanjian Laut Timor mengatur pembagian hasil sumber daya minyak bumi yang teridentifikasi di wilayah dasar laut yang disepakati yang dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Minyak Bersama dan tidak menentukan kedaulatan dan batas laut antara kedua negara. Perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak salah satu negara untuk mengklaim bagian dasar laut yang tumpang tindih dipertahankan.

Pada tahun 2019, Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste diterbitkan untuk memperbaiki Perjanjian Laut Timor. Oleh karena itu, Timor-Leste dan Australia menyimpulkan delimitasi definitif perbatasan laut antara kedua Negara melalui Traktat dan delimitasi tersebut berimplikasi pada kepemilikan, yurisdiksi dan pengelolaan sumber daya minyak di Laut Timor. Resolusi ini tidak berlaku dalam laporan ini.

4.3. Perjanjian khusus dengan Australia tentang Eksplorasi Minyak & Gas

Greater Sunrise - International Unitization Agreement (IUA)

Ladang gas dan kondensat Sunrise dan Troubadour, yang secara kolektif dikenal sebagai ladang Greater Sunrise, terletak sekitar 150 kilometer tenggara Timor-Leste dan 450 kilometer barat laut Darwin, Northern Territory.

Pada April 2019, pemerintah Timor Leste, melalui Timor GAP, membeli 56,56% gas dan kondensat Greater Sunrise, yang dimiliki oleh Conocophilips (30%) dan Shell (26,56%). Woodside masih memegang persentase lahan.

Greater Sunrise IUA, bersama dengan kerangka hukum lainnya, mengatur kegiatan perminyakan di Unit Area dan Unit Reservoir.

Menurut Rektifikasi 15/2019 pada Perjanjian Laut Timor akan ditentukan oleh garis geodesik pengawasan, tetapi itu hanya akan berlaku setelah Timor dan Indonesia menetapkan batas-batas di platform kontinental.

Greater Sunrise - Memorandum of Understanding (MOU)

MOU Greater Sunrise menetapkan nilai biaya terkait dengan Penyatuan Greater Sunrise yang akan ditransfer Pemerintah Australia kepada Pemerintah Timor-Leste.

Petroleum Mining Code (PMC)

Sesuai dengan Pasal 7 (a) Perjanjian Laut Timor, dan tunduk pada persyaratan Perjanjian itu, Kode Penambangan Minyak berikut diadopsi untuk mengatur eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi Minyak di dalam WBPMT, serta ekspor Minyak bumi dari daerah yang sama ini.

Interim Petroleum Mining Code (Interim PMC)

PMC Interim mengatur aktivitas perminyakan di dalam JPDA. Terlepas dari kenyataan bahwa PMC telah dibentuk, PMC Interim terus mengatur PSC berikut:

- JPDA PSC 03-12
- JPDA PSC 03-13
- JPDA PSC 03-19
- JPDA PSC 03-20

4.3. Perjanjian khusus dengan Australia tentang Eksplorasi Minyak & Gas - undang baru sejak 19/08

Greater Sunrise

Menurut Rektifikasi 15/2019 dari Perjanjian Laut Timor, yang belum berlaku, Wilayah Khusus Greater Sunrise akan ditentukan oleh garis geodesik provisory, yang akan berlaku setelah Timor dan Indonesia membuat kesepakatan yang menetapkan batas-batas benua. platform antara kedua negara ini. Ketika Ralat mengenai Rezim Khusus Greater Sunrise mulai berlaku, Para Pihak akan berbagi pendapatan hulu, yang berarti pendapatan yang diperoleh langsung dari eksploitasi hulu Minyak Bumi yang diproduksi di Ladang Greater Sunrise:

- 1. dalam rasio 70 persen untuk Timor-Leste dan 30 persen untuk Australia jika Greater Sunrise Fields dikembangkan melalui Jaringan Pipa ke TimorLeste; atau
- 2. dalam rasio 80 persen dengan Timor-Leste dan 20 persen dengan Australia jika Greater Sunrise Fields dikembangkan melalui Pipa ke Australia

Sumber: http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3odo-Parlimento-Nacional-No-15-2019-de-27-de-Agosto.pdf

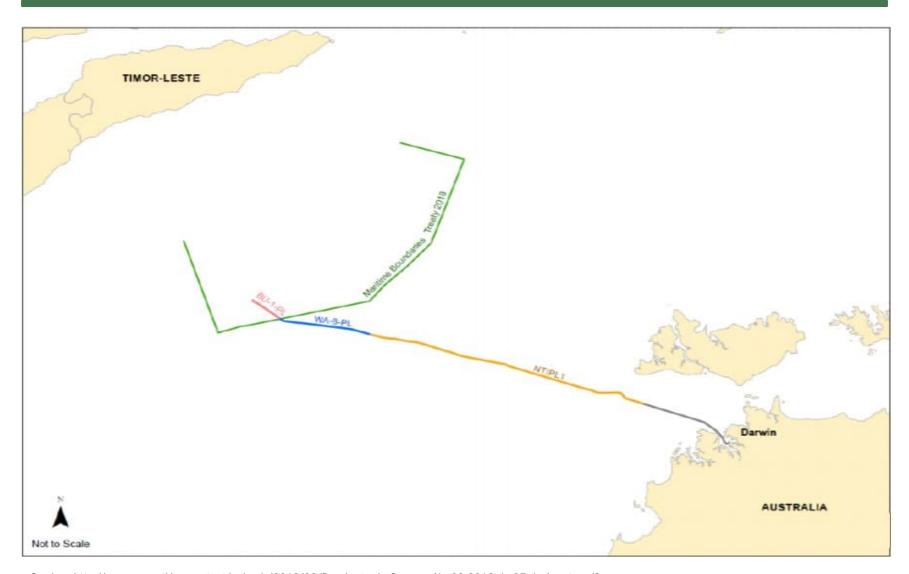
JPDA Area

Selanjutnya, Wilayah WBPMT akan diatur oleh lebih dari satu entitas. Padahal, menurut Resolusi 23/2019 tanggal 27 Agustus, akan diwajibkan untuk mengatur "kerjasama antara ANPM, DIIS dan NOPSEMA terkait dengan regulasi yang aman dan efisien dari Lapangan Gas Bayu-Undan, termasuk Bayu, Fasilitas -Undan dan Pipa Bayu-Undan, yang terakhir melintasi baik landas kontinen Timor-Leste dan Australia dan di mana Australia menjalankan yurisdiksi eksklusif ". Dengan demikian:

- 1) ANPM akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengatur Fasilitas Bayu-Undan, yaitu infrastruktur lepas pantai hulu yang dipasang di Lapangan Gas Bayu-Undan yang mengekstraksi dan mengolah gas dan cairan serta menyimpan cairan yang dihasilkan dari Lapangan Gas Bayu-Undan, tetapi tidak termasuk Pipa Bayu-Undan;
- 2) Departemen Perindustrian, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan Persemakmuran Australia (DIIS) akan bertanggung jawab atas rezim yang mengatur hak atas minyak dan aktivitas di daerah aliran sungai Pesisir (di luar 3 mil laut setelah laut teritorial) hingga batas luar Ekonomi Eksklusif Australia. Daerah
- 3) Otoritas Manajemen Lingkungan dan Keselamatan Minyak Lepas Pantai Nasional Australia (NOPSEMA) secara eksklusif akan mengatur Saluran Pipa Bayu-Undan atas nama Australia, yang dilindungi oleh lisensi BU-1-PL, WA-8-PL dan NTPL1.

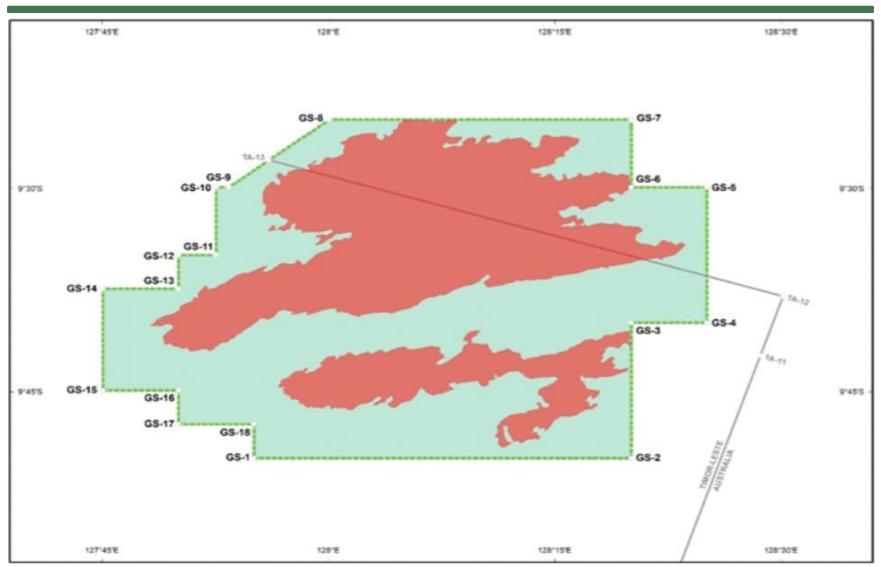
Sumber: http://www.anpm.tl/wpcontent/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-do-Governo-No-23-2019-de-27-de-Agosto.pdf

4.3. Perjanjian khusus dengan Australia: Batas Maritim - Hukum 15/2019



Sumber: http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolução-do-Governo-No-22-2019-de-27-de-Agosto.pdf

4.3. Perjanjian khusus dengan Australia: Batas Maritim - Hukum 15/2019



Source: http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolução-do-Parlimento-Nacional-No-15-2019-de-27-de-Agosto.pdf

4.4. ANPM

ANPM

Otoritas Perminyakan dan Mineral Nasional (ANPM) adalah lembaga publik Timor-Leste, dibentuk berdasarkan Keputusan Undang-Undang No. 1/2016 tanggal 9 Februari (amandemen pertama dari Dekrit-Undang-Undang No. 20/2008 tanggal 19 Juni).

Keputusan UU No. 20/2008, tanggal 19 Juni, yang membentuk Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) *, mempercayakan entitas yang sama, antara lain, tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor / industri yang berkaitan dengan perminyakan dan gas alam dan turunannya di dalam negeri, dengan demikian bertindak sebagai otoritas pengatur Negara.

Berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 1/2016 tanggal 9 Februari, amandemen pertama dari Keputusan Undang-Undang Nomor 20/2008 tanggal 19 Juni, lembaga publik Autoridade Nacional do Petróleo e Minerals (ANPM) diketahui bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur perminyakan. dan kegiatan pertambangan di wilayah Timor-Leste, baik di lepas pantai maupun di darat dan di Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) sesuai dengan Dekrit Undang-Undang tentang pembentukan ANPM, Undang-Undang Kegiatan Perminyakan Timor-Leste, Perjanjian Laut Timor dan Kode Penambangan.

Catatan Lainnya (*):

Sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan SK UU No. 1/2016 tanggal 9 Februari, ANPM berubah menjadi penunjukan (dari ANP (Autoridade Nacional do Petróleo) menjadi ANPM) dan juga dipercaya untuk bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan di Timor-Leste. Kami akan menggunakan sebutan saat ini "Otoritas Minyak dan Mineral Nasional (ANPM)" melalui laporan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019, terdapat perubahan kedua terhadap Undang-Undang yang asli.Amandemen ini disebabkan karena Timor-Leste dan Australia telah melakukan delimitasi definitif kelautan antara kedua Negara melalui Traktat. (Resolusi No. 25/2019) dan secara implisit terdapat batasan kepemilikan, yurisdiksi dan pengelolaan sumber daya minyak di Laut Timor. Oleh karena itu, pada tahun 2019, ketika Resolusi No.25 / 2019 mulai berlaku, ANPM akan melihat fungsinya sebagai otoritas yang ditunjuk untuk tujuan WBPMT menghapus, mempertahankan, bagaimanapun, fungsi serupa untuk tujuan Skema Khusus Greater Sunrise.

Oleh karena itu, pada tahun 2019, ANPM akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aktivitas perminyakan dan pertambangan di wilayah Timor-Leste di Greater Sunrise dan di Bayu Undan sesuai dengan Dekrit Hukum (yang membentuk ANPM) dan hukum dan peraturan berikut:

- Undang-Undang Kegiatan Perminyakan Timor-Leste -Amandemen Pertama Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tanggal 18 Januari;
- Resolusi No. 15/2019 yang meralat Perjanjian Laut Timor;
- Kode Penambangan
- Resolusi lain sebelum Agustus 2019

Harap dicatat bahwa undang-undang baru ini tidak berlaku dalam laporan ini dan hanya diungkapkan untuk pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang di Timor Lorosae.

Perminyakan didirikan untuk memenuhi persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh Pasal 139 Konstitusi Republik yang mengamanatkan penggunaan sumber daya alam yang adil dan merata sesuai dengan kepentingan nasional, dan bahwa pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya ini harus menghasilkan untuk pembentukan cadangan keuangan wajib.

Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Dana Minyak pada tahun 2005, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dana Minyak No. 9/2005 (3 Agustus 2005) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12/2011 (28 September 2011).

Struktur tata kelola Dana Minyak



Sumber: Petroleum Fund Annual Report 2018

pendapatan minyak bumi sepenuhnya ditransfer ke IMF dan diinvestasikan di luar negeri dalam aset keuangan. Pengeluaran Dana hanya ditransfer kembali ke anggaran pemerintah pusat, sesuai dengan persetujuan parlemen.

EITI Timor-Leste - 2018 Report | 41

Pembagian peran yang jelas dan transparansi sebagai prinsip dasar

pengelolaan Dana

Undang-Undang Dana Perminyakan menyediakan mekanisme yang membantu Timor-Leste untuk mengelola pendapatan minyaknya secara berkelanjutan, merinci parameter untuk pengoperasian dan pengelolaan Dana Minyak, menetapkan pedoman alokasi aset dan batas risiko, mengatur pengumpulan dan pengelolaan penerimaan, mengatur transfer ke Anggaran Negara, menjelaskan peran dan tanggung jawab yang jelas dari entitas yang terlibat dalam pengelolaan Dana dan memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintah atas kegiatan ini. Dana Perminyakan dibentuk sebagai rekening Kementerian Keuangan yang disimpan di Banco Central de Timor-Leste (BCTL).

Dana memisahkan masuknya pendapatan minyak bumi dari pengeluaran pemerintah. Semua pendapatan minyak bumi awalnya masuk ke Dana sebelum transfer apa pun dilakukan ke Anggaran Negara. Jumlah transfer dipandu oleh Estimated Sustainable Income (ESI), yang ditetapkan sebesar 3% dari total Kekayaan Minyak Bumi.

Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (ESI)

Kekayaan Minyak Bumi terdiri dari saldo Dana Minyak dan Nilai Sekarang Bersih dari pendapatan minyak bumi yang diharapkan di masa depan. Alasan di balik penggunaan ESI adalah untuk memperlancar pengeluaran sementara pendapatan minyak bumi vang tinggi dan melindungi dari volatilitas arus masuk minyak bumi dan melindungi penggunaan keuangan publik yang berkelanjutan. Dana hanya diinvestasikan dalam aset keuangan internasional. Tujuan investasi adalah untuk mencapai pengembalian riil 3% dalam jangka panjang untuk berkontribusi pada keberlanjutan kebijakan fiskal.

Berdasarkan manajemen yang baik dan kebijakan investasi yang hati-hati (sebagai pemenuhan ESI) dimungkinkan untuk mengalami peningkatan yang stabil selama bertahun-tahun Nilai pasar dari dana tersebut bahkan dengan memperhatikan bahwa penerimaan minyak bumi telah menurun setelah tahun 2012 sebagai akibat dari penurunan tersebut, tentang harga minyak.

Pemerintah telah menarik 10.616 juta USD dari Dana sejak awal hingga akhir tahun 2018. Ini melebihi ESI kumulatif selama periode tersebut sebesar 4.032 juta USD. Kelebihan tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah untuk membebani pengeluaran untuk memungkinkan pembangunan ekonomi. Penarikan berlebih telah berkontribusi pada penurunan Kekayaan Minyak Timor-Leste.

Implikasi untuk strategi investasi Dana Perminyakan telah dipertimbangkan dengan cermat dan diringkas di bagian Laporan Tahunan "saran dari Dewan Penasihat Investasi".

Sumber: Petroleum Fund 2018

Transfer dari Dana Perminyakan

Pada tahun 2018, saldo Dana menurun USD996 juta (dari USD16.799 juta pada tahun 2017 menjadi USD15.804 juta pada tahun 2017). Penurunan ini mengikuti jumlah tertinggi (tahun 2017) sejak pembentukan PF. Keseluruhan saldo Dana dipengaruhi oleh pendapatan minyak bumi, hasil investasi dan penarikan. Hasil investasi negatif USD460 juta sepanjang tahun.

Pendapatan minyak memberikan kontribusi 447 juta USD kepada Dana setelah pengembalian pajak sebesar USD63 juta. Total penarikan 982,5 juta USD dari Dana tersebut digunakan untuk membiayai anggaran Pemerintah.

Pada akhir tahun 2018, saldo Dana Perminyakan mencapai 15.804 juta USD, lebih kecil dari pada awal tahun 2018 dan nilai terendahnya dalam hampir lima tahun.

Penarikan

Penarikan dari Dana Perminyakan memberikan sebagian besar pembiayaan untuk Anggaran Umum Negara Pemerintah. Pada 2018, ada penarikan 983 juta USD, dua kali lipat dari ESI yang diusulkan, tetapi transfer terendah sejak 2014.

Sejak pembentukan PF pada tahun 2017, Pemerintah telah menarik 10.616 juta, yang melebihi ESI sebesar 4.032 juta USD, dengan rata-rata 5% dari PF, bukan 3% yang ditentukan.

Menurut Laporan Tahunan PF 2018, "Selisih tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah untuk membebani pengeluaran di muka untuk memungkinkan pembangunan ekonomi. Penarikan berlebih telah berkontribusi pada penurunan Kekayaan Minyak Timor-Leste ".

Pengembalian pajak pada tahun 2018

Setelah tinjauan keuangan oleh Kitan Joint Venture Partners (JVPs), pembayaran pajak lebih diidentifikasi, yang disetujui oleh Pemerintah. Hal ini menghasilkan pelunasan pajak sebesar 63 juta USD atas lebih bayar yang dilakukan pada tahun 2011, 2012 dan 2013.

	Pajak pendapatan perusahaan	Pajak Minyak Mentah Tambahan	Total
ENI	9,605	3,883	13,488
Inpex	19,933	-	19,933
Repsol	25,030	4,884	29,914
Total	54,568	8,767	63,335

Sumber: Annual Report Petroleum Fund 2018 &

https://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/05PFIndex.htm#reports & http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/05PFIndex.htm#2018



Sumber: Annual Report Petroleum Fund 2018

Net Investment Return 2018

Strategi investasi Dana Perminyakan dirancang untuk menghasilkan pengembalian tahunan yang melebihi inflasi sebesar 3 persen dalam jangka panjang. Tujuan pengembalian nyata 3% mengikuti dari ESI.

Investasi Dana Perminyakan pada awalnya sepenuhnya diinvestasikan dalam obligasi (khususnya AS) untuk membatasi eksposur terhadap risiko namun alokasi yang signifikan ke ekuitas diperlukan untuk mencapai tujuan pengembalian riil. Namun, ketika UU 2005 ditinjau, yang pertama kali mensyaratkan 90% investasi berada dalam obligasi dolar AS, setelah konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan, UU Dana Perminyakan diubah pada tahun 2011 untuk memungkinkan hingga setengah dari Dana untuk diinvestasikan dalam ekuitas yang terdaftar. Sejalan dengan itu, tidak kurang dari 50% Dana akan diinvestasikan dalam bunga tetap.

Pada akhir 2018, obligasi AS menyumbang lebih dari 80% dari total obligasi dan perusahaan AS menyumbang 60% dari portofolio ekuitas.

Pengembalian investasi Dana Perminyakan pada 2018 adalah negatif 2,6%. Ini adalah kerugian tahunan kedua untuk IMF, setelah kerugian kecil pada tahun 2015. Ini mengikuti pengembalian investasi Dana Perminyakan sebesar 10,4% pada tahun 2017, yang merupakan pengembalian tahunan tertinggi sejak awal. Portofolio obligasi kembali 0.78%, pada tahun 2018, dan ekuitas kembali negatif 8.3%

Kinerja Dana Perminyakan pada tahun 2018

Pengembalian dana sejak awal adalah 3.8% secara tahunan, atau 1.9% secara riil, setelah memperhitungkan inflasi AS. Ekuitas telah pertumbuhan jangka memenuhi tuiuan paniang mengembalikan 8,2% per tahun sejak investasi pertama di saham pada tahun 2010. Hal ini dibandingkan dengan pengembalian tahunan ratarata portofolio obligasi sebesar 1,2% selama periode yang sesuai.

Detail dan informasi lebih lanjut tentang PF dapat dilihat dalam Laporan Tahunan PF 2018 yang dipublikasikan di situs web Kemenkeu.

Perspektif Masyarakat Sipil

Saat ini, MSWG terdiri dari tujuh perwakilan masyarakat sipil, empat perwakilan industri, tujuh perwakilan pemerintah dan dua perwakilan dari badan usaha milik negara.

Pengajuan La'o Hamutuk kepada Parlemen mengenai usulan anggaran tahun 2018 mendesak Kementerian Keuangan untuk mengambil pendekatan yang lebih bijaksana memproyeksikan pengembalian investasi di masa depan, karena ini akan memberikan sebagian besar pendapatan Dana Perminyakan sekarang karena Kitan dan Bayu-Undan sebagian besar habis.

Lebih lanjut, menurut evaluasi EITI, mengenai persyaratan 1.3 tentang keterlibatan CSO "Masyarakat sipil telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam proses EITI yang ditunjukkan oleh kontribusi dalam pembahasan Laporan EITI, laporan kemajuan tahunan dan pengarusutamaan, konsultasi dengan CSO lokal, partisipasi rutin dalam pertemuan MSWG dan upaya untuk meningkatkan proses pemilihan perwakilan MSWG. " Hal ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari CSO untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi di negaranya.

Sumber: http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/05PFIndex.htm#2018 & https://eiti.org/timorleste

Pendapatan Dana Minyak

Pada tahun 2018 baru ada satu lapangan gas dalam tahap produksi yaitu Bayu-Undan. Ladang tersebut telah memulai tahap produksi pada tahun 2004. Harga minyak, volume produksi dan biaya produksi adalah tiga faktor utama yang mempengaruhi aliran masuk pendapatan minyak Pemerintah.

Pendapatan minyak bumi berjumlah total 510 juta USD, atau 447 juta karena pengembalian pajak bersih. Jumlah ini terdiri dari 203 juta pajak minyak bumi dan pendapatan minyak bumi lainnya dan 244 juta dalam royalti dan minyak keuntungan. Produksi dalam barel minyak turun dari 41 juta pada tahun 2017 menjadi 38 juta pada tahun 2018, karena sejak dimulainya produksi dalam BOE adalah sebesar 765 juta USD.

Pada tahun 2018, penurunan pendapatan minyak bumi disebabkan oleh penurunan harga minyak dan produksi. Faktanya, satu-satunya kubu yang aktif, Bayu-Undan memiliki kinerja yang lebih rendah sejak puncaknya pada tahun 2011, dan diharapkan memberikan total 1,1 miliar USD hingga 2022, tanggal habis masa berlakunya.

Sejak tahun 2005, total penerimaan minyak bumi mencapai 22 juta, terdiri dari 9 juta penerimaan pajak minyak bumi dan 12 juta royalti dan bagi hasil.

Pembagian antara pajak dan pendapatan minyak bukan pajak sejak tahun 2005 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Timor-Leste dan ConocoPhillips Australia menyelesaikan sengketa pajak

Seperti diungkapkan pada laporan terakhir, Pemerintah Timor-Leste dan ConocoPhillips mengumumkan penyelesaian beberapa sengketa pajak. Secara khusus, para pihak menyelesaikan penilaian pajak terkait dengan rencana penonaktifan Bayu-Undan, pengeboran Phoenix-Firebird dan Biaya Cadangan Kapasitas. Para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemotongan pajak pipa dan telah setuju untuk meninggalkan masalah tersebut dengan Pusat Internasional Singapura yang dibentuk Pengadilan.

MSWG Timor-Leste membahas masalah penerbitan jumlah setelmen pajak dan dimasukkan dalam laporan EITI 2017, sebagai berikut:

2017 Pengimbangan Pajak

Summary of Tax Payments and F YEAR ENDED 31 Decemb			3				
Schedule of Settlement Amount Offsets	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	TOKYO Resources	INPEX
Allocation of Tax Settlement Offsets:							
Offset against tax payments						1 609 012	19 834 676
Offset against PSC payments	4 770 142	1 367 441	161 358	2 662 896	928 245		
Total Tax Settlement Offsets	4 770 142	1 367 441	161 358	2 662 896	928 245	1 609 012	19 834 676

2018 Pengimbangan Pajak

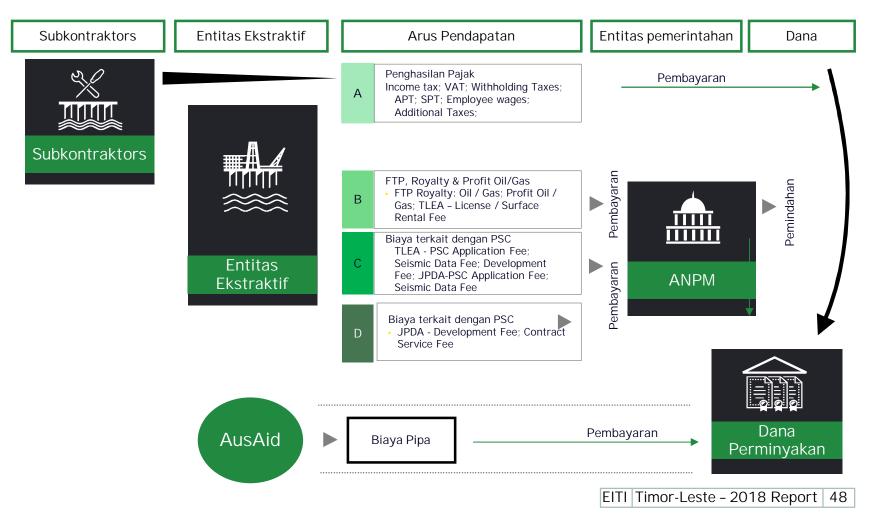
Terkait tahun 2018, IA tidak mengidentifikasi pembayaran penggantian pajak apa pun, mengingat pembayaran yang dilaporkan oleh pemerintah dan entitas dalam cakupannya.

- http://timor-leste.gov.tl/?p=14540&lang=en
- http://www.conocophillips.com.au/newsroom/news-releases/story/timor-leste-and-conocophillips-australia-settle-tax-disputes/
- https://www.laohamutuk.org/Oil/tax/2016/TLCPSettleTax17Feb2016en.pdf

4.6. Ringkasan Proses Pembayara

Ringkasan Proses Pembayaran

Hampir tidak ada hubungan langsung dari sektor perminyakan ke bagian ekonomi lainnya. Semua produksi minyak bumi dilakukan di lepas pantai dan dialihkan ke perusahaan asing. Pendapatan minyak bumi mengalir ke dana minyak bumi Timor-Leste, yang sebagian diambil melalui anggaran pemerintah, yang menguntungkan sektor non-minyak.



4.7. Badan Usaha Milik Negara (SOE's)

Undang-Undang Perminyakan (UU No 2005/13) - Pasal 22 "Partisipasi Negara dalam Operasi Perminyakan," memungkinkan Perusahaan Minyak Nasional (NOC) milik negara untuk berpartisipasi dalam usaha patungan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak di Timor-Leste. NOC bukanlah mitra di ladang Bayu-Undan, Kitan dan Greater Sunrise di JPDA, yang kontraknya ditandatangani sebelum Undang-Undang Perminyakan menjadi Undang-Undang dan NOC didirikan. Dalam pengertian ini, Pemerintah Timor-Leste menciptakan TIMOR GAP.

Pada tanggal 18 Januari 2019, undang-undang tersebut diubah dengan UU No.1 / 2019, yang menyetujui bahwa partisipasi Negara, orang-orang kolektif publik dan orang-orang kolektif lainnya yang ditahan atau dikendalikan oleh mereka tidak terbatas pada partisipasi maksimal 20 orang. %, ketika partisipasi ini didasarkan pada transaksi komersial atau penghargaan dalam ketentuan hukum.

TIMOR GAP, E.P.

TIMOR GAP, E.P. didirikan sebagai perusahaan nasional Timor-Leste berdasarkan Keputusan Undang-Undang no 31/2011. Tujuan utamanya adalah untuk bertindak atas nama Negara dalam menjalankan bisnis di sektor Minyak dan Gas Bumi.

Perusahaan ini menerima suntikan dana pemerintah dalam bentuk transfer publik tahunan dalam rangka mendukung kegiatan operasionalnya sesuai dengan UU APBN. Transfer publik ke TIMOR GAP dilakukan melalui anggaran tahunan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM). Dana yang dialokasikan untuk TIMOR GAP didasarkan pada rencana tahunan perusahaan yang disetujui oleh Dewan Menteri.

Perjanjian tentang pelaksanaan anggaran dan pelaporan ditandatangani setiap tahun antara MPRM dan TIMOR GAP sebelum pencairan dana ke rekening bank yang ditunjuk perusahaan. Di bawah Seni. 4 Ketetapan UU No 31/2011, TIMOR GAP wajib menyampaikan laporan setiap triwulan kepada MPRM tentang penggunaan transfer publik sebagaimana mestinya. Rincian transfer disebutkan dalam Laporan Tahunan 2018 TIMOR GAP.

Perusahaan adalah pemegang kuota 60% GAP-MHS Aviation Lda (GAP-MHS) dan 40% saham dipegang oleh MHS Aviation Lda. Pada tahun buku 2018 tidak ada dividen dari GAP MHS yang diterima (2017: 162,201 USD) dan secara kelompok Laba & Rugi sebelum pajak adalah -1,514,899 USD (2017: 1,514,026 USD). Selain itu, perusahaan menerima hibah pemerintah sebesar 9.948.762 USD selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 (2017: 11.900.000 USD).

Kegiatan TIMOR GAP bervariasi dari Onshore ke Offshore dan Nasional ke Internasional. Pada tahun 2018 TIMOR GAP memiliki::

- Bagian dari Joint Venture (JV) dengan Eni dan Inpex untuk PSC 11-106 di kawasan JPDA dengan efektif tanggal 23 Oktober 2013. TIMOR GAP memiliki 24% saham di JV.
- Pada tanggal 18 Desember 2015, TIMOR GAP memulai untuk pertama kalinya keikutsertaan dalam kegiatan eksplorasi di dalam TLEA, dengan satu blok eksplorasi lepas pantai dan menandatangani PSC keduanya, untuk memulai eksplorasi lepas pantai di blok TL-SO-15-01.
- Pada bulan April 2017, Timor GAP dianugerahi dua PSC untuk memulai eksplorasi dua blok darat TL-OT-17-08 (Blok A) dan TL-OT-17-09 (Blok C), kemitraan dengan Timor Resources (50% masing-masing).
- TIMOR GAP bertujuan mencari mitra untuk menandatangani PSC baru terkait Blok B (Onshore). Selama tahun 2018 telah dilakukan pengintaian lapangan dan pengambilan sampel geokimia, yang berujung pada ditemukannya sedikitnya 17 rembesan gas yang terbakar secara alami dan satu rembesan minyak.

Lebih lanjut, dari analisis yang dilakukan, TIMOR GAP tidak memiliki belanja kuasi fiskal terkait untuk layanan sosial yang dapat dilaporkan pada tahun 2018.

Lihat Lampiran I untuk Blok Onshore Timor GAP.

Sumber: Timor GAP 2018 Annual Report

4.7. Badan Usaha Milik Negara (SOE's)

Brief Note on Onshore direct award to TIMOR GAP

TIMOR GAP, EP, perusahaan minyak nasional Timor-Leste, dianugerahi hak eksplorasi hidrokarbon eksklusif untuk Blok Onshore (44/2015) berdasarkan Resolusi Pemerintah 44/2017 pada bulan Desember 2015. Selanjutnya, Blok Onshore dibagi menjadi 3 subblok (A, B & C), masing-masing dengan luas sekitar 1000km2.

Karena sifat badannya, maka dianalisis UU 13/2005 yang menjelaskan bahwa pemberian langsung dimungkinkan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang kegiatan perminyakan 13/2005 tentang seni. 13 b):

- "... Kementerian dapat memilih untuk memberikan Otorisasi melalui negosiasi langsung tanpa mengeluarkan undangan seperti itu:
- (i) in the case of Access Authorizations; or
- (ii) in the case of all other types of Authorization, where it is in the public interest to do so."

Sumber: TIMOR GAP 2018 annual report & http://timor-leste.gov.tl/wpcontent/uploads/2010/03/Law_2005_13_petroleum_activities_.pdf

Mempertimbangkan TIMOR GAP, E.P. Misi dan tujuan, sebagai entitas muda Perminyakan Nasional, Kementerian menilai penghargaan ini dilakukan untuk kepentingan umum nasional dan tonggak penting bagi TIMOR GAP, E.P. untuk berkembang sebagai perusahaan minyak dan gas.

Peran TIMOR GAP E.P. dalam eksplorasi darat adalah kunci untuk mencapai manfaat maksimum bagi Timor dan partisipasi maksimum warga negara Timor. Sebagaimana dicatat dalam Program Pemerintah Konstitusional Keenam, operasi dan aktivitas perusahaan adalah "inti dari strategi pengembangan industri perminyakan kita" dan memberikan "jalan bagi Timor-Leste untuk memiliki saham bisnis langsung dan mendapatkan keuntungan dari ekspansi sektor ini. "

Bertindak sesuai dengan Undang-Undang Kegiatan Perminyakan. Kementerian bersama ini memberikan kontrak minyak bumi ini melalui negosiasi langsung berdasarkan kepentingan publik kepada TIMOR GAP Onshore Block (untuk memungkinkan peningkatan pengetahuannya di sektor hulu dan meningkatkan pengalaman dan kemampuannya) yang tergabung dan diatur berdasarkan undang-undang Republik Demokratik Timor-Leste vang ada, dan TIMOR RESOURCES PTY LTD, sebuah perusahaan yang didirikan di Australia, dan kedua belah pihak secara kolektif disebut sebagai "Kontraktor" untuk Kontrak Bagi Hasil (PSC) TL-OT-17 -08, yang mencakup Kota Covalima dan Bobonaro dan TL-OT-17-09 (PSC), yang mencakup Kota Manufahi dan Ainaro.

Sumber: http://timor-leste.gov.tl/?p=17711&lang=en

4.8. Lisensi / Pengungkapan kontrak

ANPM bertanggung jawab atas pengungkapan publik atas kontrak dan lisensi yang mengatur tentang eksploitasi minyak, gas dan mineral.

Menurut persyaratan 2.2 Standar EITI 2019, Timor-Leste diharuskan untuk mengungkapkan informasi terkait semua kontrak dan pemberian lisensi dan transfer selama 2018. Dengan demikian, di situs ANPM dimungkinkan untuk menemukan informasi PSC vang aktif, dengan lapangan, dan daftar lisensi sejak 2006. Following the requirement 2.2, Timor-Leste should disclose:

- Deskripsi proses untuk mentransfer atau memberikan lisensi;
- ii. Kriteria teknis dan keuangan yang digunakan;
- iii. Informasi tentang penerima lisensi yang telah dialihkan atau diberikan:
- iv. Penyimpangan material dari kerangka hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur transfer dan penghargaan lisensi.

Selain itu, pemerintah harus mengungkapkan proses pemberian atau pengalihan izin penawaran, dan aturan yang menentukan bagaimana kandidat dipilih.

Sembur: EITI Standard 2019

Akibatnya, ANPM mengungkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi atau penawaran, dan daftar lisensi dan kontrak di situs web berikut:

Sumber: http://www.anpm.tl/category/annual-report/ Sumber: http://www.anpm.tl/list-of-licenses-2006-2018/

Sumber: http://www.anpm.tl/how-to-apply-for-the-downstream-activity-license/

Sumber: http://www.anpm.tl/jpda2/ & http://www.anpm.tl/tlea/ Sumber: http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekPSCList

Sumber: http://www.anpm.tl/timor-leste-eiti/

Sektor Minyak dan Gas Timor-Leste dan kedua wilayah (JPDA & TLEA) diatur di bawah Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang ditandatangani antara perusahaan minyak dan ANPM.

ANPM diharapkan untuk mengungkapkan salinan kontrak dan informasi lain yang relevan tentang izin aktif. Selain tautan yang disebutkan di atas, dimungkinkan juga untuk, dengan permintaan, meminta informasi lebih lanjut di situs mereka:

Sumber: http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgRequest

Catatan Lainnya:

Mayoritas PCS ditandatangani ketika Timor-Leste masih dalam pendudukan Indonesia dan tidak ada lebih banyak informasi mengenai tanggal aplikasi atau prosesnya (Lampiran F PSC diwarisi dari Rezim ZOCA Indonesia). PSC 2006 memiliki tanggal penerapan Mei 2006.

PSC 11-106 diberikan pada tahun 2013 dan PSC TL-S0-15-01 pada tahun 2015. Proses tersebut telah diungkapkan masingmasing pada laporan EITI TL 2013 dan 2015.

PSC TL-OT-17-08 dan TL-OT-17-09 diberikan pada tahun 2017.



Rezim Pajak

Menurut persyaratan 2.1 Standar EITI 2019, Timor-Leste harus mengungkapkan deskripsi rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif.

Sektor perminyakan Timor-Leste saat ini terdiri dari dua yurisdiksi berbeda dengan rezim hukum dan fiskal yang berbeda:

- 1. The Joint Petroleum Development Area (JPDA) dikelola bersama oleh Australia dan Timor-Leste dengan denominasi:
- Dicakup oleh Perjanjian Laut Timor yang tercakup dalam proyek Bayu-Undan dan Great Sunrise Filed.
- Dicakup oleh Perjanjian Laut Timor tidak termasuk proyek Bayu-Undan dan Great Sunrise Filed.

2. Timor-Leste Exclusive area (TLEA) yang dikelola oleh Timor-Leste di Offshore dan Onshore

Timor-Leste menjalankan sistem Kontrak Bagi Hasil (PSC). Operasi minyak bumi di Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) dan wilayah eksklusif Timor-Leste dilakukan sesuai dengan PSC yang dibuat antara Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) dan Kontraktor.

Selain itu, TST menjamin bahwa perpajakan dibagi antara 90% pendapatan dari JPDA ke Timor-Leste dan 10% ke Australia.

Kami mencatat bahwa pada tahun 2019, Undang-Undang baru mulai berlaku karena Resolusi 15/2019 dari Ratifikasi Perjanjian Laut Timor. Berdasarkan UU 5/2019, tidak akan terjadi perubahan signifikan terhadap peraturan perpajakan di Bayu-Undan dan Stabilitas Pajak. Padahal, undang-undang baru ini melonjak karena regulator WBPMT terdiri dari tiga entitas, bukan hanya ANPM dan akibatnya harus dibuat undang-undang baru tentang undang-undang tersebut.

Bagian ini merangkum rezim fiskal untuk setiap yurisdiksi.

Timor-Leste





5.1. JPDA – Bayu-Undan & Greater Sunrise Fields

Pada Lampiran F disajikan semua PSC yang meliputi lapangan Bayu-Undan dan lapangan Greater Sunrise tahun 2018.

Secara umum, rezim pajak di JPDA tunduk pada Perjanjian Laut Timor (TST) yang secara efektif memberikan hak perpajakan kepada 90% pendapatan dari JPDA ke Timor-Leste dan 10% ke Australia.

Aturan yang berlaku untuk kedua bidang ini adalah sebagai berikut:

Bayu-Undan:

- UNTAET Regulation No. 1/1999 on 25 October 1999
- Law 3/2003 on Tax of Bayu-Undan Contractor (*ToBuca*)
- Law 4/2003 on Tax Stability
- UNTAET Regulation No. 18/2000
- Timor Sea Treaty

Great Sunrise:

- UNTAET Regulation No. 1/1999 on 25 October 1999
- Timor Sea Treaty
- Income Tax Law on 25th Oct 1999
- UNTAET Regulation No. 18/2000

CATATAN: Pada tahun 2019, undang-undang dan peraturan baru mulai berlaku karena definisi perbatasan antara Australia dan Timor Leste. Akibatnya, Perjanjian Laut Timor dikoreksi dengan undang-undang 15/2019 dan peraturan baru tentang perpajakan menjadi 5/2019 pada 27 Agustus. Terbukti tidak terjadi perubahan signifikan pada peraturan perpajakan, namun untuk Scope 2018 rezim perpajakan yang berlaku masih dengan yang sebelumnya (sebelum no 2019). Karena itu, harap pertimbangkan slide berikutnya dengan pajak yang berlaku di Timor Leste pada tahun 2018.

➤ Bayu-Undan Rezim Pajak Lapangan

Lapangan Bayu-Undan (meliputi PSC JPDA 03-12 dan 03-13) terletak di JPDA dan oleh karena itu diatur oleh Perjanjian Laut Timor (TST). Undang-undang perpajakan umum (disebut sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan - Undang-undang perpajakan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1999) telah mengalami modifikasi lebih lanjut sebagai akibat dari ToBuca dan Undang-Undang tentang Pengembangan Minyak Laut Timor (Undang-Undang Stabilitas Pajak) . Sekali lagi, harap diperhatikan bahwa pajak berikut perlu dihitung berdasarkan 90%.

Income Tax

- Pajak Penghasilan Badan untuk Kontraktor dengan tarif tetap 30% atas Penghasilan Kena Pajak
- Pajak Penghasilan Badan untuk Subkontraktor atau semua penyedia jasa akan dikenakan pajak Penghasilan Perorangan atas tarif pajak progresif: 10%, 15% dan 30% atas Penghasilan kena pajak tahunan.

PAJAK Keuntungan Tambahan (APT)

Kontraktor Bayu-Undan juga dikenakan APT (APT juga merupakan pajak tambahan di Timor-Leste yang dibayarkan oleh kontraktor atas keuntungan hulu) dan akan diterapkan terhadap kontraktor yang memiliki jumlah positif dari penerimaan bersih terakumulasi untuk operasi perminyakan tahun itu dihitung menurut rumus berikut:

ANR x 22.50% * (1-r), and ANR = $((A \times 116.50\%)-(Ix(1-r)))+B$

Dimana:

ANR - penerimaan bersih terakumulasi dari kontraktor;

r - Pajak penghasilan (saat ini 30%)

A - Akumulasi penerimaan bersih dari tahun-tahun sebelumnya;

B - Penerimaan bersih untuk tahun berjalan

I - Beban bunga

5.1. JPDA – Bayu-Undan & Greater Sunrise Bidangs

VAT

PPN dengan tarif 10% berlaku untuk "layanan kena pajak" yang disediakan di WBPMT dari layanan yang diberikan atau barang oleh perusahaan pemasok (yaitu Subkontraktor).

Pemotongan pajak

Ada berbagai tarif pajak atas Pendapatan Bruto Barang dan Jasa (WHT) untuk Subkontraktor yang menyediakan layanan dalam kegiatan perminyakan di Lampiran G WBPMT. Tarif WHT yang berlaku bervariasi tergantung pada jenis layanan (yaitu, layanan pengeboran (rig); layanan konstruksi; layanan teknis, manajemen, hukum dan akuntansi, royalti, dan lain-lain).

Pajak Pendapatan Gaji

Pegawai yang memberikan layanan sehubungan dengan kegiatan perminyakan di Annex G WBPMT dikenakan pajak pendapatan upah (WIT) di Timor-Leste atas upah mereka.

Tarif WIT Timor-Leste yang berlaku untuk karyawan yang merupakan penduduk Timor-Leste adalah 10%, 15% dan 30% dari Pendapatan kotor dari gaji karyawan tetap atau upah serupa.

Sebagai contoh, dalam kasus seorang pekerja non-residen, tarif WIT tetap adalah 20% x 90% = 18% dari remunerasi

> Greater Sunrise Rezim Pajak Lapangan

Ladang Greater Sunrise (meliputi PSC JPDA 03-19 dan 03-20) terletak sebagian (yaitu 20,1%) di dalam JPDA dan sebagian (yaitu 79,9%) di luar dan di bawah yurisdiksi eksklusif Australia.

Rezim pajak diatur oleh TST dan Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise (SIUA).

Perbedaan utama dari rezim pajak lapangan Bayu-Undan dan rezim pajak lapangan Greater Sunrise, selain persentase yang diterapkan (90% * 20,1% karena Timor-Leste hanya memiliki 20,1% dari bidang ini), dan bahwa ada tarif progresif di Pajak Penghasilan, adalah adanya Pajak Keuntungan Cabang sebagai pengganti PAJAK Keuntungan Tambahan (APT).

Paiak penghasilan

UU Pajak Penghasilan adalah tarif tetap 30% atas penghasilan kena pajak untuk Kontraktor

 Pajak Penghasilan Badan untuk individu atau sub kontraktor mengikuti tarif progresif: 10%, 15% dan 30% atas Penghasilan Kena Pajak.

Pajak Laba Cabang (BPT)

Kontraktor Greater Sunrise dikenai BPT 20% atas 90% dari 20.1% laba setelah pajak. Di bawah TST, 20% BPT dikurangi menjadi 15% di mana perusahaan tersebut adalah penduduk Australia atau Timor-Leste.

5.2. JPDA – Bidang Lainnya

Rejim pajak yang berlaku di wilayah eksklusif Timor-Leste berlaku sama untuk operasi perminyakan yang dilakukan di wilayah di WBPMT, tunduk pada modifikasi tertentu. Bidang lainnya juga tunduk pada 90% dasar karena TST.

Rezim pajak di bidang lain WBPMT: Timor Sea Treaty

- UNTAET Regulation No. 2000/18
- Petroleum Tax Act No. 7/2005, replaced by Taxes and Duties Act on Decree law No. 8/2008 Amendment
- Income Tax Law

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan berlaku untuk Kontraktor dengan tarif 30%.

• Subkontraktor atau semua penyedia layanan dikenakan pemotongan akhir sebesar 6%

VAT

PPN dengan tarif 10% (dikurangi menjadi 9% oleh TST) diterapkan ke "layanan kena pajak" yang disediakan di WBPMT dari layanan yang diberikan atau barang oleh perusahaan pemasok (yaitu Subkontraktor).

Pajak Pemotongan

Tarif 6% (dikurangi menjadi 5,4% oleh TST) akan diterapkan pada Pendapatan Bruto Barang dan Jasa (WHT) untuk Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan layanan dalam kegiatan perminyakan di WBPMT.

Pajak Minyak Mentah Tambahan (SPT)

Kontraktor juga dikenai SPT (SPT adalah pajak tambahan di Timor-Leste yang dibayarkan oleh kontraktor atas keuntungan hulu) dan akan diberlakukan terhadap kontraktor yang memiliki jumlah positif dari penerimaan bersih terakumulasi untuk operasi perminyakan pada tahun itu yang dihitung sesuai rumus berikut:

ANR x 22.50% * (1-r), and ANR = $((A \times 116.50\%)-(Ix(1-r)))+B$

Dimana:

ANR - penerimaan bersih terakumulasi dari kontraktor;

r - Pajak penghasilan (saat ini 30%)

A - Akumulasi penerimaan bersih dari tahun-tahun sebelumnya;

B - Penerimaan bersih untuk tahun berjalan

I - Beban bunga

Pajak Pendapatan Gaji

Karyawan yang memberikan layanan sehubungan dengan kegiatan perminyakan di bidang-bidang ini dikenai pajak pendapatan upah (WIT) di Timor-Leste atas upah mereka.

Tarif Timor-Leste WIT yang berlaku untuk karyawan yang merupakan penduduk Timor-Leste adalah 10% (di bawah USD550) atau (USD55 + 30% x jumlah gaji di atas USD550) dari Pendapatan kotor dari gaji karyawan residen atau remunerasi serupa.

Kredit pajak bulanan sebesar USD10 juga berlaku untuk pegawai residen yang merupakan orang perseorangan.

Sebagai contoh, dalam kasus seorang pekerja non-residen, tarif WIT tetap adalah 20% x 90% = 18% dari remunerasi.

5.3. TLEA - Timor-Leste Area Eksklusif

TLEA adalah, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perminyakan (UU No.13 / 2005) Timor-Leste, wilayah yurisdiksi eksklusif Timor-Leste. Negara ini memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi Minyak Bumi (tidak termasuk wilayah darat).

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan berlaku untuk Kontraktor dengan tarif 30%.

Pajak layanan

Tarif pajak layanan kepada kontraktor adalah 12%.

Pajak Penjualan

Tarif pajak penjualan adalah 6%.

Pemotongan Pajak

Tarif 6% akan diterapkan pada Pendapatan kotor Barang dan Jasa (WHT) untuk Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan layanan dalam kegiatan perminyakan di TLEA.

Bea masuk

Bea masuk berlaku (dengan beberapa pengecualian) untuk barang yang diimpor ke Timor-Leste. Tarif bea masuk atas impor barang oleh Kontraktor sehubungan dengan operasi perminyakan adalah 6%.

Biaya dekomisioning untuk kegiatan perminyakan Timor-Leste.

Ketentuan Pengabaian

Untuk Timor-Leste dan untuk tujuan pajak, sejumlah (diizinkan oleh PCS dan disetujui oleh ANPM) dari cadangan untuk mendanai pengabaian dapat diklaim untuk pengurangan pajak jika beberapa persyaratan (sebagai persetujuan rencana) terpenuhi.

Pajak Minyak Mentah Tambahan (SPT)

Kontraktor TLEA juga tunduk pada SPT (SPT adalah pajak tambahan di Timor-Leste yang dibayarkan oleh kontraktor atas keuntungan hulu) dan akan diterapkan terhadap kontraktor yang memiliki jumlah positif dari penerimaan bersih terakumulasi untuk operasi minyak bumi pada tahun itu yang dihitung sesuai rumus berikut:

ANR x 22.50% * (1-r), and ANR = $((A \times 116.50\%)-(Ix(1-r)))+B$ Dimana:

ANR - penerimaan bersih terakumulasi dari kontraktor;

r - Pajak penghasilan (saat ini 30%)

A - Akumulasi penerimaan bersih dari tahun-tahun sebelumnya;

B - Penerimaan bersih untuk tahun berjalan

I - Beban bunga

Pajak Pendapatan Gaji

Pegawai yang memberikan layanan sehubungan dengan kegiatan perminyakan di TLEA dikenakan pajak pendapatan upah (WIT) di Timor-Leste atas upah mereka.

Tarif Timor-Leste WIT yang berlaku untuk karyawan yang merupakan penduduk Timor-Leste adalah 10% (di bawah USD550) atau (USD55 + 30% x jumlah gaji di atas USD550) dari Pendapatan kotor dari gaji karyawan residen atau remunerasi serupa.

Kredit pajak bulanan sebesar USD10 juga berlaku untuk pegawai residen yang merupakan orang perseorangan.

Untuk karyawan yang bukan penduduk, tarif WIT tetap adalah 20% dari remunerasi.



Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada 2018 -Penambangan

Timor-Leste telah (melalui Diploma Menteri) membedakan antara definisi artisanal, menengah dan besar. Pertambangan skala kecil tidak termasuk dalam definisi karena kegiatan sebenarnya (produksi dan biaya yang dipungut) porsinya kecil, dibandingkan dengan sektor Migas bahkan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, artisanal mengacu pada penambangan manual murni dengan penggunaan bahan konstruksi maksimal 60 ton / bulan.

Menurut data yang tersedia, sektor pertambangan di Timor-Leste adalah skala kecil artisanal dan keputusannya adalah menggunakan pedoman standar EITI (sesuai dengan volume / aktivitas) dan mengungkapkan informasi yang tersedia tentang sektor tersebut dengan beberapa informasi tambahan tentang pendapatan (perizinan pendapatan).

Timor-Leste





6.1. Kerangka hukum

Saat ini, ANPM bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aktivitas perminyakan dan pertambangan di Timor-Leste, berdasarkan Keputusan Undang-Undang No. 1/2016 tanggal 9 Februari 2016. Harap diperhatikan bahwa, sebagaimana disebutkan di halaman 40, amandemen ke-2 atas Keputusan Undang-Undang tentang ANPM tidak berlaku dalam laporan ini, dan hanya berlaku mulai 2019 dan seterusnya.

Terkait aturan tentang pertambangan, pada tahun 2008, pemerintah menyetujui ljazah Menteri Nomor 1/2008 tanggal 30 Juli, tentang aturan khusus perizinan kegiatan ekstraksi massa mineral (tambang dan kuari) dan penambangannya pada skala industri. liazah menteri ini diubah dua kali dalam:

- Ijazah Menteri 1/2009, 12 Agustus 2009
- Ijazah Menteri 2/2014, 19 Februari 2014

Amandemen pertama memperkenalkan larangan ekstraksi pasir pantai untuk memulihkan bentang alam laut atau pesisir dan menciptakan kondisi bagi penciptaan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan tersebut, sebagai manfaat langsung bagi penduduk dan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata.

Amandemen kedua memperkenalkan formulir untuk tujuan perizinan, meliputi kegiatan ekstraksi mineral skala menengah dan besar.

Saat ini ijazah menteri n°1 / 2008 tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh ijazah menteri no 64 tahun 2016 tanggal 16 November.

Diploma Menteri yang baru meningkatkan persyaratan perizinan dan memperkenalkan kepala sekolah yang lebih selaras dengan draf Kode Pertambangan (lihat semua izin per tahun di Lampiran E).

Legislasi yang berlaku::

- Ijazah Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November
- Keputusan-UU No. 5/2011 tentang Izin Lingkungan

Sumber: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/4914

6.1. Kerangka hukum

Ijazah Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November

Diploma Menteri Timor-Leste No. 64/2016 tanggal 16 November mengklarifikasi kebutuhan untuk lebih meningkatkan proses administrasi untuk perizinan, kewajiban umum pemegang lisensi, klasifikasi kegiatan dan penilaian biaya terkait, meningkatkan persyaratan teknis untuk evaluasi, perencanaan , pelaksanaan dan pemantauan, inspeksi, audit dan pelaporan kegiatan pertambangan.

Diploma ini mempromosikan partisipasi koperasi atau perusahaan Timor-Leste yang didirikan berdasarkan Hukum Timor-Leste dalam penelitian dan eksplorasi yang berkaitan dengan bahan konstruksi dengan kepentingan partisipasi minimum lebih dari 50% yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang Timor-Leste.

Izin yang diberikan oleh ANPM seperti Izin Prospeksi, Izin Eksplorasi dan Izin Pertambangan, kecuali untuk dimensi dan batu hias, semua izin memiliki jangka waktu satu (1) tahun, kecuali perintah persetujuan masing-masing mengatur lain.

Diploma Menteri menjelaskan, sejalan dengan konstitusi negara, bahwa semua sumber daya mineral di tanah publik dan pribadi di dalam wilayah Timor-Leste dianggap milik domain publik negara, dan bahwa negara dapat memperoleh, termasuk melalui pengambilalihan. , tanah pribadi tempat sumber daya tersebut muncul atau ditemukan.

Ijazah Menteri No.43 / 2019 tanggal 18 September

Selanjutnya pada tahun 2019 Pemerintah mengesahkan Ijazah Menteri No. 43 Tahun 2019 tanggal 18 September terkait dengan Intern Regulation on Organic Law yang mengamanatkan pembentukan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPM) yang merupakan badan pemerintah pusat. bertanggung jawab atas rancangan dan pelaksanaan kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya mineral, termasuk minyak bumi dan mineral strategis lainnya, serta perizinan dan pengaturan kegiatan dan pengolahan minyak dan mineral, termasuk petrokimia dan pemurnian.

Meski demikian, ANPM tetap menjadi otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur sektor migas dan mineral. ANPM berada di bawah pengawasan MPM untuk mengawasi sektor ekstraktif.

Perlu diketahui bahwa Ijazah Tingkat Menteri yang baru ini tidak menggantikan Ijazah Tingkat Menteri 64/2016 dan hanya sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan saat ini.

6.2. Proses lisensi

Biaya dan klasifikasi

Biaya dan Klasifikasi Perizinan Mineral tahun 2016 berlaku sesuai dengan Ijazah Menteri No. 2/2014 tanggal 19 Februari dari Januari sampai November 2016 dan Ijazah No. 64/2016 tanggal 16 November berlaku mulai Desember 2016 sampai sekarang.

Klasifikasi skala artisanal, menengah dan besar serta biaya lisensinya seperti yang digambarkan di bawah ini.



Biaya Pemegang Lisensi -Art. 7

Biaya lisensi yang dikenakan untuk berbagai aktivitas seperti klasifikasi di atas adalah sebagai berikut:



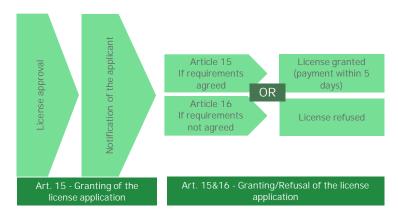
Biaya Penambangan / Ekstraksi - Art. 8

Biaya eksplorasi penambangan menurut klasifikasi ton yang ditambang adalah sebagai berikut:

		Jorna	l da Repú	iblica			
	CONS (em l	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (em USD/ton exploradas)		MATERIAIS DE TRANSFORMAÇÃO (em USD/ton exploradas)		ROCHAS ORNAMENTAIS (em USD/ton exploradas)	
	Outros ?16mm	Areia (dimensão =16mm)	Calcário	Argila	Gesso	Calcário, Granito e Mármore	Outros previstos no artigo 28
Artesanal	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Escala Média Grande Escala	3.00	2.00	0.75	0.50	0.75	8.00	7.00

Perizinan

Ruang lingkup izin meliputi penelitian ilmiah, izin pencarian dan izin pertambangan (pasal 12 dan 13 dari DM 64/2016 tanggal 16 November). Persyaratan lisensi harus diterapkan sebagai berikut:



6.3. Legislasi Lingkungan

Keputusan UU No. 5/2011

Mengingat persyaratan baru, 6.4, dari Standar EITI 2019, penting untuk menganalisis posisi Timor-Leste terkait dengan undang-undang lingkungan.

Keputusan Undang-Undang No.5 / 2011 diterbitkan untuk mengungkapkan pembuatan perizinan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan alih-alih kemudian melawan dampaknya.

Undang-undang ini menetapkan Sistem Perizinan Lingkungan yang dipahami sebagai sistem tambahan untuk menanggapi kebutuhan untuk mencegah dampak lingkungan negatif yang diakibatkan oleh proyek-proyek yang rumit dan memenuhi realitas sosial dan ekonomi Timor Lorosae. Lebih lanjut, sistem membayangkan pemberian izin lingkungan dan pemantauannya sebagai konsekuensi logis dari proses penilaian lingkungan proyek, sehingga menciptakan proses yang terintegrasi dan prosedur yang disederhanakan untuk mencegah dampak lingkungan negatif dan pengendalian pencemaran dari proyek.

Selain itu, Standar EITI 2019 mewajibkan pengungkapan pembayaran lingkungan, oleh karena itu, sebagai IA, kami telah menambahkan persyaratan ini pada Templat 2018.

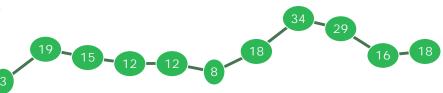
6.4. Aktivitas Pertambangan Timor-Leste

Jumlah lisensi

Dari 2006 hingga 2018, jumlah izin yang dicatat oleh Direcção Nacional de Minerais, MPM, dari ANPM telah berfluktuasi. Terdapat peningkatan signifikan yang diverifikasi pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibenarkan dengan diperkenalkannya amandemen ke-2 dan peraturan baru yang membuat penyesuaian dalam proses aplikasi perizinan menjadi lebih mudah dan terarah dengan lebih baik. Lihat detail lebih lanjut tentang lisensi di Lampiran E.

Sumber: http://www.anpm.tl/list-of-licenses-2006-2018/

Lisensi diterbitkan 2006 - 2018



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

---#Licenses

Pendapatan

Sumber: ANPM 2018 Report

Sejak tahun 2014, pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi dan biaya perizinan di sektor mineral terus meningkat seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut. Hal ini terutama dibenarkan oleh undang-undang dan beberapa kontrol yang diterapkan oleh Kementerian Perminyakan dan Mineral.

Total biaya Ekstraktif dan Lisensi dalam ribuan USD



6.4. Aktivitas Pertambangan Timor-Leste

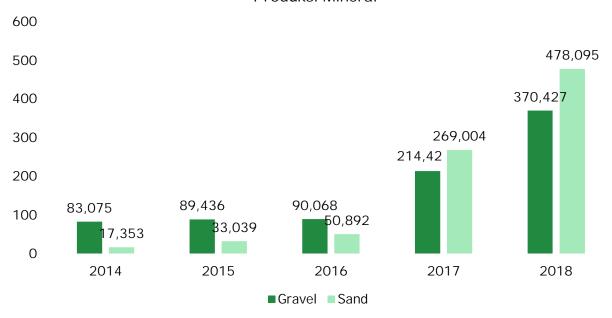
Produksi

Produksi pada tahun 2018 ini sangat tinggi dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018, material konstruksi yang diekstraksi sebanyak 848.521,87 ton, terdiri dari 370.427,20 ton kerikil dan 478.094,67 ton pasir. Peningkatan produksi ini disebabkan adanya pembayaran tambahan untuk kompensasi yang dikumpulkan selama 2018.

Data yang tersedia hanya setelah tahun 2014, karena Laporan Tahunan ANPM sebelumnya (sebelum 2016) tidak mengungkapkan data produksi pertambangan.

Sumber: ANPM 2017 Report & ANPM 2018 Report

Produksi Mineral



6.5. Cakupan Penambangan Artisanal dan Skala Kecil (ASM)

Menurut Persyaratan EITI 6.3, laporan EITI diharapkan menyertakan "perkiraan kegiatan sektor informal, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertambangan artisanal dan skala kecil." dalam informasi terkait kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian untuk tahun anggaran yang tercakup.

Dalam fase pelingkupan, MSWG harus mengevaluasi apakah operasi penambangan formal atau informal dengan bentuk eksplorasi, ekstraksi, pemrosesan, dan transportasi yang sebagian besar disederhanakan harus atau tidak boleh dimasukkan dalam laporan EITI. Namun masih merupakan sektor informalitas yang khas dengan kesenjangan dalam data (statistik produksi yang dipilah berdasarkan lokasi tambang dan mineral, dan yang dikumpulkan di tingkat nasional) dan aliran pendapatan formal (berasal dari izin lisensi dan biaya produksi di lokasi tambang.

Timor-Leste sudah (melalui Diploma Menteri) membedakan definisi artisanal, menengah dan besar. Pertambangan skala kecil tidak termasuk dalam definisi karena aktivitas aktual (produksi dan pungutan yang dipungut) sangat sedikit, dibandingkan dengan sektor Migas bahkan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, artisanal mengacu pada penambangan manual murni dengan penggunaan maksimum 60Ton / bulan bahan konstruksi. Untuk menentukan klasifikasi apakah artisanal atau tidak juga harus memperhatikan:

Jika kegiatan dilakukan pada penambangan manual murni tanpa adanya mesin yang diperbarui untuk mendukung kegiatan tersebut (artisanal);

Jika metode ekstraksi menggunakan mesin yang diperbarui seperti traktor dan excavator, maka dan bahkan mengetahui bahwa jumlahnya kurang dari 60 ton / bulan tunduk pada lisensi dan pembayaran biaya.

Setiap saat, MSWG perlu mempertimbangkan masalah proporsionalitas, yaitu seberapa banyak tenaga, waktu dan sumber daya, yang sesuai untuk jumlah informasi yang akan digunakan. Pengumpulan data dapat memiliki implikasi biaya yang signifikan sehingga diasumsikan bahwa tahap pelingkupan akan bergantung pada informasi primer atau sekunder yang tersedia di Timor-Leste. Dengan informasi yang tersedia pada tahap pelingkupan ini, kami telah memverifikasi bahwa pendapatan pertambangan masih tidak material seperti yang dijelaskan di bawah ini (dan juga lihat ambang batas dan pertimbangan material).

Opsi yang direkomendasikan untuk ASM / skala kecil yang berlaku untuk pelaporan Timor-Leste adalah:

Opsi 1 - Memberikan gambaran umum tentang sektor ASM;

Opsi 2 - Memberikan gambaran umum aktivitas ASM, produksi dan data ekspor;

Opsi 3 - Memberikan gambaran umum aktivitas ASM, produksi, ekspor dan data pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kelompok MSWG sepakat bahwa sektor pertambangan di Timor-Leste adalah ASM / skala kecil dan opsi 3 masih paling tepat, mengingat informasi yang tersedia dengan beberapa informasi tambahan tentang pendapatan (pendapatan perizinan).

Metodologi dan pendekatan

EY dilibatkan untuk melakukan studi pemeriksaan awal untuk menetapkan ruang lingkup rekonsiliasi EITI yang digunakan untuk Laporan EITI Timor-Leste ke-10 dan ke-11. Penugasan ini merupakan langkah awal untuk melakukan proses rekonsiliasi.

Tujuan studi pelingkupan adalah untuk mendefinisikan secara jelas ruang lingkup pelaksanaan rekonsiliasi EITI, template pelaporan, proses pengumpulan data dan jadwal kerja, sesuai dengan Persyaratan EITI (Standar EITI 2016). Penilaian ini juga memungkinkan perbaikan rekomendasi dari laporan EITI sebelumnya.

Penting untuk dicatat bahwa Standar EITI 2019 tidak berlaku untuk laporan ini dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan dalam pendekatan kami.

Timor-Leste





7.1. Ruang Lingkup dan IA

Administrator Independen

Sebagai Administrator Independen, EY juga telah melakukan tugas-tugas berikut selama evaluasi teknis-ekonomi:

- Identifikasi perusahaan, Badan Usaha Milik Negara dan institusi yang harus berada dalam ruang lingkup sesuai dengan persyaratan 4.1 standar EITI
- Mengidentifikasi dan membuat daftar perusahaan minyak dan gas (ekstraksi minyak dan gas) dan industri pertambangan Timor-Leste yang telah melakukan pembayaran besar kepada Negara dan harus berada dalam ruang lingkup untuk pelaporan sesuai dengan persyaratan 4.1 (c) dari EITI standar
- Mengidentifikasi dan membuat daftar badan pemerintah yang menerima pembayaran substansial dari perusahaan minyak dan gas dan industri pertambangan Timor-Leste yang harus berada dalam cakupan pelaporan sesuai dengan persyaratan 4.1 (c) standar EITI
- Identifikasi segala hambatan legislatif, peraturan, administratif atau praktis untuk pengungkapan penuh pendapatan total yang diperoleh dari setiap aliran manfaat yang disepakati dalam volume yang dibutuhkan untuk laporan EITI, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas yang disepakati, yang signifikan untuk templat pelaporan, sesuai untuk persyaratan 4.1 (d) standar EITI.
- Memberi nasihat kepada MSWG tentang bagaimana mendefinisikan tingkat disagregasi untuk diterapkan pada data yang akan dipublikasikan
- Identifikasi prosedur audit dan lakukan prosedur konfirmasi di dalam perusahaan dan lembaga publik yang terlibat dalam penyusunan laporan EITI, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan 4.9 (a) Standar EITI. Ini termasuk studi tentang hukum dan anggaran rumah tangga yang relevan, setiap inisiatif untuk reformasi atau yang sedang diperkenalkan, dan apakah prosedur ini memenuhi standar internasional.

Terakhir EY telah mengeluarkan draft report yang menjadi dasar analisis yang dibuat pada tahap awal (scoping study report) yang telah diserahkan dan disetujui untuk diadopsi oleh MSWG.

Lingkup pekerjaan

Ruang lingkup laporan ke-11 adalah tahun anggaran 2018.

Ambang batas materialitas yang ditentukan oleh MSWG, mencakup semua aliran pendapatan di atas 100.000 USD dan perusahaan yang telah melakukan pembayaran (ke aliran pendapatan material) di atas jumlah yang sama pada tahun 2018. Ambang batas ini memungkinkan untuk menangkap sekitar 99% dari pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dari aktivitas perminyakan pada tahun 2018.

Secara khusus, hal-hal berikut dipertimbangkan:

- Pajak nasional yang dibayarkan ke NDPMR untuk diambil dalam proses EITI, dan karenanya, semua bukan pajak yang dibayarkan ke ANPM atau IMF.
- Semua aliran pendapatan dari TL (NDPMR, ANPM dan PF) dijadikan dasar untuk penghitungan aliran material yang relevan dengan laporan EITI.
- Informasi telah direkonsiliasi (tetapi tidak divalidasi ini hanya akan dilakukan pada tahap rekonsiliasi) dengan informasi tentang piutang yang diumumkan pada Laporan Keuangan akhir tahun audit dari Dana Minyak (yang dianggap sebagai total piutang dalam lingkup).
- Jumlah /% yang dipertimbangkan merupakan kombinasi dari jumlah aliran pendapatan (lebih dari 30) / jumlah entitas (sekitar 49 pada tahun 2018) untuk menjamin bahwa laporan tersebut akan memiliki cakupan lebih dari 99% dari piutang. Angka ini bisa dicapai karena ukuran dan konsentrasi sektor pemain yang hanya sedikit.
- Data pembayaran sosial wajib belum dikumpulkan oleh Pemerintah di seluruh industri. Biaya ini cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, EITI akan berguna sebagai mekanisme yang memungkinkan industri dan pemerintah untuk mengumpulkan data ini secara tahunan dan sistematis.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari entitas pemerintah serta informasi dari sumber terbuka mengenai penerimaan pembayaran pajak dan bukan pajak tahun 2018, maka dasar untuk menentukan ruang lingkup laporan tercapai.

7.2. Ambang materialitas untuk pengungkapan perusahaan

Materialitas

Standar EITI mendefinisikan materialitas sebagai berikut: "Pembayaran dan pendapatan dianggap material jika kelalaian atau kesalahan penyajiannya dapat secara signifikan memengaruhi kelengkapan Laporan EITI." Berbagai cara dapat digunakan untuk menentukan materialitas untuk Laporan 2018. MSWG telah mendefinisikan materialitas dalam hal nilai minimum pembayaran kepada pemerintah (100.000 USD).

Sektor

Sektor Minyak & Gas mencakup lebih dari 90% penerimaan pajak dan bukan pajak yang diterima dari industri yang diekstraksi pada tahun 2018.

Namun, di sektor pertambangan, perusahaan yang memiliki dampak tinggi dari jumlah pendapatan yang diterima pada tahun 2018 akan menimbulkan biaya (waktu tenaga) yang signifikan dengan pendataan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan persyaratan standar (mengenai definisi ambang batas pelaporan yang signifikan, dan entitas yang dapat dipertanggungjawabkan), kami merekomendasikan bahwa hanya sektor Migas yang harus dimasukkan dalam laporan dan sektor pertambangan harus dimasukkan sebagai ASM dengan opsi 2 - Memberikan gambaran tentang aktivitas ASM, produksi dan ekspor.

Subkontraktor

MSWG telah memutuskan untuk memasukkan Subkontraktor yang telah melakukan pembayaran ke aliran pendapatan yang signifikan (hanya Pajak) dari aktivitas Minyak & Gas di atas ambang batas. Itu akan memungkinkan untuk menangkap sekitar 1,63% dari total pendapatan yang diterima terkait dengan kegiatan minyak & gas di Timor-Leste.

7.2. Ambang materialitas untuk pengungkapan perusahaan

Entitas Cakupan

Daftar entitas Minyak & Gas (Kontraktor, Subkontraktor dan Pemerintah) dalam cakupannya adalah sebagai berikut:

	ENTITAS MINYAK & GAS DI RUANG LINGKU Kontraktor	P
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	Inpex Sahul Ltd	Timor Gap Seismic Service Lda
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	Inpex Timor Sea Ltd	Timor Gap Offshore Block Unipessoal
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	TIMOR RESOURCES PTY LTD
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	Badan Pemerintah
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	Direção Nacional de Receitas Petrolíferas (DNRP)
ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd	Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Eni JPDA 03-13 Limited	Woodside Petroleum Ltd	Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	TIMOR GAP E.P. (SOE)
Eni JPDA 11-106 B.V.	TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	Lainnya (Biaya pipa)
Eni Timor - Leste S.p.A.	Timor Gap EP	AusAid (1)

	Subkontraktor	
AMEC Engineering Pty Ltd	Kakivik Asset Management LLC	
CALTECH UNIP	KT Maritime services	
Cameron Services Int. Pty Ltd	Noble International Finance Company	
CAPE AUSTRALIA ONSHORE	MMA Offshore Vessel Operations P/L	
Babcock Offshore Services	Rigforce Pty Ltd	
Clough Amec Pty Ltd	SGS Australia P/L	
Compass Group Australia Pty Ltd	Seafox Asia Pacific Pty Ltd	
Calidus Process Solutions Pty Ltd	Sodexo Timor Unipessoal Ltd	
Haliburton Australia Pty Ltd		

7.2. Ambang materialitas untuk pengungkapan perusahaan

Arus Pendapatan

Pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif terdiri dari:

- Pendapatan Bukan Pajak
- Pendapatan Pajak

Aliran pendapatan pajak entitas Minyak & Gas dalam cakupannya adalah sebagai berikut:

adalah sebagai berikut:				
STREAM PENERIMAAN MINYAK & GAS				
PENGHAS PAJA		Deskripsi (lihat bagian 5 untuk detail lebih lanjut)		
Paja penghas Paja Keuntur Tamba	silan k ngan	Pajak atas penghasilan kena pajak wajib pajak untuk setiap tahun pajak Pajak penghasilan tambahan terhutang oleh seorang Kontraktor yang memiliki jumlah positif dari akumulasi penerimaan bersih yang berasal dari Proyek Bayu-Undan untuk suatu tahun pajak.		
VAT	-	Pajak atas Barang dan Jasa.		
Pemoto pajak (0	Pemotongan pajak penghasilan gaji karyawan (Resident dan Non Resident).		
Pemoto Pembay Paja	aran	Ini adalah pajak di mana setiap orang atau perusahaan yang melakukan pembayaran tertentu diharuskan untuk memotong dari pembayaran tersebut dan mengirimkannya ke Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (NDPMR). Pembayaran yang menarik WHT adalah pembayaran untuk layanan yang mencakup biaya manajemen dan konsultasi, komisi, dividen sewa, dan pembayaran kepada kontraktor non-residen.		
Paja tambal		Pajak tambahan dibayarkan melalui penilaian Pajak yang terkait dengan kegagalan pengiriman formulir pajak, pembayaran pajak, pengurangan pajak dan kegagalan untuk membuat dan menyimpan catatan, bunga dan denda. Ini juga mencakup informasi tentang pengembalian pajak (dari PY).		

Ruang lingkup aliran penerimaan bukan pajak entitas Migas adalah sebagai berikut:

STREAM PENERIMAAN MINYAK & GAS			
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Deskripsi		
FTP	Pembayaran produksi yang dilakukan berdasarkan PSC antara Pemerintah TL dan Perusahaan terkait dengan penjualan Minyak dan Gas.		
Royalti	Pembayaran royalti yang dilakukan sesuai dengan PSC mereka antara Pemerintah TL dan Perusahaan.		
Pembayaran Laba Minyak & Gas	Pembayaran produksi yang dilakukan berdasarkan PSC antara Pemerintah TL dan Perusahaan terkait dengan keuntungan penjualan Minyak dan Gas.		
	Biaya jasa kontrak (JPDA) - Biaya yang dibayarkan ke wilayah Kontrak yang diperoleh berdasarkan jumlah tetap untuk WBPMT dan ukuran / km di TLEA.		
Hutang Biaya	Biaya Pengembangan (JPDA) - Berlaku ketika penemuan komersial diumumkan oleh kontraktor. Biaya berdasarkan besar kecilnya penemuan cadangan minyak dan gas.		
	Biaya Data Seismik - Biaya berdasarkan data yang diperoleh dari sistem inventaris yang mengumpulkan semua data Seismik yang relevan.		
Pembayaran lainnya (Biaya Pipa)	Biaya yang dibayarkan oleh pemerintah Australia (dalam JPDA) yang disetujui oleh kedua negara.		

7.3. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- Persiapan draf template pengumpulan data oleh IA (sebagai bagian dari studi pemeriksaan awal).
- Diskusi dan templat yang disesuaikan setelah komentar, pengamatan dan rekomendasi yang diberikan oleh MSWG.
- Penyusunan permintaan terpisah untuk setiap entitas pemerintah (DNRP, Petroleum Fund, BCTL, ANPM), daftar entitas dalam lingkup dan milik negara (TIMOR GAP E.P.).
- Sekretariat Nasional Timor-Leste mengirimkan template permintaan data dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh perwakilan Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral.
- Setelah diisi oleh entitas dalam lingkup dan entitas pemerintah, kuesioner yang dirujuk (template) dikirim melalui email ke IA.
- Pemrosesan informasi dilakukan oleh Administrator Independen.
- Diskusi tentang perbedaan dan penyesuaian perbedaan oleh IA (melibatkan kedua bagian).
- Draf kesimpulan dibuat oleh IA dan didiskusikan dengan MSWG.

Permintaan informasi khusus disimpan dalam templat pelaporan untuk memenuhi persyaratan EITI dan mempertahankan skor yang dikeluarkan oleh sekretariat Internasional EITI pada validasi terakhir.

Kualitas data

Kualitas data sektor ekstraktif secara keseluruhan memadai. Ada area untuk perbaikan seperti pengungkapan kontrak penuh dan informasi kadaster, seperti yang dijelaskan di atas dalam analisis kontekstual. Area-area untuk perbaikan ini berada di luar jangkauan studi pemeriksaan awal, terutama karena mereka belum disetujui oleh MSWG. Namun perbaikan dari validasi terakhir sudah dicatat.

Tidak ada kesulitan yang signifikan di sektor minyak dan gas berkenaan dengan template pelaporan entitas pemerintah dan perusahaan. Mereka harus disetujui dan secara rinci sesuai dengan persyaratan EITI.

Jaminan Data

Menurut persyaratan 4.9 (a), audit atas laporan keuangan oleh pihak independen, dan penjelasan tentang prosedur asurans cukup untuk menjamin pemenuhan persyaratan ini.

7.4. Jaminan data

Metode Penjaminan di Sektor Publik

Ada entitas pemerintah (seperti ANPM dan Dana Minyak) yang memiliki laporan konfirmasi, dari auditor eksternal mereka, yang dihasilkan sebagai bagian dari program audit normal dan validasi laporan keuangan, yang mengkonfirmasikan pendapatan yang disajikan. Selain itu, BCTL (Banco Central Timor Leste) dan Timor GAP juga telah diaudit laporan keuangannya, dan yang terbaru diaudit oleh Court of Audits.

Langkah-langkah proses asurans / audit yang disebutkan sebelumnya, harus dilaksanakan oleh undang-undang untuk semua entitas publik di sektor ekstraktif. Oleh karena itu, data yang diminta dari administrator independen diharapkan dapat diperiksa dengan cermat melalui proses yang disebutkan di atas.

Metode Penjaminan di Sektor Swasta

Keadaan berbeda diterapkan untuk perusahaan swasta yang terlibat dalam sektor ekstraktif. Kinerja operasional dan keuangan mereka ditangkap dalam laporan tahunan dan keuangan, terutama untuk perusahaan publik atau dengan mengandalkan sistem pengendalian internal, di sebagian besar entitas, kepatuhan SOX.

Hukum dan peraturan tentang proses audit belum berlaku untuk Timor-Leste. Sejak proses rekonsiliasi EITI, membutuhkan data dengan reliabilitas tinggi yang kami miliki:

- meminta dan menerima templat pelaporan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab ditambah rincian pembayaran bulanan (tanggal dan jumlah);
- kami telah meminta laporan keuangan yang diaudit (jika ada) dan / atau laporan auditor;
- Melakukan tinjauan analitik pada data dan informasi eksternal yang tersedia;

Untuk entitas pemerintah dan swasta yang lebih relevan (ConocoPhillips, Eni, Woodside, ANPM, DNRP, PF dan BCTL) kami telah membuat pertemuan khusus untuk membahas dan memahami jaminan data yang menangkap prosedur dan validasi kontrol internal (SOX dan prosedur pengendalian internal lainnya yang dibuat oleh auditor eksternal);

Setiap kali terdapat perbedaan dan / atau keraguan atas data yang diterima kami telah meminta dokumen dan / atau informasi lain yang mendukung transaksi (laporan bank, kuitansi, penghitungan atau lainnya).

7.5. Other considerations

Angkutan

Rencana Pengembangan Lapangan Bayu-Undan terdiri dari pemasangan pipa bawah laut dan pembangunan kilang LNG Darwin. Pipa sepanjang 500 kilometer 26 "memasok gas dari Bayu-Undan untuk diproses menjadi fasilitas Gas Alam berkapasitas 3,7 MTPA -Gas Alam Darwin, yang terletak di Northern Territory Australia. Gas dikirim melalui pipa, kemudian diubah menjadi Gas Alam Cair untuk dijual ke Tokyo Electric dan Tokyo Gas di Jepang. Sejak 2006, ratarata satu kargo LNG per minggu telah dikirim dengan aman ke pelanggan.

Pasal 8 (b) Perjanjian Laut Timor menyatakan: "Sebuah pipa yang mendarat di Timor-Leste akan berada di bawah yurisdiksi Timor-Leste. Sebuah pipa yang mendarat di Australia akan berada di bawah yurisdiksi Australia".

Berdasarkan analisis yang dibuat dan melanjutkan kriteria yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pendapatan transportasi yang teridentifikasi. Biaya pipa adalah biaya perjanjian antara kedua negara (pembayaran dilakukan oleh AusAID) dan bukan pendapatan transportasi. Tidak ada pembayaran lain yang terkait dengan transportasi, yang dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor, teridentifikasi.

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Untuk minyak dan gas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, Timor-Leste mengikuti mekanisme PSC. Di bawah mekanisme PSC, semua infrastruktur dan pengaturan barter dimiliki oleh kontraktor.

Pengaturan penyediaan infrastruktur oleh perusahaan swasta belum disiapkan. Untuk menangkap informasi sepihak kami telah memasukkan permintaan informasi ke dalam template pelaporan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima, kami menyimpulkan bahwa di Timor-Leste konsep pengaturan barter untuk semua tujuan praktis tidak ada (dikonfirmasi oleh informasi yang dipasang pada templat pelaporan yang diterima oleh semua entitas).

Namun ada Komitmen Lokal (wajib dan sukarela) yang disajikan di Bagian 11.

Pembayaran dan Transfer Sub-nasional

Sebagai laporan sebelumnya, berdasarkan prosedur yang dilakukan untuk laporan studi pemeriksaan awal dan, dengan mempertimbangkan struktur aktual pemerintahan Timor-Leste (semua terpusat), tidak ada pembayaran dan transfer subnasional yang terdeteksi.



Rekonsiliasi pajak dan pembayaran lainnya

Disetujui atas prosedur sehubungan dengan pajak, bukan pajak, dan pembayaran lain termasuk yang berikut ini:

- Untuk memperoleh informasi dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah tentang pajak, bukan pajak, dan pembayaran lainnya pada tahun 2018;
- Merekonsiliasi data dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah pada setiap jenis pembayaran untuk setiap perusahaan pada tahun 2018;
- Dalam kasus perbedaan pembayaran diidentifikasi, untuk mengatasi perusahaan tersebut untuk penjelasan;
- Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan (atau jika perusahaan menolak memberikan penjelasan semacam itu), tidak mungkin untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian, untuk menangani otoritas pemerintah terkait dengan permintaan untuk memberikan informasi rinci tentang jenis pembayaran tersebut;
- Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan dan otoritas pemerintah (atau jika mereka menolak untuk memberikan penjelasan tersebut) ketidaksesuaian tetap tidak dapat dijelaskan, maka hal ini harus ditunjukkan dalam laporan EITI.
- Tahun ini, dengan sektor pertambangan yang melaporkan lebih dari 1 juta dolar, kami juga merekonsiliasi entitas yang dilaporkan ANPM telah membayar di atas 100.000USD.

Timor-Leste





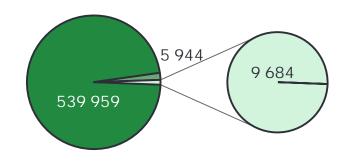
8.1. Hasil umum rekonsiliasi pembayaran

Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif Minyak & Gas dan kegiatan pendukung

Pada tabel di bawah ini terdapat uraian singkat dan rangkuman jumlah total penerimaan yang diterima entitas Pemerintah dari sektor Migas dan besaran cakupannya:

Pendapatan yang dihasilkan pada 2018 (Ribuan USD)	Total	Cakupan	% Cakupan
Total pendapatan bukan pajak yang dilaporkan oleh ANPM	290,309	290,309	100.00%
Jumlah Kontraktor Pendapatan Pajak	249,649	249,645	99.998%
Total Pendapatan Kontraktor	539,959	539,954	99.999%
Total pendapatan Pipeline yang dilaporkan oleh BCTL	5,944	5,944	100.00%
Total Pendapatan Pajak Subkontraktor	9,684	8,973	92.66%
Tidak dalam cakupan		715	0.13%
TOTAL	555,587	554,871	99.87%

Pendapatan Total dalam USD



- ■Oil & Gas extractive activities
- ■Oil & Gas supported activities
- ■Pipeline Fee

8.1. Pembayaran dari Perusahaan Ekstraktif Minyak & Gas dalam Lingkup - Dilaporkan oleh Pemerintah

Pembayaran pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Rincian jumlah penerimaan pajak yang dilaporkan oleh Pemerintah oleh perusahaan disajikan sebagai berikut:

Dari 24 perusahaan yang memiliki pembayaran atas aktivitas perminyakan kepada entitas Pemerintah (DNRP, ANPM, BCTL dan Petroleum Fund), 23 berada dalam ruang lingkup (akumulasi pembayaran di atas ambang batas). Entitas yang tidak termasuk dalam cakupan adalah: Japan Energy EP JPDA Pty Ltd. Pembayaran dari entitas ini mewakili 4 ribu USD dari total pendapatan, terkait dengan pembayaran pajak Pemotongan.

Entitas	Pajak penghasilan	APT tahunan	VAT – JPDA	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Cicilan APT Bayu Undan	Pajak Total
Inpex Sahul Ltd	6,529,884	-	-	-	-	6,744,663	13,274,547
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	-	-	7,046	-	7,046
Conocophillips (03-12) Pty Ltd	30,243,132	-	10,192,767	6,768,329	2,926,320	32,364,167	82,494,714
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	9,168,414	-	-	-	-	12,563,635	21,732,049
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	1,101,536	-	-	-	-	2,769,111	3,870,646
Conocophillips JPDA Pty Ltd	17,806,674	-	-	-	-	16,627,011	34,433,685
Conocophillips (03-13) Pty Ltd	6,161,041	-	-	-	-	5,160,083	11,321,124
Conocophillips Timor Leste	-	-	6,108	13,531	315,280	-	334,919
Woodside Energy Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	-	-	-	22,066	4,808	-	26,875
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	7,620,912	-	-	-	-	18,158,101	25,779,013
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	16,018,400	1,800,000	-	-	-	5,715,691	23,534,091
ENI JPDA 03-13 Limited	16,86, 215	-	-	-	-	15,478,771	32,340,986
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	-	-	-	57,489	-	-	57,489
ENI JPDA 11-106 B.V	-	-	-	-	21,545	-	21,545
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	-	-	-	417	13,895	-	14,311
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-	-	-	33,993	3,830	-	37,823
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	-	-	-	1,169	-	-	1,169
Timor Gap EP	-	-	-	2,961	-	-	2,961
Timor Gap Seismic Service Lda	7,340	-	-	-	-	-	7,340
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	-	-	-	35,618	97,275	-	132,893
TIMOR RESOURCES PTY LTD	-	_	-	142,310	77,206	-	219,516
Total	111,519,548	1,800,000	10,198,875	7,077,882	3,467,205	115,581,233	249,644,742

8.1. Pembayaran dari Perusahaan Ekstraktif Minyak & Gas dalam Lingkup - Dilaporkan oleh Pemerintah

Pembayaran bukan pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Rincian jumlah penerimaan bukan pajak menurut perusahaan yang dilaporkan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

Entitas	FTP	Keuntungan Minyak	Biaya Layanan Kontrak	Biaya Pengembangan	Jumlah Bukan Pajak
Inpex Sahul Ltd	-	26,181,352	-	-	26,181,352
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	-	-	-
Conocophillips (03-12) Pty Ltd	58,526,615	63,079,863	160,000	2,743,650	124,510,128
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	-	18,190,803	-	-	18,190,803
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	-	2,145,454	-	-	2,145,454
Conocophillips JPDA Pty Ltd	-	34,108,962	-	-	34,108,962
Conocophillips (03-13) Pty Ltd	-	11,939,308	160,000	-	12,099,308
Conocophillips Timor Leste	-	-	-	-	-
Woodside Energy Ltd	-	-	-	-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	-	-	160,000	-	160,000
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	-	-	160,000	-	160,000
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	-	29,568,966	-	-	29,568,966
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	-	20,465,377	-	-	20,465,377
ENI JPDA 03-13 Limited	-	22,313,846	-	-	22,313,846
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	-	-	-	325,000	325,000
ENI JPDA 11-106 B.V	-	-	80,000	-	80,000
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	-	-	-	-	-
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-	-	-	-	-
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	-	-	-	-	-
Timor Gap EP	-	-	-	-	-
Timor Gap Seismic Service Lda	-	-	-	-	-
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	-	-	-	-	-
TIMOR RESOURCES PTY LTD	-	-	-	-	<u>-</u>
<u>Total</u>	58,526,615	227,993,931	720,000	3,068,650	290,309,196

8.1. Pembayaran dari perusahaan ekstraktif Minyak Gas dalam Cakupan - Dilaporkan oleh Entitas

Pembayaran pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Rincian jumlah pendapatan pajak yang dilaporkan oleh masing-masing entitas disajikan oleh perusahaan sebagai berikut:

Dari 24 kontraktor, 23 entitas dalam lingkup mengirimkan template dengan data 2018. Dari kontraktor tersebut, juga 23 menjawab mengenai perbedaan yang ditemukan antara laporan entitas dan Kementerian Keuangan.

Perusahaan Ekstraktif	Pajak penghasilan	APT tahunan	VAT – JPDA	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Cicilan APT Bayu Undan Cicilan APT Bayu Undan	Pajak Total
Inpex Sahul Ltd	6,529,884	-	-	-		6,744,663	13,274,547
Inpex Timor Sea Ltd	-	=	-	-	8,532	-	8,532
Conocophillips (03-12) Pty Ltd	28,088,881	-	10,755,762	6,768,329	2,363,334	34,518,418	82,494,724
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	8,546,308	-	-	-		10,458,294	19,004,602
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	1,028,172	-	-	-		1,228,117	2,256,289
Conocophillips JPDA Pty Ltd	16,571,301	-	-	-		20,589,831	37,161,132
Conocophillips (03-13) Pty Ltd	5,728,624	-	-	-		7,206,857	12,935,481
Conocophillips Timor Leste	-	-	-	300,721	27,051	-	327,772
Woodside Energy Ltd	-	-	-	-		<u>-</u>	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	-	-	-	23,050	2,340	-	25,390
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	-	-	-	-			-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	10,082,987	-	-	-		15,696,026	25,779,013
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	13,366,032	1,800,000	-	-		8,368,059	23,534,091
ENI JPDA 03-13 Limited	16,309,642	-	-	-		16,031,344	32,340,986
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	-	-	-	55,178	21,413	-	76,591
ENI JPDA 11-106 B.V	-	-	1,257	-	835	-	2,092
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	-	-	-	-	14,312	<u>-</u>	14,312
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-	-	-	37,253	3,830	-	41,083
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	-	-	-	1,165		<u>-</u>	1,165
Timor Gap EP	-	-	-	-			-
Timor Gap Seismic Service Lda	7,365	-	-	-		-	7,365
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	-	-	-	35,918	97,275	-	133,193
TIMOR RESOURCES PTY LTD	-	-		90,169	17,446	-	107,615
Total	106,259,196	1,800,000	10,757,019	7,311,783	2,556,368	120,841,609	249,525,975

8.1. Pembayaran dari perusahaan ekstraktif Minyak Gas dalam Cakupan - Dilaporkan oleh Entitas

Pembayaran bukan pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Rincian jumlah PNBP menurut perusahaan yang dilaporkan oleh masingmasing entitas disajikan sebagai berikut:

Perusahaan Ekstraktif	FTP	Keuntungan Minyak	Biaya Layanan Kontrak	Biaya Pengembangan	Jumlah Bukan Pajak
Inpex Sahul Ltd	-		- 26,181,352	-	26,181,352
Inpex Timor Sea Ltd Conocophillips (03-12) Pty Ltd	- 58,526,615	63,079,863	320,000	- 2,743,650	- 124,670,128
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	-	18,190,803	-	-	18,190,803
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	-	2,145,454	-	-	2,145,454
Conocophillips JPDA Pty Ltd	-	34,108,962	2 -	-	34,108,962
Conocophillips (03-13) Pty Ltd	-	11,939,309	-	-	11,939,309
Conocophillips Timor Leste	-		-	-	-
Woodside Energy Ltd	-		-	-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	-		- 160,000	-	160,000
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	-		- 160,000	-	160,000
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	-		- 29,568,966	-	29,568,966
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	5,693,546		- 20,465,377	-	26,158,923
ENI JPDA 03-13 Limited	-	22,313,846	-	-	22,313,846
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	-			325,000	325,000
ENI JPDA 11-106 B.V	-		- 80,000	-	80,000
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	-		-	-	-
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-		-	-	-
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	-			-	-
Timor Gap EP	-		-	-	-
Timor Gap Seismic Service Lda	-		-	-	-
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	-		-	-	-
TIMOR RESOURCES PTY LTD	-			-	<u>-</u>
Total	64,220,161	151,778,237	76,935,695	3,068,650	296,002,743

8.1. Perusahaan ekstraktif - Hasil rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi seperti yang dijelaskan dalam Bagian 8.1. Di bawah ini ditampilkan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan dari kegiatan ekstraktif migas dan jumlah yang diterima Badan Pemerintah:

Lihat di halaman-halaman berikutnya penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan selama proses rekonsiliasi.

Entitas	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh Pemerintah	Hasil permintaan resmi	Penyesuaian oleh entitas	Penyesuaian oleh Pemerintah	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh Pemerintah	Perbedaan yang tidak direkonsiliasi
Inpex Sahul Ltd	39,455,899	39,455,899	0			39,455,899	39,455,899	0
Inpex Timor Sea Ltd	8,532	7,046	- 1,486		1,486	8,532	2 8,532	2 -
Conocophillips (03-12) Pty Ltd	207,164,852	207,004,842	- 160,010	- 160,000	-	207,004,852	2 207,004,842	- 10
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	37,195,405	39,922,852	2,727,447	2,727,447	-	39,922,852	39,922,852	_
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	4,401,743	6,016,100	1,614,357	1,614,357	-	6,016,100	6,016,100	-
Conocophillips JPDA Pty Ltd	71,270,094	68,542,647	- 2,727,447	- 2,727,447	-	68,542,647	68,542,647	-
Conocophillips (03-13) Pty Ltd	24,874,790	23,420,432	- 1,454 358	- 1,454,357	-	23,420,433	3 23,420,432	. 1
Conocophillips Timor Leste	327,772	334,919	7,147			327,772	334,919	7,147
Woodside Energy Ltd	-	-	-					
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	185,390	186,875	1,485		-	185,390	186,875	1,485
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-20) Pty Ltd	160,000	160,000	-		-	160,000	160,000	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	55,347,979	55,347,979	0			55,347,979	55,347,979	0
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	49,693,014	43,999,468	- 5,693,546	- 5,693,546	-	43,999,468	3 43,999,468	0
ENI JPDA 03-13 Limited	54,654,832	54,654,832	0			54,654,832	54,654,832	2 0
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	401,591	382,489	- 19,103		19,103	401,591	401,591	-
ENI JPDA 11-106 B.V	82,092	101,545	19,453		- 19,453	82,092	82,092	-
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	14,312	14,311	- 1		-	14,312	14,311	- 1
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	41,083	37,823	- 3,260	- 300	2,961	40,784	40,784	0
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	1,165	1,169	4		- 4	1,165	1,165	0
Timor Gap EP	-	2,961	2,961		- 2,961			<u>-</u>
Timor Gap Seismic Service Lda	7,365	7,340	- 25	- 25	-	7,340	7,340	-
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	133,193	132,893	- 300	- 300	-	132,893	3 132,893	0
TIMOR RESOURCES PTY LTD	107,615	219,516	111,902			107,615	5 219,516	111,902
Total	545,528,718	539,953,938	- 5,574,780	- 5,694,17C	1,132	539,834,548	<u>539,955,070</u>	120,521

8.1. Perusahaan ekstraktif - Penyesuaian oleh Pemerintah

Entitas	Pajak penghasilan	Angsuran APT	VAT – JPDA	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Cicilan APT Bayu Undan	Total	Catatan
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	- 2,154,251	-	562,995	-	- 562,995	2,154,251	0	
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	1\
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	1)
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	-	_	-	-	-	-	-	
ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	
	- 2,154,251	-	562,995	-	- 562,995	2,154,251	0	
							0	
ENI JPDA 03-13 Limited	552,573	-	-	-	-	- 552,573	0	
ENI JPDA 06-105 PTY LTD	-	-	-	- 2,311	21,413	-	19,102,91	2)
ENI JPDA 11-106 B.V	-	-	1,257	-	- 20,710	-	- 19,452,91	
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC area 4)	-	-	-	- 417	417	-	0	
	552,573	-	1,257	- 2,727	1,120	- 552,573	- 350	-
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	_	-	1,486	-	1,486	3)
'	-	-	-	-	1,486	-	1,486	- '
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	-	-	-	983	- 983	-	0	4)
TIMOR GAP PSC JPDA 11-106	-	_	_	- 4	_	_	- 4	5)
Timor Gap EP	-	_	_	- 2,961	_	_	- 2,961	·
Timor Gap El Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-	-	-	2,961	-	-	2,961	6)
TIMOR RESOURCES PTY LTD		-	-	-	-		-	
				979	- 983		- 4	

8.1. Perusahaan ekstraktif - Penyesuaian oleh Pemerintah

Jenis penyesuaian yang diidentifikasi dalam jumlah yang dilaporkan oleh entitas Pemerintah:

- Biaya bank salah dilaporkan;
- Pembayaran tidak dilaporkan;
- Pajak diterima dilaporkan tetapi salah diklasifikasikan menurut jenis pajak atau entitas;
- Penyesuaian rekonsiliasi disajikan menurut entitas dan menurut jenis penerimaan serta didukung oleh bukti yang memadai.
- 1) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke Conocophillips Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak.
- 2) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke ENI Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak, menurut jenis entitas, dan biaya bank yang salah dilaporkan. Eni melaporkan Pajak sebenarnya yang dibayarkan tidak termasuk biaya bank, namun jumlah yang disetorkan Eni kepada pemerintah sudah termasuk biaya bank. Kemenkeu telah melaporkan jumlah yang diterima secara total.
- 3) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke Inpex Timor Sea Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan dua pembayaran, satu pada bulan September dan lainnya pada bulan November 2018, yang dilaporkan oleh entitas dan bukan oleh pemerintah. Kami telah memperoleh dokumen yang mendukung pembayaran ini, disediakan oleh entitas.
- 4) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak.
- 5) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke TIMOR GAP PSC JPDA 11-106 Penyesuaian sesuai dengan tagihan / biaya bank yang dilaporkan secara tidak benar.
- 6) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke TIMOR GAP EP dan Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP Penyesuaian sesuai dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis entitas.

8.1. Perusahaan ekstraktif - Penyesuaian oleh Kontraktor

Entitas	Pajak penghasilan	Pemotongan Pajak Upah	FTP	Biaya Layanan Kontrak	Cicilan APT Bayu	Total	Catatan
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	-	-	-	- 160,000	-	- 160,000	
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	1,235,373	-	-	-	- 3,962,820	- 2,727,447	
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	622,106	-	-	-	2,105,341	2,727,447	1)
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	432,417	-	-	160,000	- 2,046,774	- 1,454,357	
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	73,364	-	-	-	1,540,994	1,614,357	
Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd	-	-	- 5,693,546	-	-	- 5,693,546	2)
Timor Gap Seismic Service Lda	- 25	-	-	-	-	- 25	
Timor Gap Offshore Block Unipessoal	-	- 300	-	-	-	- 300	3)
Timor Gap Timor Gas E Petroleo EP	-	- 300	-	-	-	- 300	
TIMOR RESOURCES PTY LTD							
Total	2,363,234	- 600	- 5,693,546	-	- 2,363,259	- 5,694,170	

¹⁾ Penyesuaian jumlah yang dilaporkan oleh Conocophilips Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak dan entitas.

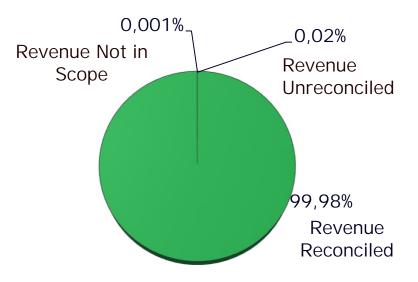
2) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan oleh Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd FTP dibayarkan melalui operator (ConocoPhillips) ke ANPM dan tidak langsung dari Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd (TTSRPL). Meskipun demikian, TTSRPL melaporkan FTP sebagai pembayar akhir. Ini tidak boleh dipertimbangkan, karena ConocoPhillips telah melaporkan FTP.

3) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan oleh Timor GAP Ketiga entitas tersebut melaporkan beberapa pungutan bank yang terkait dengan pembayaran, yang bukan merupakan bagian dari pembayaran yang diterima oleh pemerintah, oleh karena itu tidak perlu dilaporkan.

8.1. Perusahaan ekstraktif - Perbedaan yang tidak direkonsiliasi

Berdasarkan hasil akhir, perbedaan yang tidak direkonsiliasi sekitar 120,5 ribu USD. Jumlah ini mewakili sekitar 0,02% dari total pendapatan kegiatan ekstraktif.

Bagan di bawah ini menunjukkan hasil akhir dan fakta bahwa 99,98% pembayaran dari operator telah direkonsiliasi.



■ Revenue reconciled ■ Revenue unreconciled ■ Revenue not in Scope

	Jumlah dalam USD
	Perbedaan
Entitas	yang tidak
	direkonsiliasi
ConocoPhillips *	7,136
TIMOR RESOURCES PTY LTD	111,902
Woodside Petroleum (Timor Sea 03-19) Pty Ltd	1,485
Total	120,521

^{*} IA tidak menerima informasi dukungan tambahan yang dapat memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa jumlah tersebut telah direkonsiliasi.

8.2. Pembayaran dari subkontraktor Minyak & Gas dalam Cakupan - Dilaporkan oleh Pemerintah

Pembayaran pajak dari Subkontraktor

Rincian jumlah penerimaan pajak yang dilaporkan oleh Pemerintah oleh melakukan pembayaran (ke aliran pendapatan) di atas ambang perusahaan disajikan sebagai berikut:

Dari 35 subkontraktor yang telah membayar jumlah pajak ke DNRP, kami telah mengidentifikasi 17 entitas yang telah batas ke entitas Pemerintah dalam cakupan.

Perusahaan Subkontraktor	Pajak penghasilan	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Pajak Tambahan	Jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah	
AMEC Engineering Pty Ltd	-	154,954	-	-	154,954	
Babcock Offshore Services	-	100,825	221,276	-	322,101	
Calidus Process Solutions PTy Ltd	-	51,306	151	330,861	382,318	
Caltech Unipessoal Lda	35,861	603,514	4,670	-	644,045	
Cameron Services Int. Pty Ltd	44,964	66,809	-	-	111,773	
CAPE AUSTRALIA ONSHORE	-	517,391	15,354	-	532,745	
Clough Amec Pty Ltd	353,102	1,138,071	732,660	-	2,223,832	
Compass Group Australia	246,856	40,354	325,958	-	613,168	
Haliburton Aust Pty Ltd	31,077	99,004	22,857	-	152,938	
Kakivik Asset Management LLC	206,296	21,532	-	-	227,828	
KT Maritime services	-	196,619	-	-	196,619	
MMA Offshore Vessel Operations P/L	-	796,702	-	-	796,702	
Noble International Finance Company	-	1,104,351	78,727	-	1,183,078	
Rigforce Pty Ltd	-	611,343	99,988	-	711,331	
Seafox Asia Pacific Pty Ltd	50,095	185,620	161,356	-	397,071	
Sodexo Timor Unipessoal Ltd	53,963	144,725	108	-	198,796	
SGS Australia P/L	32,097	91,962	-	-	124,059	
Total	1,054,312	5,925,083	1,663,105	330,861	8,973,361	

8.2. Pembayaran dari subkontraktor Minyak & Gas dalam Cakupan - Dilaporkan oleh Entitas

Pembayaran pajak dari Subkontraktor

Rincian jumlah pendapatan pajak yang dilaporkan oleh setiap Entitas oleh perbedaan yang ditemukan antara laporan entitas dan disajikan sebagai berikut:

Dari 17 subkontraktor, 11 mengirimkan template dengan data 2018. Dari subkontraktor tersebut, 7 menjawab mengenai Kementerian Keuangan.

Perusahaan Ekstraktif	Pajak penghasilan	Pajak Keuntungan Per Cabang	notongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Pajak Tambahan	Jumlah yang dilaporkan oleh entitas
AMEC Engineering Pty Ltd	-	-	154,629	-	-	154,629
Babcock Offshore Services	-	-	800,799	363,595	-	1,164,394
Calidus Process Solutions PTy Ltd	75,403	-	256,380	-	50,610	382,393
Caltech Unipessoal Lda	106,226	-	530,427	10,274	-	646,928
Cameron Services Int. Pty Ltd	-		-	-	-	-
CAPE AUSTRALIA ONSHORE		-	487,591	-	-	487,591
Clough Amec Pty Ltd	368,344		1,735,847	119,641	-	2,223,832
Compass Group Australia			-	-	-	-
Haliburton Aust Pty Ltd	453,814		49,877	22,754	-	526,446
Kakivik Asset Management LLC			-	-	-	-
KT Maritime services			-	-	-	-
MMA Offshore Vessel Operations P/L		. <u>-</u>	-	-	-	-
Noble International Finance Company			-	-	-	-
Rigforce Pty Ltd	75,299	_	830,352	290	-	905,942
Seafox Asia Pacific Pty Ltd	106,825	-	195,914	76,704	-	379,442
Sodexo Timor Unipessoal Ltd	152,973	-	-	47,152	-	200,125
SGS Australia P/L	37,055	<u>-</u>	81,345		-	118,400
Total	1,375,939	_	5,123,161	640,411	50,610	7,190,121

8.2. Subkontraktor - Hasil rekonsiliasi

Di bawah ini ditampilkan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan dari subkontraktor migas dan jumlah yang diterima Badan Pemerintah:

Perusahaan Subkontraktor	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh Pemerintah	Hasil permintaan resmi	Penyesuaian oleh entitas	Penyesuaian oleh Pemerintah	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh Pemerintah	Hasil setelah Rekonsiliasi
AMEC Engineering Pty Ltd	154,629	154,954	325	-	- 325	154,629	154,629	-
Babcock Offshore Services	1,164,394	322,101	- 842,293	-	-	1,164,394	322,101	- 842,293
Calidus Process Solutions PTy Ltd	382,393	382,318	- 75	- 75	-	382,318	382,318	-
Caltech Unipessoal Lda	646,928	644,045	- 2,882	-	_	646,928	644,045	- 2,882
Cameron Services Int. Pty Ltd	-	111,773	111,773	_	_	-	111,773	111,773
CAPE AUSTRALIA ONSHORE	487,591	532,745	45,154	-	-	487,591	532,745	45,154
Clough Amec Pty Ltd	2,223,832	2,223,832	-	-	-	2,223,832	2,223,832	-
Compass Group Australia	-	613,168	613,168	-	-	-	613,168	613,168
Haliburton Aust Pty Ltd	526,446	152,938	- 373,507	49,405	424,800	575,851	577,739	1,888
Kakivik Asset Management LLC	-	227,828	227,828	-	-	-	227,828	227,828
KT Maritime services	-	196,619	196,619	-	_	-	196,619	196,619
MMA Offshore Vessel Operations P/L	-	796,702	796,702	<u>-</u>	_	-	796,702	796,702
Noble International Finance Company	-	1,183,078	1,183,078	-	_	-	1,183,078	1,183,078
Rigforce Pty Ltd	905,942	711,331	- 194,611	- 194,611	-	711,331	711,331	0
Seafox Asia Pacific Pty Ltd	379,442	397,071	17,629	-	-	379,442	397,071	17,629
Sodexo Timor Unipessoal Ltd	200,125	198,796	- 1,329	-	-	200,125	198,796	- 1,329
SGS Australia P/L	118,400	124,059	5,660	5,364	-	123,763	124,059	296
Total	7,190,121	8,973,361	1,783,240	-139,917	424,475	7,050,204	9,397,836	2,347,632

8.2. Subkontraktor- Penyesuaian oleh Pemerintah

Subkontraktor	Pajak penghasilan	Pajak Keuntungan Cabang	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Pajak Tambahan	Total	Catatan
AMEC Engineering Pty Ltd	-	-	- 325	-	-	- 325	1)
Calidus Process Solutions PTy Ltd	75,378	-	205,024	- 151	- 280,251	-	2)
Clough Amec Pty Ltd	15,242	-	597,776	- 613,019	-	-	3)
Haliburton Aust Pty Ltd	472,563	- 47,489	- 273	-	-	424,800	4)
Rigforce Pty Ltd	-	-	99,988	- 99,988	-	_	5)
Total	563,183	- 47,489	902,190	- 713,157	- 280,251	424,475	

- 1) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke AMEC Engineering Pty Ltd Penyesuaian sesuai dengan biaya bank yang dilaporkan secara tidak benar.
- 2) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke Calidus Process Solutions PTy Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak.
- 3) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke Clough Amec Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak.
- 4) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke Haliburton Aust Pty Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak dan pembayaran sebesar 418.823USD, 4.340USD dan 1.595USD yang tidak dilaporkan oleh pemerintah. Kami memperoleh dokumentasi yang mendukung pembayaran ini, yang disediakan oleh entitas.

5) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke Rigforce Pty Ltd Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah menurut jenis pajak.

8.2. Subkontraktor- Penyesuaian oleh Subkontraktor

Subkontraktor	Pajak penghasilan	Pajak Keuntungan Cabang	Pemotongan Pajak Upah	Pemotongan Pembayaran Pajak	Pajak Tambahan	Total	Catatan
Calidus Process Solutions PTy Ltd	-		75	-	-	75	1)
Haliburton Aust Pty Ltd	49,853		278	- 170	-	49,405	2)
Rigforce Pty Ltd	- 75,299		119,021	- 290	-	- 194,611	3)
SGS Australia P/L	5,208		- 155	-	-	5,364	4)
Total	- 20,238		- 119,219	- 460	-	- 139,917	

1) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan oleh Calidus Process Solutions PTy Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan tagihan bank yang dilaporkan secara tidak benar oleh entitas.

2) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke Haliburton Aust Pty Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan tagihan bank yang dilaporkan secara salah oleh entitas. Entitas juga gagal melaporkan pembayaran sebesar 50.015 USD pada Maret / 2018 atas Pajak Penghasilan terkait tahun 2017. Seharusnya hal ini dilaporkan oleh entitas dan dilaporkan oleh Kemenkeu pada Juli / 2018. Kami memperoleh dokumentasi yang mendukung pembayaran ini, yang disediakan oleh entitas.

3) Penyesuaian jumlah yang dilaporkan ke Rigforce Pty Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan tagihan bank yang dilaporkan secara salah oleh entitas. Entitas juga melaporkan dua pembayaran pada Januari 2019 (7,418 USD dan 111,438 USD), pembayaran April 2019 (290 USD) dan pembayaran Juni 2019 (75,299 USD), yang seharusnya tidak dilaporkan.

4) Penyesuaian atas jumlah yang dilaporkan ke SGS Australia P / L

Penyesuaian tersebut terkait dengan dua pembayaran pada Jan / 2018 yang tidak dilaporkan oleh entitas (6,414 USD dan 7,223 USD) dan dua pembayaran tahun 2019 yang seharusnya tidak dilaporkan (USD6.259 dan USD2.014).

8.2. Subkontraktor - Hasil rekonsiliasi

Jumlah total perbedaan awal direpresentasikan sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah dalam US \$	% Jumlah akhir yang dilaporkan Pemerintah
Jumlah total yang dilaporkan awalnya oleh Pemerintah	8,973,361	95%
Penyesuaian oleh entitas Pemerintah	424,475	5%
Jumlah pajak final yang dilaporkan oleh Pemerintah	9,397,836	
Jumlah total yang dilaporkan awalnya oleh Subkontraktor Penyesuaian oleh entitas Jumlah pajak final yang dilaporkan oleh	7,190,121	77% -1%
Subkontraktor	7,050,204	
Entitas tidak menjawab	3,129,170	33%
Jumlah tidak berdamai	2,347,632	25%

Dari 17 entitas dalam cakupan, kami belum memperoleh jawaban untuk 6 entitas: Cameron Services International Pty Ltd, Compass Group Australia, Kakivik Asset Management LLC, KT Maritime services, MMA Offshore Vessel Operations Pty Ltd dan Noble International Finance Company.

Rincian pembayaran pajak untuk entitas yang tidak menjawab adalah sebagai berikut:

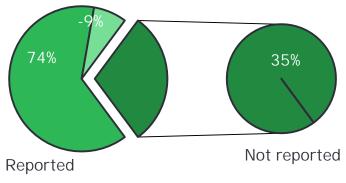
Deskripsi	Dilaporkan oleh Pemerintah
Pajak penghasilan	498,116
Pemotongan Pajak Upah	2,226,368
Pemotongan Pembayaran Pajak	404,685
Total	3,129,170

- Jumlah total yang tidak dilaporkan oleh entitas adalah 3.129.170 USD dan dijelaskan oleh entitas di halaman berikutnya.
- Jumlah total yang tidak dikonsiliasi adalah 2.347.632 USD (termasuk entitas yang tidak melapor). Jumlah ini tidak divalidasi karena kami tidak dapat memperoleh jawaban dari masing-masing entitas.

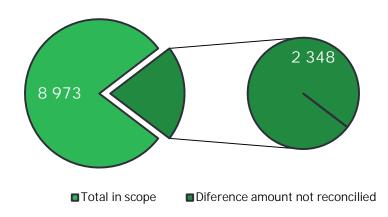
8.2. Subkontraktor- Perbedaan yang tidak direkonsiliasi

Berdasarkan hasil akhir, perbedaan yang tidak direkonsiliasi adalah sekitar USD 2.347.632 (tidak memperhitungkan entitas yang tidak melapor). Jumlah tersebut mewakili sekitar 0,42% dari total pendapatan perusahaan ekstraktif.

Unreconciled amount



■Revenue reconciled ■Revenue unreconciled ■Not reported



Perusahaan Subkontraktor	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh Pemerintah	Hasil setelah Rekonsiliasi
Perbedaan tidak direkonsiliasi			
Babcock Offshore Services	1,164,394	322,101	- 842,293
Caltech Unipessoal Lda	646,928	644,045	- 2,882
CAPE AUSTRALIA ONSHORE	487,591	532,745	45,154
Haliburton Aust Pty Ltd	575,851	577,739	1,888
Seafox Asia Pacific Pty Ltd	379,442	397,071	17,629
Sodexo Timor Unipessoal Ltd	200,125	198,796	- 1,329
SGS Australia P/L	123,763	124,059	296
Perbedaan Total tidak direkonsiliasi		_	- 781,538
			3,129,169
Tidak dilaporkan			
Cameron Services Int. Pty Ltd	-	111,773	111,773
Compass Group Australia	-	613,168	613,168
Kakivik Asset Management LLC	-	227,828	227,828
KT Maritime services	-	196,619	196,619
MMA Offshore Vessel Operations P/L	-	796,702	796,702
Noble International Finance Company	-	1,183,078	1,183,078
Jumlah Tidak dilaporkan		_	3,129,170
		_	
Total		=	2,347,632

8.3. Biaya Pipa

Hasil rekonsiliasi dari Pipeline Fee:

Nama Perusahaan	Aus Aid (AUD \$) - dilaporkan oleh AusAid	Aus Aid (USD \$) - dilaporkan oleh BCTL	Hasil permintaan awal	Penyesuaian selama Rekonsiliasi	Hasil setelah Rekonsiliasi
AUSAID	8,000,000	5,944,000		-	
Total	8,000,000	5,944,000		-	

Biaya Saluran Pipa dilaporkan oleh AusAid sejumlah 8.000.000 AUD (Dolar Australia) dan Banco Central de Timor Leste (BCTL) melaporkan 5.944.000 USD (Dolar Amerika).

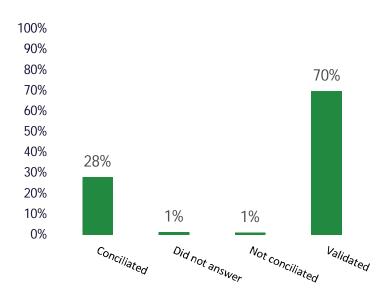
Karena mata uang yang berbeda, kami telah menghubungi BCTL untuk klarifikasi mengenai nilai tukar yang dipertimbangkan pada tanggal pembayaran.

Faktanya, nilai tukar dianggap 0,743, yang berarti 8.000.000 AUD setara dengan 5.944.000 USD pada tanggal pembayaran, yang merupakan nilai yang dilaporkan oleh BCTL.

8.4. Hasil rekonsiliasi Kemenkeu - ringkasan

Ringkasan hasil rekonsiliasi:

HASII REKONSII IASI

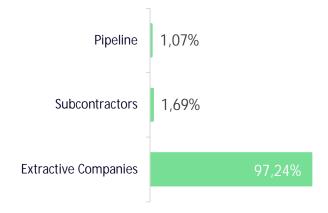


Grafik di atas menunjukkan jumlah yang tidak direkonsiliasi dalam Dolar AS, untuk setiap kategori. Jumlah yang tidak didamaikan sekitar USD 2,4 juta, karena perbedaan utama muncul dari entitas yang tidak melapor.

Selama proses rekonsiliasi, total penerimaan dari entitas Pemerintah telah meningkat 0,1% dan hanya 0,44% dari jumlah yang semula dilaporkan oleh pemerintah tidak dapat didamaikan.

Pembayaran dari kegiatan ekstraktif Migas mewakili 97,24% dari total penerimaan yang divalidasi dan jumlah subkontraktor yang divalidasi mewakili 1,69% dari jumlah penerimaan yang divalidasi.

% PENERIMAAN DIvalidasi BERDASARKAN JENIS PERUSAHAAN



8.5. Pembayaran di sektor pertambangan

Kami telah menghubungi ANPM untuk mengetahui perusahaan mana yang membayar di atas ambang batas (100.000 USD) pada tahun 2018, yang dipadatkan di tabel berikutnya.

Nama Pemrakarsa	Total
COVEC-CRFG JV Lda.	1,000,000
Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	221,412
Sinohydro Corporation Limited, R.P	136,200

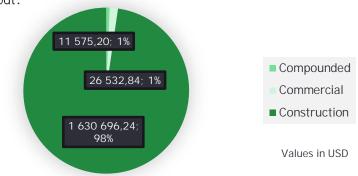
Kami juga telah memperoleh rincian pembayaran yang diterima oleh entitas pemerintah ini pada tahun 2018 (lihat Lampiran D).

Sebagaimana disebutkan dalam bab 3.4, entitas tersebut tidak memiliki kegiatan di sektor pertambangan, hanya di bidang konstruksi. Bahkan, ANPM memverifikasi bahwa ketiga perusahaan tersebut sedang membangun jalan untuk penambangan tetapi bukan bagian dari sektor pertambangan itu sendiri. Menurut Ijazah Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November, kegiatan tersebut diatur sebagai pertambangan, itulah sebabnya ANPM melaporkannya di sektor pertambangan.

Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh ANPM mengenai pembayaran di sektor pertambangan, asalnya adalah 91% (1.510.499 USD) internasional dan 9% (158.305 USD) lokal.



Selanjutnya ada tiga jenis kegiatan: konstruksi komersial dan komplek. Yang pertama terkait dengan entitas yang membayar bahan bangunan untuk menyelesaikan proyek yang terkait dengan pertambangan, dan yang kedua terkait dengan entitas yang menjual bahan ke publik untuk tujuan komersial. Yang terakhir berhubungan dengan campuran dari kedua aktivitas tersebut.



Mengenai jenis pembayaran, ada pembayaran izin pertambangan (termasuk biaya pertambangan dan izin) dan pembayaran kompensasi (termasuk biaya yang dibayarkan untuk kegiatan yang tidak sah).



8.5. Pembayaran di sektor pertambangan

Jenis kegiatan: Kegiatan Komersial



Jenis pembayaran: Izin Pertambangan

Pembayaran izin pertambangan merupakan 11% dari total pembayaran, sejumlah 178.882 USD. Pembayaran ini termasuk biaya penambangan dan biaya lisensi.

Biaya Penambangan (USD)	Biaya Lisensi (USD)	Total
160,882.60	18,000.00	178,882.60

Dibandingkan dengan 2017, biaya penambangan turun 238.197 USD, yaitu 57%. Juga, biaya lisensi turun sebesar 3.500 USD, yang setara dengan -16%. Biaya penambangan meningkat sebesar 234.697 USD, atau sebesar -59%.



Terkait izin pertambangan, ada satu entitas yang membayar fee di atas 100.000 USD, namun kegiatannya hanya mencakup konstruksi dan tidak ada kaitannya dengan ekstraksi pertambangan.

Jenis pembayaran: Kompensasi

Jenis pembayaran ini tidak pernah terjadi hingga 2017 karena fakta bahwa itu hanya diperlukan sebagai konsekuensi dari Art. 42.2 dari Ijazah Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November yang mensyaratkan Ganti Rugi Kegiatan Pertambangan Tidak Resmi.

Pada tahun 2018, jumlah tersebut mencapai 1.489.921,68 USD (617.489,50 USD pada tahun 2016), termasuk dua entitas di atas 100.000 USD, yang aktivitasnya juga terkait dengan konstruksi.



Kepemilikan yang Bermanfaat

Menurut persyaratan EITI 2.5, disarankan agar informasi tersedia untuk umum mengenai pemilik manfaat dari entitas perusahaan yang menawar, mengoperasikan atau berinvestasi dalam aset ekstraktif, termasuk identitas pemilik manfaatnya, tingkat kepemilikan dan rincian tentang bagaimana kepemilikan atau kontrol diberikan.

Di Timor Leste, mayoritas Operator yang berada dalam lingkup (bekerja di JPDA dan area TLEA) adalah anak perusahaan dari perusahaan publik di Bursa Efek. Bagi mereka diharapkan sumber dan informasi kepemilikannya sudah tersedia.

Namun kebijakan dan praktik hukum terkait pengungkapan Beneficial Ownership (Migas, dan pertambangan) baru sebagian dikeluarkan oleh pemerintah.

Hambatan hukum dan praktis dapat muncul di sektor-sektor ini - tergantung pada kedalaman informasi Beneficial Ownership yang akan diungkapkan.

Pada Maret 2017, Multi-Stakeholder Working Group (MSWG) menerbitkan peta jalan Beneficial Ownership, yang mendokumentasikan kegiatan dan tindakan menuju pengungkapan kepemilikan manfaat penuh dari perusahaan ekstraktif di negara tersebut.

Timor-Leste



Pada Oktober 2019, EY Portugal menghasilkan draf Studi Kelayakan tentang Kepemilikan Manfaat dengan rekomendasi terkait penerapan BO di Timor-Leste. Laporan ini selesai pada Juli 2020.



9. Daftar perusahaan ekstraktif (terdaftar) dan perusahaan pemilik utamanya

Nama Perusahaan	Pemilik Manfaat Tertinggi	Catatan	Link
Eni JPDA 03-13 Limited Eni JPDA 06-105 Pty Ltd Eni JPDA 11-106 B.V. Eni Timor-Leste S.p.A	Eni S.p.A.	Eni terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE) dan FTSE MIB di Bursa Efek Milan	https://www.eni.com/en_IT/investors/e ni-on-the-stock-markets.page
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd ConocoPhillips JPDA Pty Ltd ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd	ConocoPhillips	ConocoPhillips adalah perusahaan publik AS yang terdaftar di Bursa Efek New York	http://www.conocophillips.com/investo r-relations/
Inpex Timor Sea, Ltd Inpex Sahul Ltd	INPEX CORPORATION	INPEX CORPORATION memegang 100% saham INPEX Timor Sea, Ltd; INPEX CORPORATION memegang 100% saham INPEX Sahul, Ltd.	http://www.inpex.co.jp/english/ir/shar eholder/stock.html
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	Santos Ltd	Santos adalah perusahaan gas alam Australia. Didirikan pada tahun 1954.	https://www.santos.com/investors/shareholder-information/
TIMOR GAP	TIMOR GAP EP	Badan Usaha Milik Negara	https://www.timorgap.com/databases/ website.nsf/vwAll/Annual%20Reports
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	Tokyo Gas Co. Ltd, Tokyo Electric Power Co. Inc	Tokyo Gas Group adalah grup Jepang.	http://www.tokyo- gas.co.jp/IR/english/stock/holder_e.ht ml
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd	Woodside Petroleum Ltd	Woodside Petroleum (entitas) dimiliki sepenuhnya oleh Woodside Petroleum Ltd, yang juga merupakan perusahaan induk terakhir dari grup perusahaan Woodside. Woodside Petroleum Ltd adalah perusahaan publik Australia yang terdaftar di Bursa Sekuritas Australia	https://www.woodside.com.au/investorss

9. Kepemilikan Manfaat di Timor Leste

Kualitas data:

Untuk 2018, entitas mengikuti rekomendasi IA. Selain itu, MSGW meminta lebih banyak informasi untuk entitas dalam cakupannya. MSGW membagikan template dengan EITI International dan menjamin pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kepatuhan standar EITI. Informasi berikut diminta:

- 1) Rincian yang diperlukan dari BO, yang meliputi nama lengkap, nomor identifikasi, ID pajak, tanggal lahir, kebangsaan, alamat tempat tinggal atau layanan, dan sarana kontak.
- 2) Informasi mengenai apakah BO adalah PEP (Political Exposed Person), anggota keluarga, atau rekan dekat salah satunya.

Tabel berikut adalah bagian dari template yang dikirim ke entitas dalam cakupan Laporan EITI Timor Leste 2018:

Pemilik Manfaat nomor 1 atau, jika tidak ada Manajer Utama	Deskripsi
Nama lengkap	
Informasi ID	
Nomor identifikasi	
Jenis Identifikasi	
Tanggal validitas ID	
Entitas penerbit ID	
Informasi tentang bagaimana kepemilikan dipegang atau k	kendali atas perusahaan dilaksanakan
umlah dibagikan	
% saham	
% dari hak suara langsung	
% hak suara tidak langsung	
Other	
Tanggal ketika bunga menguntungkan diperoleh	
Tanggal	
Sarana kontak	
Informasi Umum	
Nomor Wajib Pajak	
Tanggal lahir	
Kebangsaan sebagaimana tercantum dalam ID	
Negara tempat tinggal permanen	
Negara domisili fiscal Alamat tempat tinggal atau layanan	
Posisi dan peran kantor publik:	
Tanggal ketika kantor diasumsikan:	
Tanggal saat kantor ditinggalkan, jika ada:	

i Laporati Etti Tillioi Leste 2016.	
Political Exposed Person(s)	
Apakah pemilik manfaat adalah Politically Exposed Person (PEP)?	lya / Tidak
Apakah pemilik manfaat adalah anggota keluarga PEP?	lya / Tidak
Jika ya	
Nama:	
Hubungan:	
Tanggal lahir:	
Tempat Lahir:	
Kebangsaan:	
Posisi yang membuat Anda memenuhi syarat sebagai PEP:	

Apakah pemilik manfaat adalah Orang yang dikenal sebagai rekan dekat PEP?	lya / Tidak
Jika ya	
Nama:	
Hubungan:	
Tanggal lahir:	
Tempat Lahir:	
Kebangsaan:	
Posisi yang membuat Anda memenuhi syarat sebagai PEP:Posisi yang membuat Anda	
memenuhi syarat sebagai PEP: ETTI Timor-Les	te - 2018 Report 97

9. Kepemilikan Manfaat di Timor Leste

Definisi:

Definisi BO dan PEP telah disetujui oleh MSGW dan diungkapkan pada template yang dikirimkan ke entitas dalam cakupan Laporan EITI Timor Leste 2018, sebagai berikut:

Definisi kepemilikan manfaat

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan atau orang-orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu entitas, dan atau orang perseorangan atau orang-orang yang atas namanya suatu transaksi atau kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya kriteria perikut: pengendalian:

Jika rekanan adalah badan hukum perusahaan, pemilik manfaatnya adalah sebagai berikut:

Kriteria penentuan kepemilikan atau penguasaan:

a) Kriteria berdasarkan Modal

Orang perseorangan atau orang-orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan, secara angsung atau tidak langsung, lebih dari 25% modal saham atau hak suara dari badan hukum tersebut; Orang perseorangan atau orang-orang yang, meskipun tidak memiliki atau secara langsung atau tidak angsung mengendalikan lebih dari 25%, secara bersama-sama memiliki lebih dari 25% modal saham atau hak suara, ketika mereka menjadi anggota keluarga atau memiliki hubungan dekat yang membenarkan penilaian bersama; Orang perseorangan atau orang-orang yang memegang posisi manajemen puncak, setelah semua kriteria lain habis dan asalkan tidak ada alasan untuk curiga. Harap dicatat bahwa orang perseorangan didefinisikan sebagai orang Timor atau orang lain tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan mereka.

b) Kriteria berdasarkan indikator pengendalian lainnya: Pengendalian mayoritas suara yang dapat dilakukan dalam rapat pemegang saham biasa; Suara yang cukup untuk menjalankan pengaruh dominan dalam rapat pemegang saham biasa; Memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota badan administrasi, manajemen atau pengawas; Adanya ketentuan kontrak tertentu yang memungkinkan untuk menjalankan pengaruh dominan;

Kriteria Administrasi / Pengendalian yang Efektif: Orang atau perseorangan yang memegang posisi atau posisi manajemen puncak, jika setelah semua cara yang memungkinkan telah habis dan asalkan tidak ada alasan untuk mencurigai, tidak ada orang yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria di atas, atau jika ada apakah ada keraguan bahwa orang atau beberapa orang yang diidentifikasi adalah pemilik manfaat;

Jika rekanan adalah badan hukum non-korporat (Yayasan, Perwalian, atau Asosiasi) atau pusat kepentingan kolektif tanpa badan hukum, pemilik manfaat adalah sebagai berikut:

Pendiri (settlor)

Administrator (wali amanat, dalam kasus dana perwalian)

Kurator, jika ada;

Penerima manfaat atau, jika belum ditentukan, kategori orang yang kepentingan utamanya telah didirikan atau aktif entitas.

Setiap orang perseorangan lainnya yang memiliki kendali terakhir atas entitas melalui partisipasi angsung atau tidak langsung atau melalui cara lain.

"Definisi Politically Exposed Person (PPE) serta "Anggota Keluarga Dekat" dan "Orang yang dikenal sebagai rekan dekat"

Orang-orang politik adalah orang-orang yang telah mengadakan, atau telah melakukan dalam 12 bulan terakhir, di negara atau yurisdiksi mana pun, fungsi publik yang lebih tinggi berikut ini:

- . Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Anggota Pemerintahan yaitu Menteri, Sekretaris, dan Sekretaris Negara atau yang sederajat;
- Anggota parlemen;
- iii. Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Tata Usaha, Pengadilan Auditor, dan anggota mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan badan peradilan tingkat tinggi Jainnya dari Negara lain dan organisasi internasional;
- v. Perwakilan Republik dan anggota badan otonom otonom;
- v. Ombudsman, Anggota Dewan Negara, dan anggota Komisi Perlindungan Data Nasional, Dewan Tinggi Kehakiman, Dewan Tinggi Pengadilan Administrasi dan Perpajakan, Kejaksaan Agung, Dewan Tinggi Kejaksaan, Dewan Tinggi Pertahanan Nasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Badan Pengatur Komunikasi Sosial;
- vi. Kepala misi diplomatik dan pos konsuler;
- vii. Pejabat Umum Angkatan Bersenjata dalam pelayanan yang efektif;
- viii. Presiden dan anggota dewan kota dengan fungsi eksekutif dewan kota;
- ix. Anggota badan administrasi dan pengawas bank sentral, termasuk Bank Sentral Eropa;
- k. Anggota badan administrasi dan pengawas lembaga publik, yayasan publik, perusahaan umum dan badan administratif independen, apa pun sebutannya;
- ki. Anggota badan administrasi dan pengawas lembaga publik, yayasan publik, perusahaan umum dan badan administratif independen, apa pun sebutannya;
- kii. Anggota pengurus partai politik di tingkat nasional atau daerah;
- kiii. Direktur, wakil direktur dan anggota dewan direksi atau orang yang menjalankan fungsi setara dalam organisasi internasional,

Anggota keluarga dekat adalah:

- . Keturunan langsung dan keturunan dari orang yang terpapar secara politik;
- ii. Pasangan atau orang yang belum menikah dari orang yang terpapar politik dan dari orang-orang yang disebutkan dalam sub-item sebelumnya;

Orang yang dikenal sebagai rekan dekat:

- l. Setiap orang perseorangan, yang dikenal sebagai rekan pemilik, dengan orang yang terpapar secara politik, badan hukum atau pusat kepentingan kolektif tanpa badan hukum;
- ii. Setiap orang perseorangan yang memiliki modal saham atau memiliki hak suara dari badan hukum, atau aset dari pusat kepentingan bersama tanpa badan hukum, yang dikenal sebagai bemilik manfaat yang terkena dampak politik:
- iii. Setiap orang perseorangan, yang dikenal memiliki hubungan korporat, komersial atau profesional dengan orang yang terpapar secara politik;

Pengarusutamaan

Persyaratan pengungkapan EITI dipenuhi melalui pelaporan perusahaan dan pemerintah yang rutin dan tersedia untuk umum. Ini dapat mencakup memungkinkan akses ke data EITI melalui pelaporan keuangan publik, laporan tahunan perusahaan atau badan pemerintah, portal informasi, dan inisiatif data terbuka dan kebebasan informasi lainnya. Perhatian utama adalah memastikan bahwa data yang dipublikasikan komprehensif dan dapat diandalkan.

Tujuan utama, dan metodologi yang diharapkan dapat digunakan untuk menerbitkan Laporan EITI, adalah agar data dapat dengan mudah ditemukan dalam satu sumber dengan keandalan yang tinggi. Transparansi adalah kunci untuk sektor ekstraktif dan memiliki banyak sumber data dapat mempersulit pengumpulan dan keakuratan informasi. Pengarusutamaan di Timor Leste harus memungkinkan untuk menyediakan pengungkapan data EITI yang lebih fleksibel, dalam waktu yang lebih singkat, dan dengan informasi yang dapat dipercaya, menghindari duplikasi dan informasi masa lalu.

Timor-Leste





10. Pengarusutamaan di Timor Leste

Timor Leste bergabung dengan EITI pada tahun 2008 dan sejak itu telah menerbitkan 10 laporan, dengan kemajuan yang memuaskan, menurut situs web EITI.

Negara tersebut mengikuti jalur yang kuat untuk meningkatkan transparansi data yang diungkapkan oleh negara dan oleh entitas. Memang, EITI menganggap Timor Leste sebagai pionir pengarusutamaan di Asia karena diluncurkannya Portal Transparansi pada tahun 2011 oleh pemerintah. Portal ini mengungkapkan informasi yang terus diperbarui terkait data pemerintah, seperti anggaran dan pengeluaran nasional.

Sumber: EITI Timor Leste: https://eiti.org/timorleste & Portal Transparansi: http://www.transparency.gov.tl/english.html

Selain itu, beberapa entitas nasional merilis laporan tahunan dengan laporan keuangan yang diaudit, serta data bulanan kepada publik. Instansi pemerintah utama yang menampilkan data keuangan dan non keuangan, setidaknya setiap tahun, adalah ANPM (Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais), Timor Gap dan Bank Sentral. Entitas yang disebutkan menerbitkan laporan tahunan dengan laporan keuangan yang diaudit dan ANPM juga menyediakan situs web dengan angka produksi bulanan.

Selain itu, karena perbedaan kecil yang tidak direkonsiliasi dalam laporan tahunan EITI dan ukuran sektornya, tercipta harapan pada sekretariat EITI Internasional bahwa Timor Leste adalah salah satu kandidat kuat untuk menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan arus utama.

Lebih lanjut, Timor Leste telah meningkatkan penerbitan data dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas selama bertahun-tahun, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016. Faktanya, negara tersebut telah menyewa EY Portugal untuk menerbitkan Studi Kelayakan tentang Mengarusutamakan kepatuhan saat ini dengan persyaratan dan menyarankan peta jalan dengan rekomendasi, biaya, dan jadwal. Upaya Timor Leste terlihat sangat jelas dan kemajuannya hanya diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut persyaratan 6 dari pengeluaran sosial Standar EITI dan dampak sektor ekstraktif terhadap ekonomi harus diungkapkan untuk membantu pembaca menilai dampak dan hasil sosial dan ekonomi yang diciptakan industri ini di negara. Persyaratan tersebut meliputi:

- Pengeluaran sosial dan lingkungan oleh perusahaan
- Pengeluaran kuasi fiskal BUMN
- Kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian
- Dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif.

Timor-Leste





Komitmen konten lokal (Wajib)

Pengeluaran sosial tidak dianggap sebagai pengeluaran wajib bagi perusahaan. Namun, ada pengeluaran yang akan diperkirakan dalam rencana tahunan yang disepakati antara Operator dan ANPM, yang dianggap sebagai biaya yang dapat diperoleh kembali dan dikendalikan oleh ANPM. (komitmen lokal dalam mata uang atau Konten Lokal - LC).

Pengeluaran tersebut direkomendasikan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) dan disetujui sebelumnya dalam Program Kerja & Anggaran (WPB) yang disetujui.

Kepada semua pengeluaran sosial lainnya (sukarela) MSWG telah memutuskan untuk diikutsertakan dalam proses pengumpulan data dan melakukan pelaporan sepihak dari perusahaan untuk meningkatkan kontribusi mereka.

Ringkasan laporan ini adalah sebagai berikut:

Entitas Ekstraktif	Jumlah dalam USD Jumlah yang Dilaporkan
ConocoPhillips	21,417,105
Total	21,417,105

Pengeluaran yang dilaporkan oleh Badan Pemerintah

Satu entitas Pemerintah melaporkan Pengeluaran Sosial sebagai berikut:

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan	Jumlah dalam USD
Community Project	TIMOR GAP E.P.	137,000
Donation to NGOs/Programs	TIMOR GAP E.P.	5,550
Financial Support for Field Study to DiT student	TIMOR GAP E.P.	700
Total		143,250

Pengeluaran yang dilaporkan oleh TIMOR GAP bersifat sukarela dan dilaporkan secara sepihak oleh BUMN.

Komitmen konten lokal (Wajib)

Perusahaan Minyak dan Gas yang beroperasi di TLEA dan JPDA direkomendasikan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi atau dipasok oleh penyedia di Timor-Leste (dan Australia untuk JPDA). Di TLEA, perusahaan minyak & gas diharuskan memberikan preferensi dalam mempekerjakan warga negara Timor-Leste dan pelatihan orang Timor. Untuk JPDA, perusahaan didorong untuk mempekerjakan dan melatih orang Timor.

Jumlah total dari komitmen wajib telah dikonfirmasi oleh ANPM, namun pemisahan dari ANPM dan Conocophilips berbeda. Untuk tujuan laporan ini, kami menerbitkan disagregasi dari Conocophilips. Komitmen lokal yang dilaporkan oleh ConocoPhillips berdasarkan PSC pasal 5.4 adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam USD			
Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima"	Pembayaran Entitas Ekstraktif
Others - COP Offshore Timor-Leste Employees	Conocophilips	COP Offshore Timor-Leste Employees and employee related services companies	1,172,375
Others - Local Goods & Services	Conocophilips	Various vendors	4,483,182
Others - Contractors' Timor-Leste Employees	Conocophilips	Various vendors	7,699,504
Others - Contractors' Timor-Leste Goods & Services	Conocophilips	Various vendors	6,975,320
Others - COP Dili Office Employees	Conocophilips	COP Dili Office Employees and employee related services companies	755,309
Others - Local Goods & Services	Conocophilips	Various vendors	331,414
Total			21,417,105

ANPM bekerja sama dengan Operator di JPDA dan TLEA untuk mengukur kinerja Kandungan Lokal dalam hal partisipasi lokal dalam pengadaan barang dan jasa serta pelatihan dan pekerjaan untuk kegiatan perminyakan di kedua yurisdiksi.

Perhatikan bahwa kami telah menghubungi ANPM dan COPA (Conocophilips), dengan jawaban ANPM bahwa ANPM menerima laporan konten lokal tahunan dengan pemilahan yang berbeda dari laporan tahunan dari Conocophilips, karena jumlah totalnya sama di kedua laporan.

Pengeluaran sukarela

Pengeluaran yang dilaporkan oleh Kontraktor:

Pengeluaran sukarela dilaporkan oleh Operator dan dikonfirmasi oleh ANPM.

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima"	Pembayaran Entitas Ekstraktif
Community Project - SESIM World Science Day event	Conocophilips	National Commission of UNESCO in TL	70,000
Government Initiative - E&I vocational training	Conocophilips	CEGELEC and CNEFP Tibar	1,011,266
Government Initiative - Innovative Business Plan Competition	Conocophilips	IADE	2,093
Donation to NGOs/Programs - International Economic Symposium	Conocophilips	AEMTL	3,550
Scholarship Programs - Fullbright-SERN Scholarship	Conocophilips	IIE	76,949
Scholarship Programs - JESUIT Scholarships Program	Conocophilips	Fundacao Companhia De Jesus	60,000
Others - 4th July Celebration	Conocophilips	US Embassy	10,000
Others - COP Offshore Timor-Leste Employee Training	Conocophilips	Various vendors	388,768
Others - Contractors' Timor-Leste Employee Training	Conocophilips	Various vendors	2,206,380
Others - COP Dili Office Employee Training	Conocophilips	Various vendors	56,116
Community Project	TIMOR RESOURCES PTY LT	D Labarai Water Project	18,000
Government Initiative - Project	TIMOR RESOURCES PTY LTD Tour de Timor		25,000
Employment	TIMOR RESOURCES PTY LT	D 225 local people	445,914
Use of local companies and goods and services	TIMOR RESOURCES PTY LT	D Local cTL ompanies	987,757
Total			5,361,794

Pengeluaran Sukarela - Subsidi dan Dana untuk BUMN

Pengeluaran yang dilaporkan oleh Kontraktor:

Pengeluaran sukarela dilaporkan oleh Operator dan dikonfirmasi oleh ANPM.

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima"	Pembayaran Entitas Ekstraktif
NGOs Programs (Water, Sanitation, Health, Sports Events) - Nursing Development & Pathology Program	Conocophilips	St John of God	250,415
NGOs Programs (Water, Sanitation, Health, Sports Events) - Mother & Child Health Program	Conocophilips	Alola Foundation	70,000
NGOs Programs (Water, Sanitation, Health, Sports Events) - Reforestation Project	Conocophilips	NGO Santalum	40,798
NGOs Programs (Water, Sanitation, Health, Sports Events) - ROMAC Emergency Flight	Conocophilips	Rotary Liaison Office in TL	14,881
Support to National Event - First Lady Fun Run	Conocophilips	Rotary Club of Dili	15,012
Total			391,106

11. Pengeluaran lainnya

Pengeluaran lingkungan

Pengeluaran yang dilaporkan oleh Kontraktor:

Pengeluaran lingkungan dilaporkan oleh Operator dan dikonfirmasi oleh ANPM.

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima"	PSC	Amount in USD Pembayaran Entitas Ekstraktif
Payment for environmental license/permit	TIMOR RESOURCES PTY LTD	SMC	А	112,000
Baseline Studies/HSE land reports	TIMOR RESOURCES PTY LTD	Various vendors	Α	59,620
Others	TIMOR RESOURCES PTY LTD	Various vendors	С	72,152
Total				243,772

Pengeluaran kuasi-fiscal

Pengeluaran kuasi-fiskal mencakup pengaturan di mana BUMN melakukan pengeluaran sosial publik seperti pembayaran untuk layanan sosial, infrastruktur publik, subsidi bahan bakar dan pembayaran hutang nasional, dll. Di luar proses anggaran nasional.

Tak satu pun dari entitas dalam ruang lingkup melaporkan pembayaran terkait jenis pengeluaran ini.

Rekomendasi

Kurangnya Hukum EITI:

Seperti yang direkomendasikan sebelumnya, meskipun Timor-Leste telah mematuhi EITI sejak 2008, kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses EITI masih harus dibuat.

Kami sangat menganjurkan diberlakukannya Undang-Undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pemahaman dan pedoman yang lebih baik tentang batasan tertentu (yaitu kerahasiaan PSC dan / atau desegregasi produksi berdasarkan komoditas). Hal ini tidak teridentifikasi pada pekerjaan yang dilakukan untuk laporan ini, tetapi dapat menjadi masalah di masa mendatang.

Timor-Leste





12. Rekomendasi

Publikasi statistik dan informasi tentang industri ekstraktif

Standar EITI mengatur tentang pengungkapan informasi kontekstual kegiatan dan regulasi di industri ekstraktif.

Saat ini, tampaknya Sekretariat TL-EITI tidak memiliki database yang komprehensif termasuk semua perusahaan ekstraktif yang beroperasi di sektor minyak dan pertambangan karena aliran pendapatan dan jumlah koresponden per tahun, semua operator ekstraktif, informasi kontekstual dan statistik.

Informasi kontekstual dalam laporan ini merujuk ke berbagai sumber yang tersebar di seluruh sektor publik. Analisis tertentu dibatasi karena tidak tersedianya data statistik di sektor tersebut. Jika tersedia, statistik nasional mencakup informasi untuk sektor yang lebih luas.

Sekretariat EITI harus memastikan bahwa ada database lengkap perusahaan ekstraktif agar dapat mengidentifikasi dengan yakin semua perusahaan yang melakukan pembayaran material. Sekretariat EITI tidak perlu memelihara database tersebut, melainkan untuk memastikan bahwa ada database tersebut di dalam pemerintahan dan disiapkan dengan benar, serta terkini, dan lengkap. Sekretariat kemudian harus bekerja sama dengan Badan Pemerintah untuk memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai secara teratur dan memperbarui basis datanya.

Basis data dapat diperluas lebih lanjut untuk memasukkan informasi berguna lainnya untuk statistik di sektor ini seperti: volume produksi, investasi, pengeluaran sosial, dan pembayaran lingkungan, yang dapat dikumpulkan dan dikonsolidasikan dan yang akan menjadi dasar pelaporan statistik dan fakta tahunan. industri.

Kami juga merekomendasikan agar MSWG membantu Sekretariat dengan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa database yang komprehensif dan terkini dari semua perusahaan ekstraktif telah disiapkan.

Kepemilikan yang Menguntungkan & Pengarusutamaan

Menurut Persyaratan EITI 2.5, disarankan agar negara-negara yang patuh dengan EITI memiliki daftar pemilik manfaat dari entitas perusahaan yang menawar, mengoperasikan atau berinvestasi dalam aset ekstraktif, termasuk identitas pemilik manfaatnya (s) dan tingkat kepemilikan.

Saat ini, tidak ada database yang komprehensif dan tersedia untuk umum tentang Beneficial Ownership yang sejalan dengan Standar EITI. Negara tidak memiliki daftar publik (daftar perusahaan) dengan informasi dasar tentang entitas perusahaan.

Hukum, peraturan dan kontrak semuanya harus membangun persyaratan untuk pengungkapan Beneficial Ownership, sehingga ini menjadi persyaratan standar dalam kerangka hukum Timor-Leste. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan definisi dan ambang batas pengungkapan kewajiban kepemilikan manfaat akhir di sektor pertambangan dan minyak dan gas.

Namun, hingga saat ini, diperkirakan tidak ada dampak signifikan karena fakta bahwa hampir semua entitas ekstraktif yang terdaftar adalah informasi yang tersedia (lihat bagian Beneficial Ownership).

Seperti disebutkan sebelumnya, Timor Leste menyewa EY Portugal untuk konsultasi studi kelayakan guna mengidentifikasi peta jalan untuk mengimplementasikan reformasi regulasi yang bertujuan membawa aturan dan regulasi pengungkapan Timor-Leste sesuai dengan standar yang dapat diterima secara internasional. Selain itu, negara tersebut juga menyewa EY Portugal untuk studi kelayakan tentang pengarusutamaan, terkait pemenuhan persyaratan Standar EITI. Dalam kedua studi kelayakan tersebut, kami telah membuat beberapa rekomendasi yang akan sangat membantu transparansi di Timor Leste.

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah progresif atas rekomendasi saat ini dan sebelumnya yang disarankan oleh EY, namun pembentukan reformasi regulasi harus menjadi dukungan yang paling sesuai.

EITI Timor-Leste – 2018 Report | 108

12. Pertimbangan lainnya

Ketentuan kerahasiaan dalam PSC

Model PSC yang digunakan oleh Timor-Leste berisi ketentuan kerahasiaan yang mencegah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan operasi O&G oleh kedua pihak kepada publik, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Lampiran F Model PSC berisi ketentuan kerahasiaan yang mencegah pengungkapan informasi terbaru (kurang dari dua tahun) tentang informasi sensitif komersial tertentu.

Namun, ringkasan model PSC telah tersedia untuk publik di situs ANPM.

Jika undang-undang EITI berada di bawah persetujuan pemerintah, kami merekomendasikan bahwa undang-undang itu mencakup persyaratan yang diperlukan untuk memungkinkan pengungkapan kewajiban pelaporan EITI pada operator dan perwakilan Timor-Leste.

12. Rekomendasi

Tindak lanjut dari rekomendasi Laporan EITI sebelumnya (lanjutan)

No 1	Isu Kurangnya hukum EITI	Detail masalah Kami mencatat bahwa meskipun laporan EITI Timor- Leste telah direkonsiliasi selama 10 tahun, kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses EITI masih harus dibuat.	Rekomendasi Kami merekomendasikan diberlakukannya undang-undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses EITI oleh semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proses rekonsiliasi	Status implementasi Laporan EITI Timor-Leste 2018 (Ya / Tidak / Sedang Berlangsung) Tidak
2	Database Timor-Leste- EITI	Tampaknya hingga saat ini, Sekretariat Timor-Leste-EITI tidak memiliki database yang komprehensif dari semua perusahaan ekstraktif yang beroperasi di sektor minyak. Kami memahami bahwa situasi ini muncul karena tidak adanya komunikasi formal antara Sekretariat EITI dan Badan Pemerintah terkait dengan perusahaan minyak yang beroperasi di sektor perminyakan. Dalam beberapa kasus, melakukan kontak dengan perusahaan ekstraktif bisa jadi sulit karena tidak ada rincian kontak yang tersedia.	memastikannya memperoleh informasi yang memadai secara teratur dan memperbarui basis datanya. Untuk tujuan ini, kami yakin sangat penting bahwa setiap pendatang baru di sektor minyak terdaftar di Sekretariat Timor- Leste-EITI sebagai bagian dari proses	Tidak

Lampiran

Timor-Leste





A. Perusahaan di Sektor Migas

	Entity
AMECEngineeringPtyLtd	Kakivik Asset Management LLC
Australia International Perto-Cons	Konnekto Unipessoal Lda
Babcock Offshore Services	KT Maritime Services
Brunel Energy	Lloyd Helicopters Pty Ltd
Calidus Process Solutions PTy Ltd	MHS Aviation Ltd
Caltech Unipessoal Lda	MMA Offshore Vesel Operation Pty
CameronServicesInt.PtyLtd	Neptune Marine Service Ltd
Cape Australia Onshore	Noble International Finance Company
Caterpillar of Australia Pty Ltd	Rigforce Pty Ltd
CHC Helicopter Pty Ltd	SANTOS Ltd
Clough Amec Pty Ltd	Seafox Asia Pacific Pty Ltd
Compass Group Australia Pty Ltd	SGS Australia Pty Ltd
Competentia Pty Ltd	Sodexo Timor Unipessoal Ltd
Conoco Phillips (03-12) Pty Ltd	Solar Tubirnes International
Dekra Organization Reliability Limited	Speirs Safeguard Ltd
DRW Safety Solution Limited	Spectrum Asia
ENI Australia Ltd	Timor GAP EP
Fircorft Australia Pty Ltd	Timor Resort P/L Unipessoal
Furmanite Australia Pty Ltd	Timor Resources Pty Ltd
GAP MHS Aviation Ltd	Tokyo Timor Sea Resources
Haliburton Australia Pty Ltd	Total Marine Services
Hertel Modern Pty Ltd	Weathford Australia Pty Ltd
Inpex Timor Sea	Wood Group Australia Pty Ltd
Japan Energy EP JPDA	Woodside Energy Ltd

B. Sektor Mineral 2006-2018

No.	Years	Mining Fee	License Fee	Compensation Unauthorized Activity*	Exploration License - Surface Fee**	Total Amount	Remarks
1.	2006	\$9,642.13	-	N/A	N/A	\$9,642.13	
2.	2007	\$13,058.00	-	N/A	N/A	\$13,058.00	
3.	2008	\$3,420.00	7 -	N/A	N/A	\$3,420.00	
4.	2009	\$61,644.85	\$1,400.00	N/A	N/A	\$63,044.85	
5.	2010	\$89,961.50	\$1,200.00	N/A	N/A	\$91,161.50	
6.	2011	\$71,261.00	\$1,200.00	N/A	N/A	\$72,461.00	
7.	2012	\$42,423.00	\$1,000.00	N/A	N/A	\$43,423.00	
8.	2013	\$37,006.00	\$5,500.00	N/A	N/A	\$42,506.00	
9.	2014	\$188,180.00	\$4,500.00	N/A	N/A	\$192,680.00	
10.	2015	\$228,429.00	\$13,300.00	N/A	N/A	\$241,729.00	
11.	2016	\$260,041.40	\$23,700.00	N/A	N/A	\$283,741.40	
12.	2017	\$395,579.40	\$21,500.00	\$617,489.50	N/A	\$1,034,568.90	
13.	2018	\$160,882.60	\$18,000.00	\$1,489,921.68	N/A	\$1,668,804.28	

Catatan:

Sumber: http://www.anpm.tl/mineral/fees-collected-from-mineral-operator/

^{*} Kompensasi untuk Aktivitas Penambangan Tidak Resmi yang Dibutuhkan berdasarkan Art. 42.2 dari Diploma Ministerial No. 64/2016 tanggal 16 November

^{**} Izin Eksplorasi - Biaya Permukaan Tahunan Disyaratkan berdasarkan Perjanjian Eksplorasi

C. Pembayaran Mineral di 2017

No.	Nama Pemrakarsa	Asal	Jenis Kegiatan	Jenis pembayaran	Kategori Bahan	Biaya Penambangan (USD)	Biaya Lisensi (USD)	Total Biaya yang Dibayar (USD)
1	llatun Unipesoal, Lda.	Local	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 9,364.00	\$ 1,500.00	\$ 10,864.00
2	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 20,850.00	\$ 1,500.00	\$ 22,350.00
3	Jova Construction Unipessoal Lda.	Local	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 4,597.20	\$ 1,000.00	\$ 5,597.20
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 13,875.40	\$ 1,500.00	\$ 15,375.40
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 8,395.20	\$ 500.00	\$ 8,895.20
6	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 66,000.00	\$ 1,500.00	\$ 67,500.00
7	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 16,500.00
8	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 50,700.00	\$ 1,500.00	\$ 52,200.00
9	Chongqing International Construction Corporation, R.P.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 119,808.00	\$ 1,500.00	\$ 121,308.00
10	Mira Mar Bloco Unipessoal Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 11,328.00	\$ 1,500.00	\$ 12,828.00
11	Gorobu Diak Lda.	Local	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 23,400.00	\$ 1,500.00	\$ 24,900.00
12	Shabryca Construction Unipessoal Lda.	Local	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 14,871.00	\$ 1,500.00	\$ 16,371.00
13	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 13,875.40	\$ 1,500.00	\$ 15,375.40
14	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 8,395.20	\$ 500.00	\$ 8,895.20
15	Yefa Unipessoal, Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 6,480.00	\$ 1,500.00	\$ 7,980.00
16	Timor Block Building, Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 8,640.00	\$ 1,500.00	\$ 10,140.00
17	Jonize Construction Unipessoal Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 2,550.00	N/a*	\$ 2,550.00
18	King Construction, Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 5,940.00	N/a*	\$ 5,940.00
19	Timor Block Building, Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 22,489.50	N/a*	\$ 22,489.50

C. Pembayaran Mineral di 2017

No.	Name of Proponent	Asal	Jenis Kegiatan	Jenis pembayaran	Kategori Bahan	Biaya Penambangan (USD)	Biaya Lisensi (USD)	Total Biaya yang Dibayar (USD)
20	Yefa Unipessoal, Ida.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 6,696.00	N/a*	\$ 6,696.00
21	Carya Timor Leste, Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 7,719.26	N/a*	\$ 7,719.26
22	Carya Timor Leste, Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 23,955.44	N/a*	\$ 23,955.44
23	Bohoek Unip., Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 5,625.00	N/a*	\$ 5,625.00
24	Libama Consorcio, Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 15,632.00	N/a*	\$ 15,632.00
25	Jonize Construction Unipessoal Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 18,745.86	N/a*	\$ 18,745.86
26	Jonize Construction Unipessoal Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 10,530.01	N/a*	\$ 10,530.01
27	Fitun Diak Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 21,292.50	N/a*	\$ 21,292.50
28	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 16,800.00	N/a*	\$ 16,800.00
29	Nananiu Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 1,871.25	N/a*	\$ 1,871.25
30	Nananiu Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 4,678.13	N/a*	\$ 4,678.13
31	CSI Company Lda.	International	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 2,509.50	N/a*	\$ 2,509.50
32	CSI Company Lda.	International	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 8,100.00	N/a*	\$ 8,100.00
33	Linatet Unip., Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 25,231.50	N/a*	\$ 25,231.50
34	China Wu Yi Co., Ltd., R.P.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 4,785.60	N/a*	\$ 4,785.60
35	China Wu Yi Co., Ltd., R.P.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 762.75	N/a*	\$ 762.75
36	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 200,000.00	N/a*	\$ 200,000.00
37	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 200,000.00	N/a*	\$ 200,000.00
38	Nobre Labadain Unip., Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 11,575.20	N/a*	\$ 11,575.20
				Total Penerimaan Pendapatan yang Disetor untuk Tahun Ini		\$ 1,013,068.90	\$ 21,500.00	\$ 1,034,568.90

Disediakan oleh ANPM

D. Pembayaran Mineral pada 2018

No.	Nama Pemrakarsa	Asal	Jenis Kegiatan	Jenis pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar
1	Pantarhei Unipessoal Lda.	Local	Commercial	Prospecting	Construction Material	\$ 500,00
2	Timor Surveying & Mapping Lda.	Local	Commercial	Prospecting	Construction Material	\$ 500,00
3	Resource Futures Pty., Ltd.	International	Commercial	Prospecting	Dimension & Ornamental Stones	\$ 500,00
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 15.375,40
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 8.895,20
6	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 67.500,00
7	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 16.500,00
8	Sinohydro Corporation Limited, R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 52.200,00
9	China Harbour Timor, Lda.	International	Construction	Prospecting	Construction Material	\$ 500,00
10	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 500,00
11	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 500,00
12	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 1.500,00
13	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 1.500,00
14	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 1.500,00
15	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 1.500,00

D. Pembayaran Mineral pada 2018

No.	Nama Pemrakarsa	Asal	Jenis Kegiatan	Jenis pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar
16	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 500,00
17	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Mining License	Construction Material	\$ 1.500,00
18	Yefa Unipessoal, Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 500,00
19	Yefa Unipessoal, Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 3.456,00
20	Yefa Unipessoal, Lda.	Local	Commercial	Mining License	Construction Material	\$ 3.456,00
21	Nobre Labadain Unip., Lda.	Local	Compounded	Compensation	Construction Material	\$ 11.575,20
22	Weng Enterprise Group Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 7.658,42
23	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 200.000,00
24	Weng Enterprise Group Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 7.658,42
25	Hoven II Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 2.824,79
26	Hoven II Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 12.023,35
27	CBMI Construction & Chongqing Road Engineering (Group) Co., Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 20.609,34
28	CBMI Construction & Chongqing Road Engineering (Group) Co., Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 10.120,23
29	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 31.257,94
30	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 190.154,55

D. Pembayaran Mineral pada 2018

No.	Nama Pemrakarsa	Asal	Jenis Kegiatan	Jenis pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar
31	Natureza Timor Naroman Lda., Contractor & Supplier	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 84.041,34
32	Natureza Timor Naroman Lda., Contractor & Supplier	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 6.959,49
33	China Nuclear Industry 22nd Construction Co., Ltd., R.P.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 28.556,22
34	China Nuclear Industry 22nd Construction Co., Ltd., R.P.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 59.330,25
35	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 200.000,00
36	Hoven II Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 2.824,79
37	Hoven II Unip., Lda.	Local	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 12.023,35
38	Yefa Unipessoal, Lda.	Local	Commercial	Compensation	Construction Material	\$ 2.304,00
39	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 300.000,00
40	COVEC-CRFG JV Lda.	International	Construction	Compensation	Construction Material	\$ 300.000,00
				Total Penerimaan Pendapatan yang Disetor untuk Tahun Ini		\$ 1.668.804,28

		2006	
No.	Nama Lisensi Edi Konro-Konro		Nomor Lisensi
1			N/A
2	Agostinho Gomes		N/A
3	JJ McDonalds		N/A
4	JJ McDonalds		N/A
5	Tinolina Company Ltd.	2007	No.GMR/2006/XII/002
No.	Nama Lisensi	2007	Nomor Lisensi
1	Carya Timor-Leste Lda.		No.DNGMR/2007/07/0012
2	JJ McDonalds & Sons Engineering Pty. Ltd.		N/A
3	Jonize Construction Unip. Lda.		No.GMR/2007/V/004
4	Jonize Construction Unip. Lda.		No.DNGMR/2007/07/011
5	Linatet Unip. Lda.		No.DNGMR/2007/07/006
6	Tinolina Company Ltd.		No.GMR/2007/IV/003
7	Top Liberty 88 Ltd.		No.GMR/2007/VII/005
,	TOP Elberty do Eta.	2008	110.GWII(/2007/ VII/003
No.	Nama Lisensi	2000	Nomor Lisensi
1	Unknown		N/A
2	Unknown		N/A
3	Jonize Construction Unip. Lda.		No. DNGMR/2008/VIII/0017
		2009	
No.	Nama Lisensi		Nomor Lisensi
1	Always Construction Pty. Ltd.		No. 00012/LT/DNGRM/IV/09
2	Always Construction Pty. Ltd.		No. 00012/LT/DNGRM/IV/09
3	Carya Timor-Leste Lda.		No. 00006/LT/DNGRM/II/09
4	Domin Timor Construction Lda.		No. 00010/LT/DNGRM/IV/09
5	Domin Timor Construction Lda.		No. 00011/LT/DNGRM/IV/09
6	East Sunrise Timor-Leste Construction		No. 00003/LT/DNGRM/I/09
7	East Sunrise Timor-Leste Construction		No. 00004/LT/DNGRM/I/09
8	Ensul Esphera Engenharia		No. 00014/LT/DNGRM/V/09
9	Ensul Esphera Engenharia		No. 00018/LT/DNGRM/X/09
10	Excel Construction Material Co. Ltd.		No. 00019/LT/DNGRM/X/09
11	Jonize Construction Unip. Lda.		No. 00005/LT/DNGRM/II/09
12	Linatet Unipesoal Lda		No. 00009/LT/DNGRM/III/09
13	Montana Diak Unip. Lda.		No. 00016/LT/DNGRM/X/09
14	Montana Diak Unip. Lda.		No. 00017/LT/DNGRM/X/09
15	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.		N/A
16	Top Liberty 88 Lda.		No. 00007/LT/DNGRM/II/09
17	Top Liberty 88 Lda.		No. 00008/LT/DNGRM/II/09
18	Top Liberty 88 Lda.		N/A
19	Trans Global Unip. Lda.		No. 00001/LT/DNGRM/XII/08

		0040
NI-	Name Desired	2010
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Always Construction Pty. Ltd.	No. 0001/LT/DNGRM/I/2010
2	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0004/LT/DNGRM/II/2010
3	Express Distribution Services III Unip. Lda.	No. 0010/LT/DNGRM/VII/2010
4	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNGRM/II/2010
5	Linatet Unip. Lda.	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2010
6	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/XI/2010
7	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0014/LT/DNGRM/XI/2010
8	Monte Veado Ltd.	No. 0009/LT/DNGRM/V/2010
9	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0005/LT/DNGRM/II/2010
10	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0006/LT/DNGRM/III/2010
11	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0007/LT/DNGRM/III/2010
12	Tak Kong Electronic Unip. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/III/2010
13	Timor Block Building Industry	No. 0012/LT/DNGRM/IX/2010
14	United Tibar Quarry Unip. Lda.	No. 0013/LT/DNGRM/IX/2010
15	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0015/LT/DNGRM/XII/2010
		2011
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0005/LT/DNGRM/III/2011
2	Ensul Esphera Engenharia	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2011
3	Fatuk Candi Jonggrang	No. 0013/LT/DNGRM/XII/2011
4	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 0004/LT/DNGRM/III/2011
5	Libama Comsorsium	No. 0009/LT/DNGRM/X/2011
6	Linatet Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNGRM/II/2011
7	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/XI/2011
8	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0012/LT/DNGRM/XI/2011
9	Monte Veado Ltd.	No. 0006/LT/DNGRM/VII/2011
10	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/I/2011
11	Suai Indah Construction Lda.	No. 0001/LT/DNGRM/I/2011
12	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0014/LT/DNGRM/XII/2011

		2012
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0007/LT/DNGRM/VI/2012
2	Castelo Fronteira Unip. Lda.	No. 0009/LT/DNGRM/VII/2012
3	Empat Saudara Lda.	No. 0001/LT/DNGRM/II/2012
4	Ensul Esphera Engenharia	No. 0003/LT/DNGRM/III/2012
5	Ensul Esphera Engenharia	No. 0009/LT/DNGRM/VII/2012
6	Jonize Construction Unip Lda.	No. 0006/LT/DNGRM/VI/2012
7	RMS Engineering & Construction Pty. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/II/2012
8	Tak-Kong Electronic Unip. Lda.	No. 0012/LT/DNGRM/VIII/2012
9	Timor Block Building Industry	No. 0004/LT/DNGRM/III/2012
10	Timor Block Building Industry	No. 0004/LT/DNGRM/III/2012
11	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2012
12	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/VIII/2012
		2013
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Empat Saudara Lda.	No. 0009/LT/DNM/VI/2013
2	Libama Comsorsium	No. 0006/LT/DNM/VI/2013
3	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0002/LT/DNM/I/2013
4	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNM/I/2013
5	RMS Engineering & Construction Pty. Lda.	No. 0008/LT/DNM/IV/2013
6	Suai Indah Constuction Lda.	No. 0005/LT/DNM/I/2013
7	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0004/LT/DNM/I/2013
8.	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0007/LT/DNM/IV/2013
		2014
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Aitula Fuel's Lda.	No. 0010/LT/DNM/XII/2014
2	Aitula Fuel's Lda.	No. 0013/LT/DNM/XII/2014
3	Carya Timor-Leste Lda.	N/A
4	Empat Saudara Lda.	No. 0009/LT/DNM/XII/2014
5	Jonize Construction Unip. Lda.	N/A
6	Jonize Construction Unip. Lda.	N/A
7	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 16/2014
8	Libama Consorcio Lda.	No. 0007/LT/DNM/XI/2014
9	Maliana Brother's Lda.	No. 0011/LT/DNM/XII/2014
10	Manoko Unip. Lda.	No. 0014/LT/DNM/XII/2014
11	Montana Diak Unip. Lda.	N/A
12	Montana Diak Unip. Lda.	N/A
13	Nobre Labadain Unip. Lda.	No. 12/2014
14	Suai Indah Construção Lda.	No. 0006/LT/DNM/X/2014
15	TL Cement Lda.	No. 01/2014
16	Uha Cae Lda.	No. 0008/LT/DNM/XI/2014
17	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	N/A
18	Worldview Enterprise Unip. Lda.	No. 15/2014

		2015
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Aitula Construction Electrical Lda.	No. 28/2015
2	Aitula Construction Electrical Lda.	No. 29/2015
3	Always Construction Unip. Lda.	No. 24/2015
4	Carya Timor-Leste Lda.	No. 15/2015
5	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 35/2015
6	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 12/2015
7	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 11/2015
8	City Development Group Lda.	No. 01/2015
9	Community Housing Ltd.	No. 10/2015
10	CSI Company Lda.	No. 02/2015
11	CSI Company Lda.	No. 03/2015
12	EDS Construction	No. 36/2015
13	Hoven II Unip. Lda.	No. 32/2015
14	Hoven II Unip. Lda.	No. 33/2015
15	Jonize Unip. Lda.	No. 21/2015
16	Jonize Unip. Lda.	No. 14/2015
17	Jonize Unip. Lda.	No. 09/2015
18	Jonize Unip. Lda.	No. 08/2015
19	King Construction Unip. Lda.	No. 05/2015
20	Libama Consorcio Lda.	No. 25/2015
21	Modena Technic Unip. Lda.	No. 22/2015
22	Montana Diak Unip. Lda.	No. 17/2015
23	Montana Diak Unip. Lda.	No. 18/2015
24	Montana Diak Unip. Lda.	No. 19/2015
25	Monte Veado Lda.	No. 06/2015
26	Nobre Labadain Unip. Lda.	No. 37/2015
27	Shabryca Construction Unip. Lda.	No. 26/2015
28	Shabryca Construction Unip. Lda.	No. 04/2015
29	Soso Building Unip. Lda.	No. 13/2015
30	Suai Indah Ltd.	No. 38/2015
31	Timor Block Building Industry	No. 16/2015
32	TL Cement Lda.	No. 07/2015
33	Uha Cae Lda.	No. 31/2015
34	Uha Cae Lda.	No. 30/2015

		2016
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)	No. 02/2016
2	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)	No. 03/2016
3	CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRCUTION CORPORATION (CICO)	No. 06/2016
4	CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRCUTION CORPORATION (CICO)	No. 05/2016
5	China Shandong International Company Lda. (CSI)	No. 03/2016
6	China Shandong International Company Lda. (CSI)	No. 04/2016
7	TL Cement	No. 01/2016
8	Worldview Enterprise	No. 03/2016
9	R.D. Interior Junior Construction	No. 07/2016
10	R.D. Interior Junior Construction	No. 08/2016
11	R.D. Interior Junior Construction	No. 11/2016
12	R.D. Interior Junior Construction	No. 12/2016
13	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 09/2016
14	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	No. 13/2016
15	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 10/2016
16	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)	No. 14/2016
17	Shabryca Construction Unipessoal, Lda.	No. 19/2016
18	Jonize Construction Unipessoal, Lda.	No. 24/2016
19	Aspalink, Lda.	No. 20/2016
20	Aspalink, Lda.	No. 21/2016
21	Carya Timor Leste, Lda.	No. 22/2016
22	Weng Enterprise Group, Co., Ltd.	No. 26/2016
23	Weng Enterprise Group, Co., Ltd.	No. 26/2016
24	City Development Group, Lda.	No. 23/2016
25	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 18/2016
26	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 16/2016
27	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 17/2016
28	Suai Indah Ltd.	No. 25/2016
29	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 15/2016

		2017
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	llatun Unipesoal, Lda.	No. 01/2017
2	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 02/2017
3	Jova Construction Unipessoal Lda.	No. 03/2017
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 04/2017
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 05/2017
6	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 06/2017
7	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 07/2017
8	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 08/2017
9	Chongqing International Construction Corporation, R.P.	No. 09/2017
10	Mira Mar Bloco Unipessoal Lda.	No. 10/2017
11	Gorobu Diak Lda.	No. 11/2017
12	Shabryca Construction Unipessoal Lda.	No. 12/2017
13	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 13/2017
14	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 14/2017
15	Yefa Unipessoal, Lda.	No. 15/2017
16	Timor Block Building, Lda.	No. 16/2017
		2018
No.	Nama Lisensi	Nomor Lisensi
1	Pantarhei Unipessoal. Lda	No. 01/2018
2	Timor Surveying & Mapping. Lda	No. 02/2018
3	Resource Futures PTY LTD	No. 03/2018
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 04/2018
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 05/2018
6	China Harbour Timor, Lda.	No. 06/2018
7	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 07/2018
8	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 08/2018
9	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 09/2018
10	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 10/2018
11	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 11/2018
12	Shaghai Construction Group., Co., Ldt., R.P	No. 12/2018
13	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 13/2018
14	Shaghai Construction Group.,Co.,Ldt.,R.P	No. 14/2018
15	Yefa Unipessoal, Lda.	No. 15/2018

Sumber: http://www.anpm.tl/list-of-licenses-2006-2018/

F. Kontrak Bagi Hasil Migas -JPDA

	Nomor Iisensi	Deskripsi	Operator	Mitra Usaha Patungan	Bahan yang Diekstrak	Tanggal berlaku	Tanggal kadaluarsa
•	03-12	ConocoPhillips sebagai operator kontrak mengebor 3 sumur pengisi untuk menjaga produksi dan menjamin ekspor gas ke Kilang LNG Darwin. Pada tahun	ps (03-12) Pty Ltd	,	Oil and gas condensate	20-05- 2002	06-02-2022
	03-13	2018 terdapat modal besar untuk infill well yang terjadi, belanja modal terkait dengan pemboran infill well.	ps JPDA Pty Ltd	Eni JPDA 03-13 Limited; Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd; ConocoPhillips (03- 13) Pty Ltd	Gas condensate	20-05- 2002	16-12-2021
	03-19	Perjanjian Batas Maritim, dan sambil menunggu menunggu ratifikasinya, selama periode	Petroleum (Timor Sea	OG ZOCA (95-19) Pty Ltd; ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd; Shell Development (PSC 19) Pty Ltd		20-05- 2002	04-10-2026
	03-20	2018, tim gabungan antara Australia dan Timor-Leste telah melakukan diskusi berkelanjutan untuk pemesanan perubahan status kerangka hukum khusus untuk PSC Sunrise. Diskusi itu semacam diharapkan selesai menjelang akhir 2019.	Petroleum	OG ZOCA (96-20) Pty Ltd; Shell Development (PSC 20) Pty Ltd; ConocoPhillips (03- 20) Pty Ltd		02-05- 2002	13-11-2026
	06-105	Pengoperasian PSC ini dihentikan sementara akibat dampak dari harga minyak yang rendah terhadap ekonomi lapangan Kitan dan dicadangkan untuk pengembangan lapangan di masa mendatang.	06-105 Pty	INPEX Timor Sea Ltd. ; Talisman Resources (JPDA 06-105) Pty. Ltd	Oil	22-09- 2006	15-12-2019
	11-106	PSC ini telah diperpanjang hingga 2019, dimana Eni berencana mengebor komitmen dua sumurnya pada kuartal pertama 2019.	Eni JPDA 11-106 B.V.	Inpex Offshore Timor-Leste Ltd; TIMOR GAP, E.P. PSC 11-106	Oil	23-10- 2013	22-10-2020

Sumber: Laporan Tahunan ANPM 2018

F. Kontrak Bagi Hasil Minyak & Gas - TLEA

Nomor Iisensi	Deskripsi	Operator	Mitra Usaha Patungan	Bahan yang Diekstrak	Tanggal berlaku	Tanggal kadaluarsa
TL-S0- 15-01	Selama periode 2018 TIMOR GAP OFFSHORE BLOCK menyelesaikan interpretasi seismiknya broadband seismik Buaya 3D, dan teridentifikasi.	Unipessoal		Oil & gas	23-12- 2015	23-12-2022
S-06- 04-E	ANPM memberikan perpanjangan selama 27 bulan lagi pada 26 Maret 2018, perpanjangan tersebut akan memungkinkan Eni menyelesaikan studi G&G untuk memperkuat ekonomi eksplorasi.	S.P.A	Galp Exploracao e Producao Petrolifera Lda; Korea Gas Corporation	N/A	03-11- 2006	28-03-2018
TL-OT- 17-08	2019, berbagai studi geologi	Resources Pty	TIMOR GAP, Onshore Block ,UNIPESSOAL, LDA	Oil & gas	07-04- 2017	Expected to be at the end of 2024
TL-OT- 17-09		Timor	TIMOR GAP, Onshore Block ,UNIPESSOAL, LDA	Oil & gas	07-04- 2017	Expected to be at the end of 2024

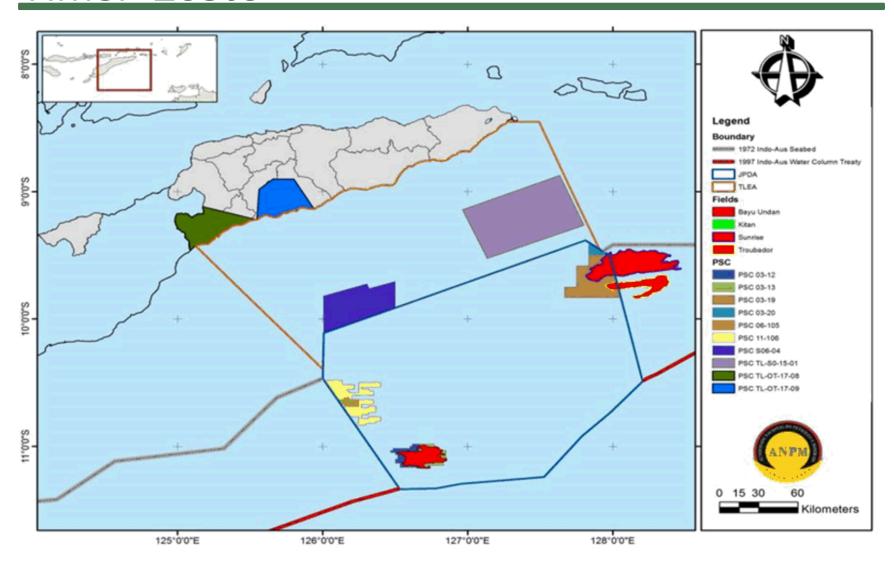
Sumber: Laporan Tahunan ANPM 2018

G. Activities in the major fields

Field	Operator / Contract	Activity 2018		
Kitan Field	Eni - JPDA PSC 06-105	Kitan is an oil field located approximately 170 km from Timor-Leste South coast and over 500 km north west of Darwin, Australia. The field is operated by Eni JPDA 06-105 Pty Ltd and produced from 3 productions wells, hydrocarbon produced was processed and stored for offloading on FPSO facility. ▶ No production for Kitan field as Kitan field was Shut-in on 16 December 2015. Risers were disconnect and completed topside process cleaning by flushing and purging of production plant. FPSO departed from Kitan field on 27 February 2016. ▶ ANPM is in continuous discussion with Eni on the method and time for final abandonment.		
Bayu-Undan	ConocoPhillips - JPDA PSC 03- 12 and 03-13	BU is a gas condensate field located 250 km from Timor-Leste South coast and 480 km north-west of Darwin, Australia. The field is operated by ConocoPhillips PSC 03-12 and 03-13 Pty Ltd. The field facilities include a Central Production and Processing Complex (DPP and CUQ), FSO, WP1, subsea in-field pipelines and gas export pipeline to Darwin. ▶ In the year of 2018, Bayu Undan field produced from 11 producing wells of 2 R2P wells, 3 infill wells and 6 existing producing wells. ▶ The average liquid production (Condensate, Natural Gas and LPG) in 2018, was 17 kbpd until November and then increased to 30kbpd. The exported gas to Darwin LNG remains steady at an average of 700 MMscf/day (510 MMscf/day in 2017). ▶ In 2018, the decrease of Condensate and LPG is explained by the production interruptions which include a major shutdown of the Bayu Undan field in May and early June.		
Sunrise- Troubadour	Woodside Energy Limited - JPDA PSC 03- 19 and 03-20	Woodside Petroleum, an Australia oil company is the operator of the Sunrise PSC together with ConocoPhillips (03-19 & 03-20) Pty Ltd. ▶ Sunrise and Troubadour is a proven discovered gas field with associated condensate. The development of this project is very much subject to the on-going negotiation between the two countries. For permit maintenance, this PSC continued maintain its presence with annual minimum work programs and budget for its local office, permits and corporate initiative investments.		

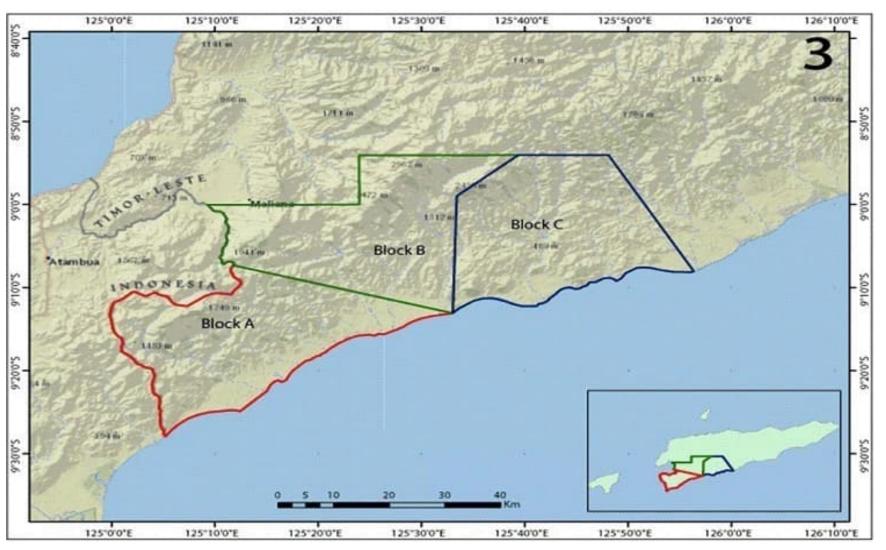
Sumber: Laporan Tahunan ANPM 2018

H. Sumber daya minyak dan gas bawah laut <u>Timor-Leste</u>



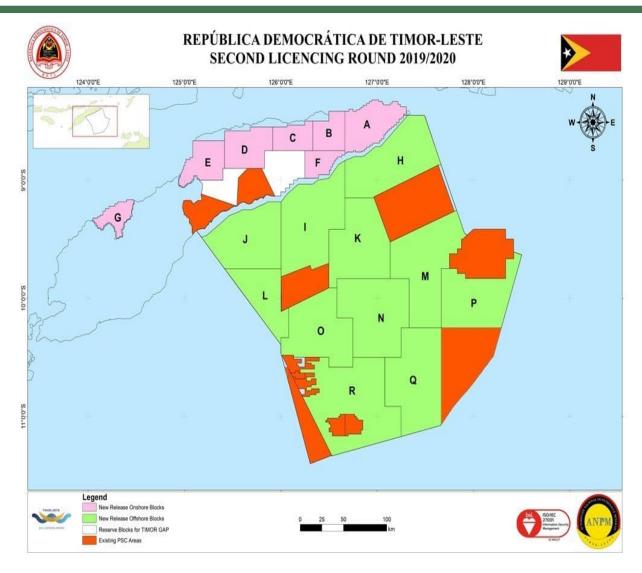
Sumber: http://web01.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/LafaekMap

I. Blok Onshore Timor GAP



Sumber: Gambar disediakan oleh Timor GAP

J. Blok baru setelah SK UU 15/2019



K. Kompilasi Minyak Baru - Perubahan Nilai Impor dan Ekspor

	Ekspor	
	TL NA 2017*	TL NA 2018*
2000	119.50	39.00
2001	88.50	42.90
2002	83.00	36.70
2003	92.60	33.70
2004	720.60	33.00
2005	1,502.60	33.00
2006	2,733.30	41.90
2007	2,871.50	54.20
2008	4,323.50	60.60
2009	3,161.30	66.70
2010	4,008.00	75.50
2011	5,517.00	66.80
2012	6,520.00	82.60
2013	5,302.20	77.90
2014	3,893.00	66.20
2015	2,323.80	48.50
2016	1,450.40	51.80
2017	1,519.40	38.20

Impor					
	TL NA 2017*	TL NA 2018*			
2000	613.40	605.70			
2001	758.50	753.40			
2002	815.40	810.30			
2003	572.20	566.30			
2004	490.30	440.10			
2005	430.50	311.90			
2006	894.30	406.30			
2007	1,123.60	645.00			
2008	1,336.50	817.00			
2009	1,840.20	1,079.60			
2010	2,026.70	1,110.20			
2011	2,297.30	1,401.10			
2012	2,395.20	1,408.70			
2013	2,077.00	1,033.30			
2014	2,406.00	1,131.40			
2015	1,692.90	906.70			
2016	1,522.90	937.60			
2017	1,490.30	871.70			

Sumber: TL National Accounts 2017* and TL National Accounts 2018*



